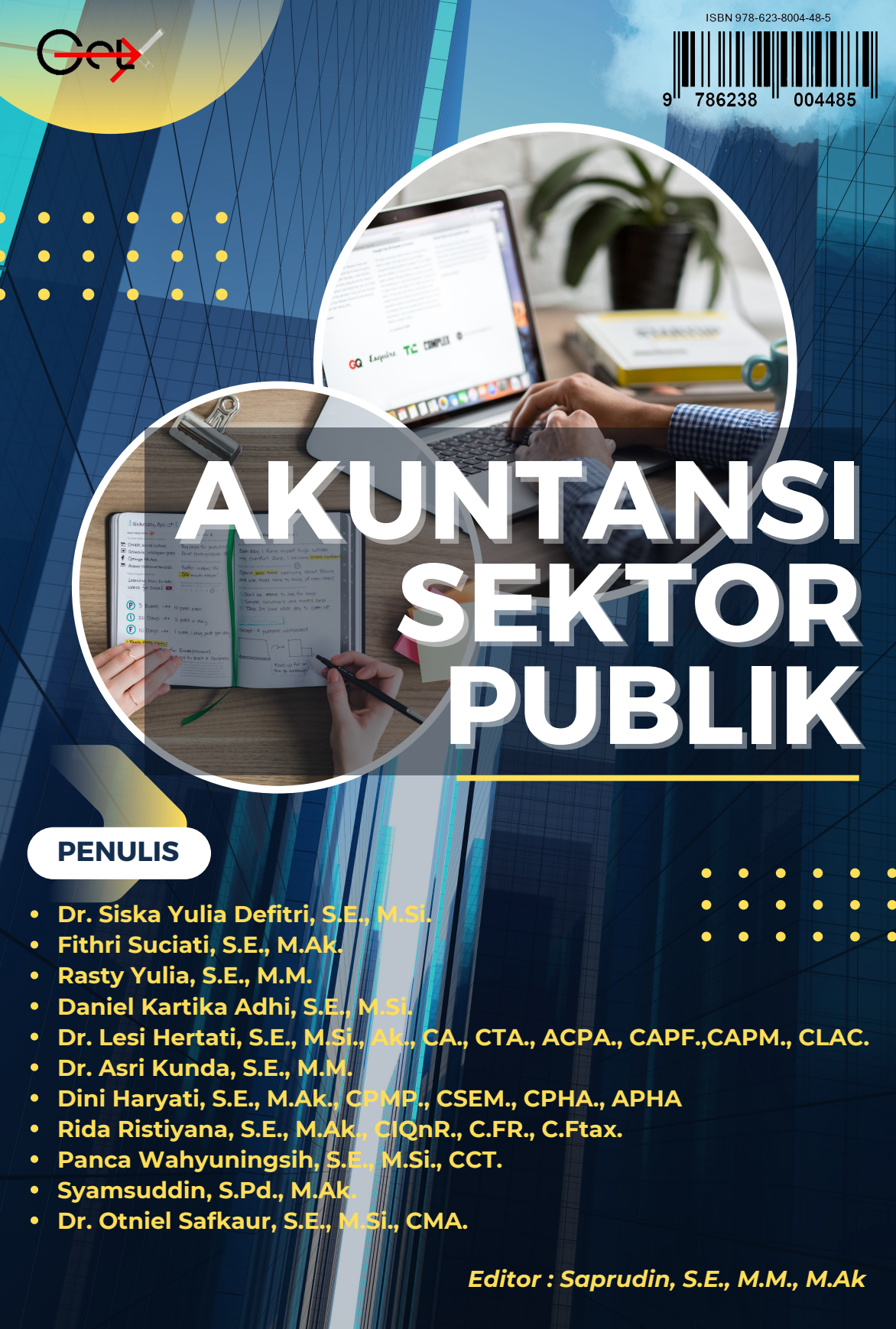




AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PENULIS

- Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
- Fithri Suciati, S.E., M.Ak.
- Rasty Yulia, S.E., M.M.
- Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.
- Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF., CAPM., CLAC.
- Dr. Asri Kunda, S.E., M.M.
- Dini Haryati, S.E., M.Ak., CPMP., CSEM., CPHA., APHA
- Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax.
- Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CCT.
- Syamsuddin, S.Pd., M.Ak.
- Dr. Otniel Safkaur, S.E., M.Si., CMA.

Editor : Saprudin, S.E., M.M., M.Ak

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.

Fithri Suciati, S.E., M.Ak.

Rasty Yulia, S.E., M.M.

Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.

Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF.,
CAPM., CLAC.

Dr. Asri Kunda, S.E., M.M.

Dini Haryati, S.E., M.Ak., CPMP., CSEM., CPHA., APHA

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax.

Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CCT.

Syamsuddin, S.Pd., M.Ak.

Dr. Otniel Safkaur, S.E., M.Si., CMA.



PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis :

Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.

Fithri Suciati, S.E., M.Ak.

Rasty Yulia, S.E., M.M.

Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.

Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF., CAPM., CLAC.

Dr. Asri Kunda, S.E., M.M.

Dini Haryati, S.E., M.Ak., CPMP., CSEM., CPHA., APHA

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax.

Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CCT.

Syamsuddin, S.Pd., M.Ak.

Dr. Otniel Safkaur, S.E., M.Si., CMA.

ISBN : 978-623-8004-48-5

Editor : Saprudin, S.E., M.M., M.Ak.

Penyunting : Debi Eka Putri, S.E., M.M.

Desain Sampul dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST.

Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001

Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah

Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, September 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk

dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik.

Pembahasan dalam buku ini meliputi Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik, Laporan Keuangan Sektor Publik, Anggaran Sektor Publik, Anggaran Pemerintah APBN dan APBD, Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Keuangan Daerah, Auditing Di Sektor Pemerintahan dan Konsep Pelaporan Keuangan Sektor Publik.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami teori Akuntansi Sektor Publik, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepustakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, September 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian.....	2
1.3 Perbedaan Akuntansi Publik dan Akuntansi Bisnis	4
1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	5
1.5 Faktor yang Mempengaruhi Organisasi Sektor Publik.....	7
1.6 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	8
1.7 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	9
BAB II LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	
2.1 Pengguna Laporan Keuangan	13
2.2 Kebutuhan Laporan Keuangan.....	13
2.3 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14
2.4 Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan.....	15
BAB III ANGGARAN SEKTOR PUBLIK	
3.1 Pengertian Anggaran.....	33
3.2 Jenis-Jenis Anggaran	36
3.3 Siklus Anggaran	37
3.4 Sistematisasi Anggaran	39
3.5 Pendekatan Penyusunan Anggaran.....	43
BAB IV ANGGARAN PEMERINTAH APBN DAN APBD	
4.1 Pendahuluan	54
4.2 Anggaran Pemerintah APBN.....	55
4.3 Anggaran Pemerintah Daerah.....	59
BAB V AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	
5.1 Pendahuluan.....	65
5.2 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	67
5.3 Manfaat Manajemen di Sektor Publik Akuntansi.....	70
5.4 Rangkuman	92
BAB VI AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	

6.1 Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	97
6.2 Karakteristik dari Akuntansi Untuk Sektor Publik	98
6.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	99
6.4 Sistem Akuntansi	100
6.5 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.....	104
6.6 Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik	106
6.7 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	108
6.8 Laporan Keuangan Sektor Publik.....	109
6.9 Analisis laporan Keuangan.....	118
6.10 Periode Pelaporan.....	127
BAB VII PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK	
7.1 Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	130
7.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja.....	131
7.3 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	132
7.4 Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja	132
7.5 Peranan Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja.....	134
7.6 Indikator Kinerja dan Pengukuran <i>Value for Money</i>	137
7.7 Pengukuran <i>Value for Money</i>	141
7.8 Pengembangan Indikator Pengukuran <i>Value for Money</i>	141
7.9 Langkah-Langkah Pengukuran Pengukuran <i>Value for Money</i>	143
7.10 Pengukuran Kinerja dengan <i>Balance Scorecard</i>	145
BAB VIII AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	
8.1 Pendahuluan	150
8.2 Pengertian Akuntansi Pemerintah Pusat.....	151
8.3 Dasar Hukum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	151
8.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah Pusat	152
8.5 Tujuan Akuntansi Pemerintah Pusat.....	152
8.6 Karakteristik Akuntansi Pemerintah Pusat.....	153
8.7 Ciri Pokok Akuntansi Pemerintah Pusat.....	154
8.8 Standar Akuntansi Pemerintah Pusat.....	155
8.9 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.....	156
8.10 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.....	156
8.11 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	157
8.12 Siklus Akuntansi Pemerintah Pusat.....	159
8.13 Perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintah di	

Indonesia	161
BAB IX AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	
9.1 Pendahuluan	165
9.2 Sistem Akuntansi SKPD.....	167
9.3 Sistem Akuntansi PPKD	174
BAB X AUDITING DI SEKTOR PEMERINTAHAN	
10.1 Auditing dan Sektor Pemerintah	182
BAB XI KONSEP PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	
11.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	195
11.2 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik.....	196
11.3 Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik	197
11.4 Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.....	200
11.5 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.....	203
11.6 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta	206
11.7 Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik	211
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Siklus Anggaran.....	39
Gambar 4.1 Alur Pengerjaan Dokumen Penganggaran.....	62
Gambar 4.2 Alur Pengerjaan Dokumen Penganggaran.....	62
Gambar 5.1 Manajemen Publik, Pengendalian Internal, Audit Independen.....	69
Gambar 5.2 Persepsi tentang Modernisasi dari Akuntansi Sektor Publik.....	72
Gambar 5.3 Peran Manajemen Akuntansi Sektor Publik.....	86
Gambar 6.1 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	108
Gambar 8.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Dasar Akuntansi Publik dan Swasta	5
Tabel 1.2 Faktor Mempengaruhi Organisasi Sektor Publik	7
Tabel 2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran Untuk PPKD.....	19
Tabel 2.2 Format Laporan perubahan saldo anggaran lebih	21
Tabel 2.3 Format Neraca PPKD	23
Tabel 2.4 Format LO PPKD.....	25
Tabel 2.5 Format laporan arus kas	28
Tabel 2.6 Laporan Perubahan ekuitas PPKD	30
Tabel 3.1 Contoh Anggaran Tradisional	44
Tabel 3.2 Bentuk perincian anggaran tradisional	44
Tabel 3.3 Contoh Anggaran Kinerja	47
Tabel 4.1 Struktur APBD.....	60
Tabel 6.1 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta.....	114
Tabel 7.1 Contoh Variabel Kunci.....	134
Tabel 7.2 Contoh Pengembangan Indikator Kerja.....	134
Tabel 11.1 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	209

BAB I

KONSEP DASAR AKUNTANSI

SEKTOR PUBLIK

Oleh Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.

1.1 Pendahuluan

Perkembangan topik akuntansi yang cukup banyak diperbincangkan adalah topik-topik yang terkait dengan akuntansi sektor publik. Tuntutan kepada lembaga publik seperti pemerintah yang saat ini masyarakat harapkan untuk bisa lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan wujud dari hak masyarakat dalam pelaksanaan dana publik yang terwujud dalam bentuk anggaran pemerintah. Pelaksanaan anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik (Hantono *et al.*, 2021) oleh pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik.

Tujuan akuntansi adalah mengetahui informasi dari kegiatan organisasi, jika organisasi berkegiatan dalam menghasilkan keuntungan atau laba maka disebut sebagai akuntansi bisnis, namun jika kegiatan organisasi tidak bertujuan untuk menghasilkan laba, maka disebut dengan organisasi sektor publik (nir laba). Berbagai macam literatur sebelumnya membahas akuntansi sektor publik atau awalnya disebut dengan *non profit organization*, namun beberapa tahun terakhir, terutama perkembangan yang ada bahwa para ahli tidak menggunakan kata sektor lagi sebagai bentuk penyamaan atau penyelarasan dengan

akuntansi pada yang disebelah yaitu *comersial accounting* atau akuntansi bisnis yang tidak menggunakan akuntansi sektor bisnis. Dengan demikian kata sektor dihilangkan karena dianggap mengecilkan akuntansi pada organisasi ini, sehingga sekarang disebut dengan akuntansi publik (*public accounting*).

1.2 Pengertian

Definisi sektor publik sangat luas, hal ini setiap disiplin ilmu memiliki pengertian masing-masing. Dari pandangan ekonomi, organisasi publik didefinisikan sebagai lembaga yang kegiatannya terkait dengan menyediakan barang publik dan jasa publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan hak masyarakat umum (Handayani, 2019). Biasanya sektor publik sering disebut sebagai bidang yang berhubungan dengan pengelolaan negara. Namun dalam arti sempit juga disebut sebagai penerimaan negara atau organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Begitu juga disiplin ilmu yang menaungi sektor publik ini bisa mencakup administrasi, politik, sosiologi, hukum, ekonomi dan akuntansi.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian akuntansi publik yaitu:

1. Indra Bastian (2006)

Akuntansi publik adalah teknik akuntansi dan mekanisme analisis akuntansi yang berlaku untuk pengelolaan berbagai dana publik oleh lembaga-lembaga tinggi nasional dan departemen bawahannya

2. Halim (2002)

Akuntansi publik merupakan kegiatan jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif berdasarkan sifat keuangan lembaga pemerintah yang memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2002)

3. Mardiasmo (2018)

Akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik (Mardiasmo, 2018)

4. Dwi Ratmono (2015)

Akuntansi publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah untuk membuat keputusan ekonomi yang menguntungkan pihak eksternal (Ratmono and Sholihin, 2015)

5. Erlina et al. (2015)

Akuntansi publik adalah proses pencatatan transaksi ekonomi dalam suatu organisasi, biasanya dilakukan disektor publik seperti partai politik, komunitas, sekolah, universitas dan lain sebagainya (Erlina, Rambe and Rasdianto, 2015)

Sementara itu definisi akuntansi dapat diamati dari dua pedoman yang merupakan acuan dalam menerjemahkan suatu pengeritan. Akuntansi Menurut *American Accounting Association* (AAA) disebut proses mengidentifikiasi, mengukur, dan melaporkan semua informasi yang digunakan nantinya sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Sementara berdasarkan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), dapat dijelaskan bahwa akuntansi itu merupakan suatu seni mencatat, kemudian menghitung dan meringkas proses transaksi dari peristiwa atau kejadian dalam bentuk keuangan dan kemudian dapat ditafsirkan yang dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang tertentu.

Dengan demikian secara sederhana pengertian akuntansi yaitu suatu proses pencatatan yang diawali dengan mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan semua

informasi keuangan yang nantinya digunakan dalam mengambil keputusan setelah dilakukan penilaian dari informasi tersebut dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan dari informasi tersebut. Dengan demikian dalam akuntansi publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan pada organisasi publik dalam menghasilkan informasi finansial untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Arti di atas dapat menjelaskan bahwa akuntansi publik bertujuan memberikan transparansi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara terbuka terkait dengan penggunaan dana publik. Seperti lembaga pemerintah baik pusat dan daerah serta lembaga lain yang tidak termasuk pemerintah seperti rumah sakit, perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Akuntansi publik memiliki kecenderungan untuk memeriksa sistem akuntansi. Indikator dalam menilai prestasi ataupun kinerja organisasi publik saat ini salah satu bagian sulit dalam melakukan pengembangan akuntansi publik saat ini, karena ada tekanan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan keuangan yang akan menjadi perhatian dalam akuntansi publik.

1.3 Perbedaan Akuntansi Publik dan Akuntansi Bisnis

Perbedaan pada akuntansi sektor publik dan bisnis yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan dan tujuan dari masing-masing organisasi. Perbedaan ini dirangkum yang terlihat pada tabel dibawah ini (Yuesti, Dewi and Pramesti, 2020):

Tabel 1.1 : Perbedaan Dasar Akuntansi Publik dan Swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan	<i>Non profit oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Permodalan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dan lain-lain.	Modal internal: Modal pribadi, penjualan, aset. Modal eksternal: utang, obligasi, saham
Pertanggungjawaban	Masyarakat dan parlemen	Pemegang saham dan kreditor
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk umum	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	<i>Cash Accounting</i>	<i>Accrual Accounting</i>
Struktur Organisasi	Birokrasi, Kaku, Hirarki	Fleksibel : Datar, Piramid, lintas fungsional dan lain-lain

1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik ialah sesuatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menciptakan benda serta pelayanan publik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan serta hak publik. Dalam sebagian perihal, lembaga publik mempunyai kesamaan dengan swasta. Keduanya bersama memakai sumber energi yang sama serta proses pengendalian yang nyaris sama. Tetapi dalam bagian tertentu, sektor publik tentu saja tidak bisa disubstitusikan dengan swasta semacam halnya pada bagian pemerintahan.

Berdasarkan *American Accounting Association* (1970), akuntansi publik memiliki tujuan yaitu (Madjid, 2019) :

1. Kontrol Manajemen (*management control*)

Tujuan kontrol manajemen adalah memberikan informasi berdasarkan kebutuhan dalam mengelola organisasi dengan

cepat, efisien, tepat dan ekonomis atas operasional dan menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Memberikan informasi yang menguntungkan bagi manajer publik. Dapat diketahui bahwa dalam memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pada tanggung jawab penggunaan sumber daya atau setiap bagian berada dibawah tanggung jawab manajer. Melalui akuntansi sektor publik dapat melaporkan kegiatan maupun penggunaan dana atau anggaran publik.

Laporan keuangan pemerintah daerah wajib menerangkan berbagai macam data yang mempunyai manfaat terhadap pelaksanaan akuntabilitas serta membuat kebijakan yang tepat sesuai dalam kerangka konseptual akuntansi publik. Tujuan yang dapat diketahui dalam akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data sumber, alokasi dan implementasi potensi keuangan
2. Memberikan data yang berhubungan dengan kesesuaian pendapatan dalam periode berjalan sebagai pembelanjaan seluruh pengeluaran
3. Memberikan informasi semua potensi ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan
4. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang cocok dengan keadaan organisasi sehingga menggambarkan kondisi keuangan sesuai dengan penerimaan dalam jangka waktu yang relatif pendek ataupun dalam jangka panjang

1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Sektor Publik

Informasi keuangan yang menjadi kewajiban pemerintah akan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dari segi ekonomi, sosial dan politik bagi pihak yang membutuhkan, karena dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk a) komparasi kinerja keuangan secara aktual dari anggaran, b) mengevaluasi keadaan finansial dan hasil operasional, c) dapat meningkatkan rasio kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan dan lainnya, d) menilai efisiensi dan efektifitas (Kawatu, 2019).

Karena itu informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak saja menggambarkan keuangan saja tetapi juga informasi lainnya terkait dengan pembuat laporan keuangan seperti penduduk, letak geografis, jenis pekerjaan masyarakat, sehingga hal tersebut mempengaruhi informasi yang akan dihasilkan dari laporan keuangan. Dibawah ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas organisasi sektor publik.

Tabel 1.2 : Faktor Mempengaruhi Organisasi Sektor Publik

Ekonomi	Politik	Kultural	Demografis
Tingkat inflasi	Relasi negara dengan masyarakatnya	Keragaman ras, suku, agama, budaya dan bahasa	Tingkat Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan sektor ekonomi	Legitimasi hukum pemerintah	Sistem nilai yang berlaku di masyarakat (moral)	Struktur/ penyebaran usia penduduk
Tenaga kerja produktif	Tipe pemerintahan	Historis/sejarah	Migrasi (transmigrasi, imigrasi, dan lain lain)
Nilai kurs/ Nilai tukar mata uang	Ideologi dan dasar yang dianut	Kondisi sosiologis masyarakat	Tingkat kesehatan masyarakat

Infrastruktur sarana / dan prasarana	Jaringan internasional	Tingkat pendidikan	Angka, harapan hidup
Tingkat pertumbuhan, pendapatan, perkapita	Relasi antar lembaga	Karakteristik masyarakat yang beragam	Tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita

1.6 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup dalam akuntansi sektor publik tentu saja lebih luas jika dibandingkan dengan sektor bisnis. Hal ini melingkupi bidang akuntansi yang memiliki ruang yang luas demi kepentingan masyarakat dan bukan *profit motive*. Lingkup akuntansi sektor publik melingkupi: 1) Perencanaan yang dilakukan dalam keuangan dan pembangunan, 2) sistem pengawasan dan pemeriksaan, dan 3) Pelaksanaan keuangan yang sesuai dengan aturan pemerintah.

Maka cakupan akuntansi publik pada organisasi sektor publik dan bagian utama akuntansinya sebagai berikut (Bastian, 2006) :

1. Akuntansi Pemerintahan atau lembaga tinggi pemerintah Negara dan Departemen di bawah naungannya
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Partai Politik
4. Akuntansi LSM
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi)
7. Akuntansi Kesehatan
8. Akuntansi Tempat Peribadatan
9. Akuntansi Organisasi *non profit*

Secara sederhana dapat dipahami bahwa ruang lingkungnya yaitu lembaga yang menggunakan anggaran publik. Oleh karena itu,

pertanggung jawaban organisasi untuk implementasi anggaran masyarakat ini membuat lembaga wajib melaporkan keuangan melalui sistem akuntansi. Dengan kata lain, akuntansi sektor publik dibedakan atas:

1. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)

Cakupan ini menunjukkan informasi akuntansi ditujukan untuk memberikan informasi terkait dengan kejadian ekonomi maupun keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

Dalam ini cakupannya terbagi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan Akuntansi pemerintah daerah adalah akuntansi pemerintahan daerah provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten dan kota

2. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Akuntansi sosial ini artinya selain dari akuntansi pemerintah dalam akuntansi sektor publik. Akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi ekonomi pada sebuah entitas sosial atau bukan mencari laba. Seperti partai politik, mesjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan lain sebagainya.

1.7 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi publik sangat berbeda dengan akuntansi swasta. Perbandingan ini dilihat dari tipe lembaga ataupun lembaga yang mempraktikkan sistem akuntansi ini. Akuntansi sektor publik lebih berkaitan dengan lembaga ataupun lembaga pemerintahan. Berikut ini karakteristik dalam akuntansi sektor publik:

1. Relevan

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi sektor publik haruslah bersifat relevan, yaitu informasi yang

disampaikan dapat mengevaluasi kejadian dimasa lalu serta masa yang akan datang sehingga dapat mempengaruhi keputusan

2. Handal

Handal memiliki makna bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akuntansi sektor publik bermanfaat sebagai pertimbangan dan perbandingan dengan informasi keuangan yang ada dalam laporan periode sebelumnya.

3. Mudah Dipahami

Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan akuntansi publik harus mudah dipahami oleh semua pihak yang menginginkan dan membutuhkan informasi tersebut dari pihak dalam perusahaan dan pihak yang berasal dari luar perusahaan.

Akuntansi sektor publik menjadi prioritas dalam mewujudkan *Good Governance*. Capaian ini penting ini diwujudkan karena dana yang digunakan bersumber dari masyarakat dan dikelola untuk diserahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan. Maka karakteristik *Good Governance* yang dapat diwujudkan adalah :

1. *Transparency*

Karakteristik transparansi terbentuk karena adanya kebebasan dalam mengakses informasi

2. *Participation*

Karakteristik ini dibutuhkan karena adanya kebebasan dalam bersosialisasi, mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi secara membangun.

3. *Accountability*

Karakteristik ini dapat terwujud jika ada rasa tanggung jawab tinggi terhadap publik dari pemimpin terutama dalam organisasi sektor publik

4. *Consensus Orientation*

Karakteristik ini memiliki orientasi dan tujuan penuh terhadap publik

5. *Equity*

Melalui karakteristik ini akan mewujudkan kesamaan dalam hak dan keadilan serta kesejahteraan publik

6. *Rule of Law*

Melalui karakteristik ini akan mewujudkan persamaan hak dan keadilan dan kesejahteraan publik

Karakteristik ini memiliki tujuan untuk mewujudkan hukum secara lebih tegak dan tidak dipandang sebelah mata

7. *Responsiveness*

Karakteristik yang sigap dan cepat tanggap terhadap pelayanan publik yang diberikan

8. *Strategic Vision*

Karakteristik ini memiliki tujuan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan secara tegas

9. *Efficiency and Effectiveness*

Memiliki tujuan untuk mengelola potensi mulai dari pengumpulan hingga penggunaannya secara efisien dan efektif serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edited by S. Saat and Y. Sumiharti. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Erlina, Rambe, O. and Rasdianto (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2002) *Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Handayani, M. (2019) *Akuntansi Sektor Publik : Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban*. Edited by A. Pratomo. Banjarmasin Utara: POLIBAN PRESS.
- Hantono *et al.* (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Edited by S. Bahri. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA.
- Kawatu, F. S. (2019) *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Madjid, J. (2019) *Akuntansi Sektor Publik*. I, Yogyakarta. I. Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida. Available at: http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTA_NSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Terbaru. Edited by Mardiasmo. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ratmono, D. and Sholihin, M. (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S. and Pramesti, I. G. A. A. (2020) *Akuntansi Sektor Publik*. Pertama, CV. Noah Alethea. Pertama. Edited by N. W. Rustriarini. Badung Bali: CV. Noah Aletheia. Available at: <http://repository.unmas.ac.id/medias/journal/EBK-00261.pdf>.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Oleh Fithri Suciati, S.E., M.Ak.

2.1 Pengguna Laporan Keuangan

Sektor publik merupakan organisasi yang berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Organisasi sektor publik berada dalam lingkungan yang sangat kompleks. Laporan keuangan untuk organisasi ini merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas organisasi sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas tersebut menimbulkan implikasi bagi manajemen dalam memberikan informasi kepada publik. Informasi keuangan dapat dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan pada sektor publik dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

1. Pengguna laporan keuangan pemerintah terdiri dari masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah.
2. Pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba

2.2 Kebutuhan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi untuk semua kelompok pengguna, untuk itu dalam menyusun laporan keuangan terdapat ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Kebutuhan informasi laporan keuangan ini yakni untuk

membantu dalam perencanaan dan pengendalian manajemen tetapi informasi ini tidak hanya untuk informasi keuangan saja tetapi juga untuk informasi non keuangan.

2.3 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua:

1. Pemerintahan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan undang undang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat,
- b. Pemerintah daerah,
- c. Masing masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, serta satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat
- d. Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut undang-undang satuan organisasi dimaksud menyajikan laporan keuangan.

2. Non pemerintahan – organisasi nirlaba (Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional).

2.4 Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap undang-undang. Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai.

2.4.1 Peran Pelaporan Keuangan

Peran Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang relevan serta dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan mempunyai kewajiban dalam melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan terstruktur sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)
5. Evaluasi Kinerja

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja serta sebagai pertanggungjawaban. Adapun tujuan laporan keuangan sektor publik Secara umum, terdapat 6 fungsi, yaitu:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)
4. Kelangsungan organisasi (*viability*)
5. Hubungan masyarakat (*public relation*)
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Tujuan utama laporan keuangan untuk organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Untuk menyajikan informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5. Usaha jasa suatu organisasi

Sedangkan untuk pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi maupun politik seperti:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan dan belanja untuk membiayai pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.4.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok pemerintahan

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas nirlaba

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan
2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan
3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan
4. Catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran berisi pendapatan-LRA, Belanja, Transferan serta Surplus/defisit LRA, pembiayaan, SiLPA/SiKPA

- a. Pendapatan-LRA, merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
- b. Belanja, merupakan pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
- c. Transfer, merupakan penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelapor lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus/defisit-LRA, merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LTA dan belanja selama satu periode
- e. Pembiayaan, merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik untuk tahun anggaran yang bersangkutan maupun untuk berikutnya, yang dalam anggaran pemerintah terutama dalam menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran
- f. SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan APBN/APBD selama satu periode.

Berikut Format Laporan Realisasi Anggaran Untuk PPKD

Tabel 2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran Untuk PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KOTA XYZ

P P K D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

No	Uraian	Jumlah
1	<u>PENDAPATAN</u>	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-
3	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-
4		
5	PENDAPATAN TRANSFER	
6	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	
7	Dana Alokasi Umum	
8	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-
9		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	-
11	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	-
12	Jumlah Pendapatan Transfer	-
13		
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
15	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-
16	JUMLAH PENDAPATAN	-
17		
18	<u>BELANJA</u>	
19	BELANJA OPERASI	
20	Belanja Hibah	
21	Jumlah Belanja Operasi	-
22		
23	BELANJA TAK TERDUGA	

24	Jumlah Belanja Tak Terduga	-
25	Jumlah Belanja	-
26		
27	<u>TRANSFER</u>	
28	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-
29	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-
30		
31	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	
32	Bantuan Keuangan ke Desa	
33	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	-
34	Jumlah Transfer	-
35	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	-
36		
37	SURPLUS/DEFISIT	-
38		
39	<u>PEMBIAYAAN</u>	
40	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
41	Penggunaan SiLPA	
42	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	
43	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
44		
45	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
46	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
47	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
48		
49	PEMBIAYAAN NETTO	-
50		
51	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih berisi pos-pos sebagai berikut :

- Saldo anggaran lebih awal
- Penggunaan saldo anggaran lebih
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- Lain-lain
- Saldo anggaran lebih

Berikut format Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Tabel 2.2 Format Laporan perubahan saldo anggaran lebih

PEMERINTAH DAERAH KOTA XYZ
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XX

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	
2	Penggunal SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
3	Sub Total (1 + 2)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
5	Sub Total (3 + 4)	-
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-
7	Lain-lain	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	-

3. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- a. Aset, merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PSAPB BA 01 paragraf 8).

Asset diklasifikasikan menjadi asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan dan asset lainnya.

- b. Kewajiban, merupakan suatu beban masa depan dimana pembayarannya dilakukan dengan mengorbankan asset. Adapaun kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang
- c. Ekuitas, merupakan kekayaan bersih pemerintah merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. (PSAP BA01 Paragraf 84 dan 85)

Berikut contoh Format Neraca PPKD

Tabel 2.3 Format Neraca PPKD
PEMERINTAH DAERAH KOTA XYZ
P P K D
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

NO	URAIAN	JUMLAH
1	ASET	
2	ASET LANCAR	
3	Kas di Kas Daerah	
4	Piutang DAU	
5	RK SKPD - Bappenda	
6	RK SKPD - Dinas Kesehatan	
8	Jumlah Aset Lancar	-
9		
10	INVESTASI JANGKA PANJANG	
11	Investasi Non Permanen	-
13	Jumlah Investasi Non Permanen	-
14		
15	Investasi Permanen	
16	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
17	Jumlah Investasi Permanen	-
18	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-
19		
26	DANA CADANGAN	
27	Dana Cadangan	-
28	Jumlah Dana Cadangan	-
29		
30	ASET LAINNYA	

31	Jumlah Aset Lainnya	-
32		
33	JUMLAH ASET	-
34		
35	<u>KEWAJIBAN</u>	
36	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
37	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-
38		
39	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
40	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	
41	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-
42		
43	JUMLAH KEWAJIBAN	-
44		
45	<u>EKUITAS</u>	
46	EKUITAS	
47	Ekuitas	
48	Ekuitas SAL	
49	JUMLAH EKUITAS	-
50		
51	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	-

4. Laporan Operasional

Laporan operasional berisi informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun struktur laporan operasional mencakup pos pos sebagai berikut;

- a. Pendapatan-LO

- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari Operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/Defisit – LO

Berikut contoh Format LO PPKD:

Tabel 2.4 Format LO PPKD
PEMERINTAH DAERAH KOTA XYZ
P P K D
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20XX

No	Uraian	Jumlah
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>	
2	<u>PENDAPATAN</u>	
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-
4	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-
5		
6	PENDAPATAN TRANSFER	
7	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	
8	Dana Alokasi Umum	
9	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-
10		
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	-
12	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	-
13	Jumlah Pendapatan Transfer	-

14		
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
16	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-
17	JUMLAH PENDAPATAN	-
18		
19	<u>BEBAN</u>	
20	BEBAN OPERASI	
21	Beban Hibah	
22	Jumlah Beban Operasi	-
23		
24	BEBAN TRANSFER	
25	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	
26	Jumlah Beban Transfer	-
27	JUMLAH BEBAN	-
28		
29	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-
30		
31	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL</u>	
32	SURPLUS NON OPERASIONAL	-
33	Jumlah Surplus Non Operasional	-
34		
35	DEFISIT NON OPERASIONAL	-
36	Jumlah Defisit Non Operasional	-
37		
38	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-
39	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-
40		
41	<u>POS-POS LUAR BIASA</u>	

42	PENDAPATAN LUAR BIASA	
43	Pendapatan Luar Biasa	-
44	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-
45		
46	DEFISIT NON OPERASIONAL	
47	Beban Luar Biasa	-
48	Jumlah Beban Luar Biasa	-
49		
50	POS LUAR BIASA	-
51		
53	SURPLUS/DEFISIT LO	-

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ini adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

- Aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
- Aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asset tetap serta investasi lainnya yang tidak masuk dalam setara kas
- Aktivitas pendanaan merupakan penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

- d. Aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Berikut contoh Format laporan arus kas :

Tabel 2.5 Format laporan arus kas
PEMERINTAH DAERAH KOTA XYZ
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20XX

No	Uraian	Jumlah
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	
2	Arus Masuk Kas	
3	Penerimaan Pajak Daerah	
4	Penerimaan Retribusi Daerah	
5	Penerimaan Dana Alokasi Umum	
6	Jumlah Arus Masuk Kas	-
7	Arus Keluar Kas	
8	Pembayaran Pegawai	
9	Pembayaran Barang (Jasa)	
10	Pembayaran Hibah	
11	Pembayaran Bantuan Keuangan Desa	
12	Jumlah Arus Keluar Kas	-
13	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-
14	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
15	Arus Masuk Kas	
16	Jumlah Arus Masuk Kas	-
17	Arus Keluar Kas	

18	Perolehan Peralatan dan Mesin	
19	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	
20	Jumlah Arus Keluar Kas	-
21	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-
22	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
23	Arus Masuk Kas	
24	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
25	Jumlah Arus Masuk Kas	-
26	Arus Keluar Kas	
27	Jumlah Arus Keluar Kas	-
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
29	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
30	Arus Masuk Kas	
31	Jumlah Arus Masuk Kas	-
32	Arus Keluar Kas	
33	Jumlah Arus Keluar Kas	-
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-
35	Kenaikan/Penurunan Kas	-
36	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	
37	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	-
38	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-
39	Saldo Akhir Kas	-

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan pos pos ekuitas awal, surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan, koreksi langsung yang menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir

Berikut Contoh Laporan Perubahan ekuitas PPKD

Tabel 2.6 Laporan Perubahan ekuitas PPKD
PEMERINTAH DAERAH KOTA XYZ
P P K D
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

No	Uraian	Jumlah
1	EKUITAS AWAL	
2	EKUITAS	
3	<i>(+) Surplus/Defisit – LO</i>	
4	<i>(-) Perubahan SAL</i>	
5	EKUITAS SAL	
6	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	
8	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	
9	LAIN-LAIN	
10	EKUITAS AKHIR	-

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif yang tertera dalam LRA, Laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas serta memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan. Adapun CALK meliputi penyajian sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi mengenai entitas pelapor dan entitas akuntansi
- b. Menyediakan informasi mengenai kebijakan fiskal dan ekonomi makro

- c. Menyediakan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing masing pos yang disajikan dalam laporan keuangan
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R N. and Young, D. W. (1999) *Managemen Control in Nonprofit Organization*, 6Th Ed., Illinois: Irwin
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Firdayanti, E. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Bandung)*. Diss. STIE Ekuitas, 2022.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

BAB III

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Oleh Rasty Yulia, S.E., M.M.

3.1 Pengertian Anggaran

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Jika demikian, apakah sebenarnya anggaran itu? Bagaimana seluk-beluknya?

Freeman dan Shoulders mendefinisikan anggaran sebagai berikut. *Budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budget is a dollar-and-cents plan of operation for a specific period of time.* Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (*unlimmited demands*). Sementara itu, anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.

Pengertian lain diberikan oleh Lee, Jr dan Johnson menyatakan bahwa *a budget is a document or a collection of document that refers to the financial condition of organizational including information on revenues, expenditures, and accomplishments.* Anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas serta tujuan organisasi.

Sementara itu, Mardiasmo (2021) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai

selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Pengertian-pengertian diatas mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut sering kali terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut:

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik.

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi sektor publik.
4. Anggaran sebagai alat politik
Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang, tetapi masih mungkin dicapai”. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, dan jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

3.2 Jenis-Jenis Anggaran

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut.

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (*Operasional budgets and capital budgets*)

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan, yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaan.

2. Anggaran berdasarkan pengesahan (*tentative enacted budgets*)

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif dan anggaran pengesahan. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya anggaran pengesahan adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

3.3 Siklus Anggaran

Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahapan.

1. Persiapan

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di-review dan diadakan dengan pendapat ke semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

2. Persetujuan Lembaga Legislatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

3. Administrasi

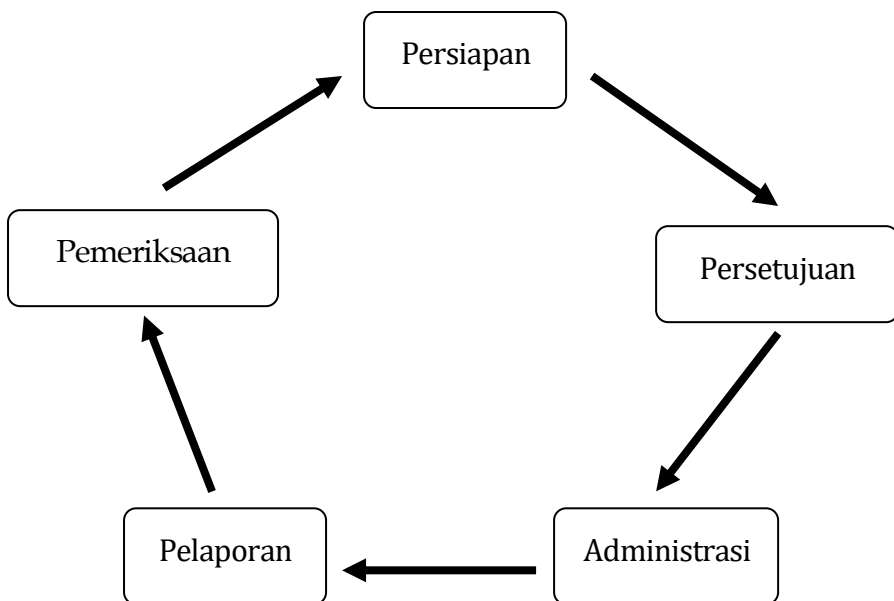
Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

5. Pemeriksaan

Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksaan independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.



Gambar 3.1
Siklus Anggaran

3.4 Sistematika Anggaran

Dalam suatu anggaran sektor publik, sistematika dan klasifikasi mempunyai fungsi penting. Selain sebagai alat pengelompokan akun, sistematika anggaran juga mengarahkan proses analisis sehingga fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pedoman untuk menyusun klasifikasi anggaran dapat ditemui dalam *General Financial Statistics* (GFS).

General Financial Statistics (GFS) merupakan pedoman Internasional mengenai metodologi statistik yang telah dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Manual GFS didesain bagi para penyusun statistik keuangan pemerintah, analisis fiskal, dan pengguna data fiskal lainnya.

Manual juga akan sangat berguna bagi pengguna statistik makro ekonomi dalam memahami hubungan di antara berbagai kumpulan statistik, dan bermanfaat bagi sebagian penyusun statistik yang tergantung pada statistik keuangan pemerintah sebagai input dalam pekerjaan mereka. Namun, manual ini difokuskan pada pendefinisian, pengklasifikasian, dan arahan dalam menyajikan statistik keuangan pemerintah karena manual ini tidak menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menyusun statistik.

Bagian berikut menjelaskan klasifikasi menurut GFS yang kemudian menjadi dasar sistematika anggaran di banyak negara.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari adanya transaksi. Bagi pemerintah, secara umum terdapat sumber utama pendapatan yaitu pajak dan kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah, *property income* yang muncul dari kepemilikan aset, penjualan barang dan jasa, serta sumbangan sukarela yang diterima dari unit lain. Pendapatan harus dicatat pada basis *accrual*.

a. Pajak

Bagi mayoritas unit pemerintah, pajak memiliki nilai yang dominan dalam pendapatan karena pajak merupakan transfer wajib dalam pemerintahan. Salah satu bentuk yang lain adalah denda.

b. *Social Contribution*

Kontribusi yang diberikan dilakukan karena merupakan kewajiban ataupun dilakukan secara sukarela. *Social Contribution* diklasifikasikan sebagai *social security contribution* atau *other social contribution* tergantung dari tipe skema yang diterima mereka.

c. Hibah

Hibah adalah penerimaan yang diperoleh dari unit pemerintahan lain atau organisasi internasional di luar penerimaan wajib. Hibah dapat diklasifikasikan sebagai *capital* atau *current*, dan dapat diterima dalam bentuk kas atau barang. Hibah dari pemerintahan domestik akan dieliminasi ketika konsolidasi sehingga yang muncul hanya dari organisasi internasional.

d. Pendapatan lain-lain

1) *Property income*

Pemerintah akan menerima *property income* ketika aset keuangan dan/atau aset lainnya sudah dialokasikan pada unit-unit lain terkait. Beberapa komponen dalam kategori ini adalah bunga, dividen dan sewa.

2) *Sales of goods and services*

3) Denda, penalti dan *forfeits*

Denda dan penalti merupakan transfer wajib yang dipaksakan oleh hukum pengadilan atau secara hukum untuk suatu pelanggaran hukum atau aturan administratif. *Forfeits* adalah denda terhadap transaksi yang tertunda karena masalah birokrasi atau administrasi.

Denda dan penalti dicatat ketika unit pemerintah memiliki klaim yang sah terhadap dana tersebut, di mana mungkin ketika pengadilan telah memberikan keputusan atau ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau pelanggaran lain yang mengakibatkan denda atau penalti.

4) Transfer sukarela selain hibah

Yang termasuk dalam kategori ini adalah hadiah atau donasi sukarela dari individu, atau institusi non-profit swasta, yayasan non-pemerintahan, perusahaan dan sumber lain selain pemerintah dan organisasi internasional.

5) *Miscellaneous and unidentified revenue*

Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua pendapatan yang tidak sesuai dengan semua kategori tersebut di atas. Misalnya, barang yang tidak diklasifikasikan sebagai aset, penjualan barang sisa.

2. Beban

Beban adalah penurunan kekayaan bersih sebagai akibat terjadinya transaksi. Berikut dua tipe transaksi yang digolongkan sebagai beban.

a. *Refunds*

Berarti pemerintah menutup kelebihan pembayaran dan ketika terjadi kesaahan (*error*).

b. Biaya yang muncul dalam produksi atas barang dan jasa yang dicatat sebagai beban walaupun harga barang dan jasa yang terjual pada dasarnya melebihi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan kekayaan bersih.

Transaksi akuisisi non-keuangan yang dibeli atau transaksi akibat pertukaran dan tidak akan memengaruhi kekayaan tidak digolongkan dalam beban.

Beban dicatat sesuai dengan basis akrual. Secara konsep, pembelian barang yang tidak segera digunakan akan menambah persediaan dan bukan menambah biaya. Ketika barang dikonsumsi/digunakan dalam produksi, transaksi tersebut harus

dicatat untuk mengurangi persediaan dan menambah beban tergantung penggunaan barang tersebut.

3.5 Pendekatan Penyusunan Anggaran

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam proses penyusunan anggaran di suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan ini merupakan hasil perkembangan yang menandakan adanya penyempurnaan atas kelemahan pada pendekatan yang berkembang sebelumnya. Pada dasarnya, setiap organisasi dapat memilih pendekatan penyusunan anggaran yang dianggap paling sesuai dengan karakter organisasinya dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pendekatan.

3.5.1 Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini menggunakan paradigma sederhana yang berorientasi pada pengendalian setiap jenis biaya. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa setiap jenis biaya akan dinaikkan jumlahnya pada tingkat kenaikan yang relatif sama tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya.

Cara membuat anggaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah mengidentifikasi seluruh jenis belanja yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Jenis belanja yang memiliki kesamaan atau kemiripan karakteristik dapat dikelompokkan dalam jenis kelompok tertentu. Jadi ciri-ciri pendekatan tradisional adalah disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi sehingga bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja suatu organisasi, bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi, umumnya bersifat inkremental.

Tabel 3.1
Contoh Anggaran Tradisional
Anggaran Kantor Kecamatan Kemiling

Belanja Gaji	15.000.000
Belanja Peralatan	18.500.000
Belanja Makanan	7.500.000
Belanja Perjalanan	5.600.000
Belanja Lain-lain	1.400.000
Jumlah	48.000.000

Pendekatan ini bertujuan mengendalikan pengeluaran dengan lebih baik. Jika kita membaca jenis anggaran seperti ini, maka kita akan memiliki bayangan yang jelas tentang pos-pos yang menjadi pengeluaran dan kontrol yang baik atas pengeluaran tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik apabila pos komponen dalam anggaran dinyatakan pada tingkat yang paling terperinci.

Contoh :

Anggaran untuk Kantor Kecamatan Kemiling mungkin dinyatakan dalam bentuk Tabel 3.2 dimana belanja gaji terperinci menjadi :

1. 1 orang Kepala Kecamatan @ Rp. 3.000.000
2. 2 orang staf keuangan @ Rp. 2.000.000
3. 8 orang staf administrasi @ Rp. 1.000.000

Tabel 3.2
Bentuk perincian anggaran tradisional

	Per Orang	Jumlah	Total
Belanja Gaji			
1 kepala kecamatan	3.000.000	3.000.000	
2 staf keuangan	2.000.000	4.000.000	
8 staf administrasi	1.000.000	8.000.000	15.000.000

Belanja Persediaan			
Persediaan kantor		4.000.000	
Peralatan kebersihan		2.000.000	
Bahan bakar		9.500.000	
Seragam		2.000.000	
Lain-lain		1.000.000	18.500.000
Belanja Makanan			7.500.000
Belanja Perjalanan			5.600.000
Belanja Lain-lain			1.400.000
Total Anggaran			48.000.000

Tingkat pengendalian atas anggaran akan lebih rendah bila anggaran dinyatakan dalam jenis objek pengeluaran secara global (belanja gaji Rp. 15.000.000). Pada kasus ini eksekutif dapat memiliki kebebasan dalam realisasi anggaran selama jumlah dalam anggaran tidak terlampaui. Jika jumlahnya semakin mendetail, maka manajemen semakin tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi anggaran tersebut.

Penyusunan anggaran dengan pendekatan tradisional memiliki beberapa keuntungan, yaitu bentuknya sederhana dan mudah dipersiapkan. Namun, pendekatan tradisional ini juga memiliki beberapa kelemahan yang mengundang kritik, antara lain sebagai berikut:

1. Terpaku pada sumber daya yang telah ada sebelumnya
2. Akuntabilitas pada suatu konsep yang hanya mengacu pada nilai uang dan bukan pada hasil atau manfaat suatu program
3. Tidak mampu memberikan informasi yang cukup untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi
4. Kebanyakan pos-pos anggaran tidak diharuskan memiliki dasar atau alasan yang jelas

5. Apabila suatu program telah ditetapkan dalam anggaran, maka program tersebut akan terus dicantumkan dalam anggaran periode-periode berikutnya untuk jangka waktu yang tidak terbatas
6. Menyediakan data biaya historis yang terpisah-pisah sehingga tidak bermanfaat dalam pelaksanaan dan evaluasi program
7. Laporan anggaran yang dihasilkan tidak banyak memuat data keuangan yang berguna dalam perencanaan, penyusunan program, dan evaluasi kegiatan organisasi
8. Perencanaan input disusun pada tingkatan yang rendah dan dinaikkan sedikit demi sedikit
9. Tujuan dari sasaran organisasi disusun dengan dasar jumlah uang yang dialokasikan pada berbagai kegiatan
10. Tidak menyediakan informasi yang memungkinkan pengalokasian sumber daya secara bijaksana
11. Mendorong pengambilan keputusan yang salah
12. Gagal menampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan atau pengelolaan organisasi
13. Mendorong pengeluaran daripada penghematan. Unit-unit organisasi terdorong untuk membelanjakan seluruh anggarannya yang dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan

3.5.2 Pendekatan Kinerja

Pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerja dibanding sekedar penghematan biaya semata.

Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat berfokus pada pos belanja beralih pada kinerja terukur dari program kerja.

Karakteristik utama dari pendekatan ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas
2. Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan.
3. Pada tingkat yang lebih maju, pendekatan ini dicirikan dengan diterapkannya unit *costing* untuk setiap aktivitas. Dengan demikian, total anggaran untuk suatu organisasi adalah jumlah dari perkalian dari biaya standar per unit dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan pada periode mendatang.

Tabel 3.3
Contoh Anggaran Kinerja
Polres Mangga Dua

	Anggaran	Realisasi	Indikator Kinerja
1. Pengamanan Lintas			Tingkat kecelakaan lalu lintas dan kemacetan menurun 50%
Belanja gaji	6.000.000	7.000.000	
Belanja peralatan	7.500.000	7.000.000	
Belanja makanan	1.500.000	1.500.000	
Belanja perjalanan	4.000.000	3.900.000	
Jumlah	19.000.000	19.400.000	
2. Dalmas			Jumlah unjuk rasa damai yang berlangsung tertib dan meningkat 50%
Belanja gaji	7.000.000	6.000.000	
Belanja peralatan	9.000.000	9.000.000	

Belanja makanan	1.500.000	2.000.000	
Belanja perjalanan	1.600.000	1.500.000	
Belanja lain-lain	400.000	200.000	
Jumlah	19.500.000	18.700.000	
3. Diklat			Pengembangan kemampuan personel yang berkelanjutan
Belanja gaji	2.000.000	1.000.000	
Belanja peralatan	2.000.000	2.000.000	
Belanja makanan	4.500.000	5.000.000	
Belanja lain-lain	1.000.000	1.100.000	
Jumlah	9.500.000	9.100.000	
Total	48.000.000	47.200.000	

Dengan kondisi anggaran dan realisasinya di atas, bagaimana kinerja Polres Mangga Dua ? secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa total realisasi lebih rendah dari total anggaran. Jika diperinci lagi, kita dapat melihat kinerja tiap program yang dijalankan Polres Mangga Dua. Pengamanan Lantas misalnya, realisasi belanja lebih besar Rp. 400 ribu dari yang dianggarkan. Namun hal ini tidak berarti kinerja program itu buruk. Dalam melakukan penilaian kinerja, kita juga melihat tolak ukurnya. Misalnya, tolak ukur Pengamanan Lantas adalah berkurangnya angka kecelakaan dan tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Jika realisasi belanjanya yaang lebih besar dari anggaran, tetapi diimbangi dengan tercapainya tolak ukur, maka dapat dikatakan kinerja dalam hal ini Pengamanan Lantas cukup baik.

Penggunaan anggaran kinerja memberikan beberapa keuntungan berikut:

1. Mengalihkan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian manajerial
2. Mendorong perencanaan yang lebih baik

3. Manajemen memiliki alat pengendalian yang lebih terhadap bawahannya karena tidak hanya melihat banyak yang dibelanjakan oleh bawahannya, tetapi juga menilai kinerja aktivitas menggunakan standar satuan mata uang atau unit aktivitas
4. Anggaran kinerja menekankan pada aktivitas yang memakai anggaran daripada besarnya jumlah anggaran yang terpakai
5. Dianggap lebih sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik yang tidak mengejar profit dan lebih berorientasi pada kualitas pelayanan.

Namun, anggaran kinerja juga memiliki beberapa kelemahan berikut ini:

1. Tidak banyak personel bagian anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya
2. Terkadang terdapat kondisi yang sulit, bahkan tidak memungkinkan pengukuran kinerja mengingat banyak jasa dan aktivitas organisasi sektor publik yang tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah
3. Sering terjadi aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa pertimbangan yang memadai yang diberikan kepada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri. Dengan kata lain, pendekatan ini kurang menghubungkan aktivitas yang dijalankannya dengan visi dan misi yang diusung organisasi.

3.5.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan komponen terpenting dalam penganggaran berbasis kinerja. Indikator ini berperan penting dalam menilai cara sebuah organisasi menjalankan program-

program yang telah dianggarkan sebelumnya. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, kebijakan, dan lain-lain yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non-fisik, sedangkan indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, sedangkan indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Berikut beberapa contoh sederhana mengenai indikator kinerja:

1. Kegiatan : penyelenggaraan kelompok belajar membaca dan menulis
 - a. *Input* : ruangan, pengajar, peserta, perlengkapan belajar
 - b. *Output* : penyelenggaraan 5 kelompok kerja
 - c. *Outcome* : menurunnya tingkat buta huruf sampai level 0%
2. Kegiatan : pembangunan jembatan
 - a. *Input* : material, tenaga kerja
 - b. *Output* : terbangunnya jembatan sepanjang 200 meter
 - c. *Outcome* : jumlah perdagangan meningkat 2 kali lipat antara 2 wilayah yang terhubung oleh jembatan

Indikator kinerja yang baik harus mencerminkan beberapa kriteria tertentu. Salah satu kriteria adalah *CREAM*, dimana *CREAM* adalah singkatan dari *clear, relevant, economic, adequate, monitorable*.

1. *Clear* berarti indikator kinerja harus jelas dan tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi
2. *Relevant* berarti indikator kinerja harus memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan sasaran atau tujuan yang ada
3. *Economic* berarti data-data mengenai indikator yang dibutuhkan harus berada pada harga yang wajar
4. *Adequate* atau cukup berarti indikator yang ditetapkan harus dapat menilai kinerja. Apakah salah satu indikator atau dikombinasikan dengan indikator-indikator lain agar dapat dijadikan sebagai basis untuk menilai kinerja yang layak.
5. *Monitorable* berarti indikator harus selalu dapat disempurnakan jika penyempurnaan memang dibutuhkan. Dengan demikian, masukan-masukan dalam rangka peningkatan kualitas indikator sangat dibutuhkan.

Indikator yang baik juga dapat dinilai dari kriteria SMART, yaitu *specific, measurable, achievable, relevance* dan *time bound*.

1. *Specific* berarti jelas dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. *Measurable* berarti indikator yang dibuat dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama
3. *Achievable* berarti indikator tersebut dapat dicapai secara rasional tanpa mengurangi tingkat tantangan yang seharusnya

4. *Relevance* berarti indikator kinerja harus terkait aspek yang relevan
5. *Time bound* berarti indikator yang ditetapkan memungkinkan untuk diukur dalam perspektif waktu tertentu yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. and Kusufi, M. S. (2020) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono, et al. (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mardiasmo. (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Nasution, D. A. D. (2019) *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

BAB IV

ANGGARAN PEMERINTAH APBN DAN APBD

Oleh Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.

4.1 Pendahuluan

Setiap organisasi baik besar maupun kecil, di dalam aktivitas pengelolaan keuangan membutuhkan anggaran. Anggaran yang dibuat menunjukkan pendapatan atau perolehan dan penggunaannya dalam aktivitas organisasi. Istilah anggaran berasal dari Bahasa Perancis yaitu *bougette*, yang artinya tas kecil (Yuwono. et al., 2005). Pada umumnya, anggaran organisasi dibuat untuk satu periode. Menyusun anggaran dari organisasi merupakan kegiatan yang kontinyu. Ketika anggaran dijalankan, penyusun anggaran mulai melakukan persiapan penyusunan anggaran berikutnya.

Bagi organisasi yang besar seperti pemerintah Indonesia, anggaran merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan UUD 1945 Amandemen ke 4 pasal 23 yang mengatur tentang APBN. Implementasi dari anggaran pemerintah pusat dengan disusunnya UU APBN setiap tahunnya.

Disamping APBN yang dibuat oleh pemerintah pusat setiap tahun, pemerintah daerah juga melakukan penyusunan APBD. Payung hukum dalam menyusun APBD adalah UU No. 32 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2003, PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

4.2 Anggaran Pemerintah APBN

Menurut (Freeman and Shoulders, 2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan definisi tersebut, anggaran memuat peran yang penting, bahwa anggaran mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Demikian juga APBN, proses penyusunannya mendapat sorotan dari pemerhati masalah ekonomi. Penyampaian orasi kepala negara pada bulan Agustus mengenai nota keuangan dan R-APBN menjadi tolok ukur perekonomian Indonesia.

Anggaran dapat dikatakan sebagai rencana kerja dalam satu periode yang dinyatakan dengan ukuran finansial. (Nordiawan et al., 2007). Proses perancangan anggaran pemerintah di Indonesia cukup rumit, karena dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari berbagai macam partai politik sehingga mengandung muatan politis. Anggaran negara atau disebut APBN merupakan naskah yang berisi rencana pendapatan dan belanja secara terperinci yang berisi program dan urusan yang ada di Kementerian maupun Lembaga Negara. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, R-APBN akan disahkan menjadi Undang-Undang APBN.

Regulasi pengelolaan keuangan negara mengatur bahwa penerimaan dan pengeluaran tercakup di APBN. Pendapatan dan belanja yang menggunakan rekening pemerintah yang lain, dilakukan konsolidasi ke dalam Rekening Kas Umum Negara yaitu Bank Indonesia. Beberapa pengecualian pemerintah membuka rekening khusus selain di Rekening Kas Umum Negara (Nordiawan et al., 2007), yaitu:

1. Pengelolaan pinjaman, dimana negara pemberi pinjaman memberikan syarat tertentu.
2. Pengelolaan dana cadangan,

3. Mengelola dana tujuan tertentu yang dipisahkan dari rekening Bendahara Umum Negara.

4.2.1 Siklus Anggaran Pemerintah APBN

R-APBN disusun berdasarkan pandangan dan tujuan kepala negara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hasil pembahasan tersebut berupa Rencana Kerja Pemerintah. Kementerian Keuangan dan Bappenas melakukan penyusunan pagu anggaran dan rencana kerja Kementerian/Lembaga yang berisi tentang program dan prioritas yang nantinya akan dibahas bersama DPR. Setelah rencana kerja yang berisi program dan prioritas mendapat persetujuan dari DPR akan menjadi pagu indikatif, yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan R-APBN.

1. Perencanaan dan Penganggaran (Januari-Juli)

Perencanaan dan Penganggaran dimulai saat Kementerian Keuangan dan Bappenas menyampaikan kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi secara global. Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan beserta Bappenas, dilakukan penyusunan R-APBN dan Nota Keuangan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pembahasan R-APBN (Agustus-Oktober)

DPR membahas R-APBN dan nota keuangan yang sudah dibuat pemerintah. Dalam pembahasan ini, DPR dapat menyetujui atau menolak R-APBN yang diajukan oleh pemerintah. Jika DPR menolak, maka dipakai APBN tahun terdahulu.

3. Penetapan R-APBN (Akhir Oktober)

Setelah mendapat persetujuan wakil DPR, R-APBN menjadi UU-APBN

4. Pelaksanaan APBN (Januari)

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan APBN terdiri dari Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (SP DPA), Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (Nordiawan et al., 2007).

5. Pelaporan dan Pencatatan APBN

Penatausahaan APBN merupakan tahap akhir dalam siklus APBN. Dalam tahap ini, semua dokumen-dokumen yang menjadi bahan untuk pertanggungjawaban dari masing-masing Kementerian/Lembaga Negara dilakukan pencatatan untuk disusun laporan keuangan tiap Kementerian/Lembaga Negara. Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Penyusunan konsolidasi dilakukan kementerian negara sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kemenkue, n.d.).

4.2.2 Konstruksi APBN

Konstruksi APBN meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Berikut ini adalah konstruksi APBN (Nordiawan et al., 2007), diantaranya yaitu:

1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - a. Penerimaan Dalam Negeri
 - 1) Penerimaan Perpajakan
 - a) Pajak Dalam Negeri
 - Pajak Penghasilan minyak dan gas, Pajak Non minyak dan gas
 - PPN
 - Cukai
 - Pajak Lainnya
 - b) Pajak Perdagangan Internasional
 - Bea Masuk

- Pajak/pungutan ekspor
- 2) Penerimaan Bukan pajak
 - a) Penerimaan sumber daya alam
 - Minyak bumi
 - Gas alam
 - Kehutanan
 - Perikanan
 - b) Bagian Laba BUMN
 - c) PNBPN Lainnya
- b. Hibah
- 2. Belanja Negara
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat
 - 1) Belanja pegawai
 - 2) Belanja barang
 - 3) Belanja modal
 - 4) Bantuan sosial
 - b. Anggaran belanja ke daerah
 - 1) Dana perimbangan
 - Dana bagi hasil
 - Dana alokasi umum
 - Dana alokasi khusus
 - 2) Dana otonomi khusus dan penyesuaian
- 3. Pembiayaan
 - a. Dalam negeri
 - 1) Perbankan dalam negeri
 - 2) Non perbankan dalam negeri
 - Privatisasi
 - Penjualan aset program restrukturisasi perbankan obligasi negara
 - 3) Penerbitan obligasi pemerintah
 - 4) Pembayaran cicilan pokok hutang/obligasi dalam negeri

- b. Luar negeri
 - 1) Pinjaman proyek
 - 2) Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri
 - 3) Pinjaman program dan penundaan cicilan hutang

4.3 Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran pemerintah daerah menggambarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode berjalan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Anggaran pemerintah daerah adalah instrumen terciptanya disiplin untuk menjamin dalam mengelola keuangan daerah yang ada hubungannya dengan kebijakan atas pendapatan dan belanja yang sudah ditetapkan oleh suatu daerah. Proses penyusunan anggaran daerah harus mengacu pada regulasi yang berlaku.

Selisih antara penerimaan dengan pengeluaran bisa terjadi surplus atau defisit. Apabila penerimaan lebih besar dari belanja terdapat surplus, akan tetapi jika pendapatan tidak bisa menutup belanja terjadi defisit. Jika terjadi defisit, dapat didanai dari SiLPA, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dari penerimaan kembali pemberian pinjaman. Apabila Surplus dari anggaran daerah dapat digunakan untuk transfer ke rekening dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, struktur anggaran daerah akan nampak sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur APBD

PENDAPATAN ASLI DAERAH - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Lain-lain PAD yang sah
DANA PERIMBANGAN - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Bantuan Dana - Hibah - Dana Darurat - Dana Penyesuaian dan Dana Otsus - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya
BELANJA DAERAH
- BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Terduga
- BELANJA LANGSUNG - Program.... - Kegiatan....
- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN - Silpa Anggaran Tahun Sebelumnya - Pencairan Dana Cadangan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Penerimaan Pinjaman Daerah - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - Penerimaan Piutang Daerah

PENGELUARAN
- Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Pembayaran Pokok Hutang - Pemberian Pinjaman

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

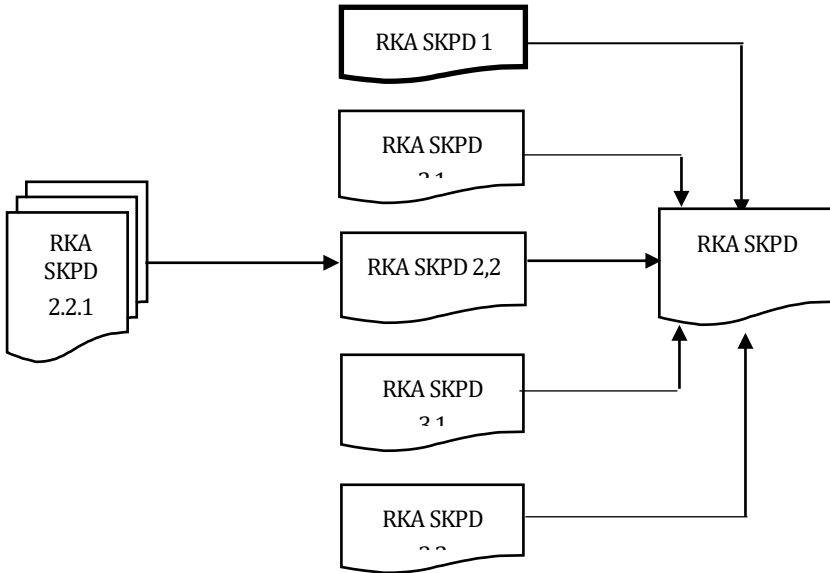
4.3.1 Proses Penyusunan RAPBD

Penyusunan R-APBD dimulai saat pemerintah daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada wakil rakyat. Penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Penyusunan RKPD berdasarkan RPJMD. Setelah ada nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPR mengenai KUA beserta PPAS, Kepala Daerah mengeluarkan panduan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

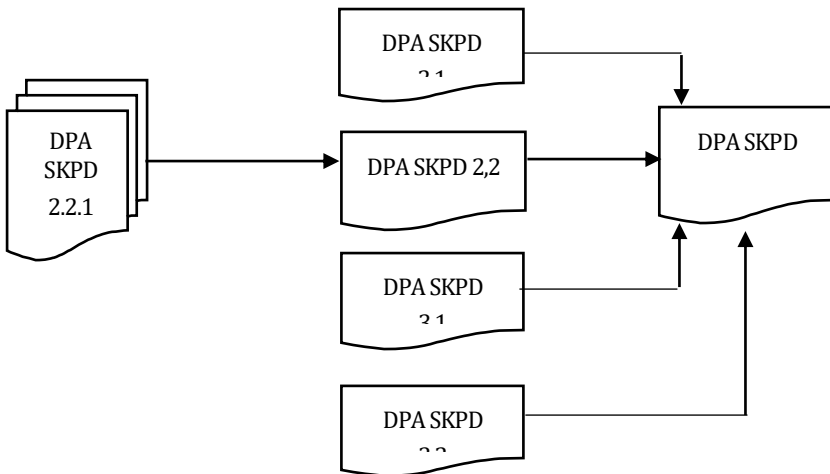
Berdasarkan RKA SKPD, Tim Anggaran Pemerintah menyusun RAPBD beserta pengajuan Raperda APBD ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas. Setelah disosialisasikan dan dilakukan evaluasi atas Raperda APBD, maka Raperda ditetapkan oleh DPRD menjadi Perda APBD.

4.3.2 Pelaksanaan APBD

Tahap pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan menggunakan sistem akuntansi untuk menghasilkan pencatatan sebagai pelaksanaan APBD. Pada tahapan pelaksanaan ini, dimulai dari SKPD membuat DPA-SKPD dan menyerahkan kepada PPKD yang akan disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan dari Sekda



Gambar 4.1 Alur Pengerjaan Dokumen Penganggaran
 Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2016



Gambar 4.2 Alur Pengerjaan Dokumen Penganggaran
 Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2016

4.3.3 Pengendalian/Pengawasan

Mekanisme pengendalian/pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD, pada hakekatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah (pemerintah daerah) kepada masyarakat. Prosedur pertanggungjawaban APBD ke DPRD terdiri atas aspek (Yuwono, et al., 2005):

a. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi menerima dokumen pelaksanaan APBD dari fungsi perbendaharaan dan unit kerja lainnya. Dokumen pelaksanaan APBD merupakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk menyusun laporan keuangan.

b. PPKD

Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada kepala daerah

c. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah akan memeriksa kelengkapan data dan dokumen dan melakukan otorisasi untuk selanjutnya disampaikan ke kepala daerah.

d. Kepada Daerah

Melaporkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh BPK kepada DPRD.

e. BPK

Memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah.

f. DPRD

Menyetujui atau menolak Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Freeman, R. J., and Shoulders, C. D. (2003). *Governmental and Nonprofit Accounting-Theory and practice* (7th Edition). Pearson Education, Inc.
- Kemenkue. (n.d.). *Siklus APBN*. <https://Djpb.Kemenkue.Go.Id>.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., and Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan* (Widyaningrum. Resthi, Ed.). Salemba Empat.
- Yuwono, S. Indrajaya, T. A. and Hariyandi. (2005). *Penganggaran Sektor Publik* (Wahyudi. Setiyono, Setyorini. Yuyut, & Basuki. Indro, Ed.; Pertama). Bayumedia.

BAB V

AKUNTANSI MANAJEMEN

SEKTOR PUBLIK

Oleh Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si, Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF., CAPM., CLAC

5.1 Pendahuluan

Akuntansi manajemen adalah nilai tambah proses perbaikan terus-menerus yang terdiri dari perencanaan, perancangan, dan pengoperasian informasi keuangan dan non-keuangan yang menjadi landasan tindakan manajemen, motivasi perilaku, dan mendukung penciptaan nilai-nilai budaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Akuntansi manajemen merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, penghimpunan, penganalisis, penyusunan, penafsiran, dan pengomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen. Proses pengidentifikasian tersebut guna untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan perusahaan di dalam sebuah organisasi, serta untuk memastikan penggunaan akuntabilitas sumber daya yang tepat. Dapat disimpulkan, bahwa akuntansi manajemen adalah proses untuk menganalisis informasi keuangan untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang mengarah pada tujuan perusahaan ataupun organisasi.

Semua negara di Eropa telah menerapkan akuntansi manajemen publik, terkait dengan modernisasi sistem publik di seluruh dunia dan perubahan penting dalam manajemen publik muncul (Hertati and Syafaruddin, 2018; Agbejule, 2005). Reformasi dalam akuntansi sektor publik telah diimplementasikan selama

beberapa dekade terakhir karena perluasan Eropa Serikat dan proses globalisasi. Peran manajemen dalam masyarakat akuntansi sektor adalah untuk fokus pada penegakan fiskal dan keuangan disiplin, dalam memberikan informasi yang akurat kepada manajer publik dan membuat tersedia pelaporan keuangan yang tepat waktu, andal, dan transparan untuk semua publik institusi. Manajerial mengalami pertumbuhan yang tidak dapat dihindari akibat cepatnya teknologi modernisasi memasuki semua elemen (Peterescu, 2016) instrumen manajemen publik baru memasuki area modern untuk meningkatkan aktivitas dalam administrasi publik (Bhimani, 2010).

Kualitas informasi akuntansi dan keuangan publik (Bodnar and Hopwood, 2010), merupakan tuntutan publik yang mendesak pada semua sektor organisasi yang akuntabel di daerah dan administrasi pusat (Hurt, 2008). Alasan mengapa peran manajemen dalam akuntansi sektor publik menjadi lebih penting dari sebelumnya, berkontribusi pada pengurangan korupsi dan birokrasi di sektor publik (Hertati and Sumantri, 2016). Laporan keuangan harus tepat waktu dan akurat agar dipusatkan di tingkat nasional dan Eropa. Manajemen baru dalam akuntansi sektor publik berhasil diterapkan disebutkan di sebagian besar unit administrasi publik, sangat berguna dan atraktif dalam mengembangkan strategi dan prosedur secara keseluruhan departemen. Menerapkan pengendalian internal adalah salah satu yang paling penting fungsi manajemen baru di sektor publik, diikuti oleh modernisasi sistem informasi dan adopsi elektronik platform untuk memastikan transmisi informasi keuangan yang lebih baik ke pegawai negeri, manajer, dan warga negara. Selain itu, orang Rumania pemerintah mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengembangkan lingkungan bisnis, yang berdampak positif bagi pemerintah daerah (Hall, 2011).

Akuntansi sektor publik diselenggarakan di dalam Kementerian Publik Keuangan dan departemen bawahannya dan termasuk operasi yang terkait dengan pelaksanaan kas APBN, APBD, dana sosial negara anggaran asuransi; pengaturan dan pemanfaatan sarana ekstra-anggaran dan dana tujuan; administrasi publik internal dan eksternal utang serta operasi keuangan lainnya atas nama publik pusat badan administrasi (Lestari and Hertati, 2020). Kementerian, departemen, dan publik pusat lainnya badan administrasi yang pengelolanya memiliki kualitas pemegang kredit utama, serta entitas publik yang disubordinasikan mengatur dan mengelola pembukuan pendapatan yang dikumpulkan dan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang disetujui, sarana ekstra-anggaran dan tujuan khusus dana.

Pandemic Covid-19 muncul di tahun 2020 cukup mengguncang dunia dan diperluas berdampak pada perekonomian sehingga berimplikasi pada semua entitas publik, karena akuntansi sektor publik Rumania didasarkan pada sistem akuntansi kas, dan uang itu didaftarkan pada saat pembayaran, terlepas dari periode waktu atau tujuan. Di bawah akuntansi kas sistem, pendapatan dan beban diakui sebagai berikut pendapatan adalah diakui pada saat kas diterima dan beban diakui pada saat kas diterima dibayar.

5.2 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik

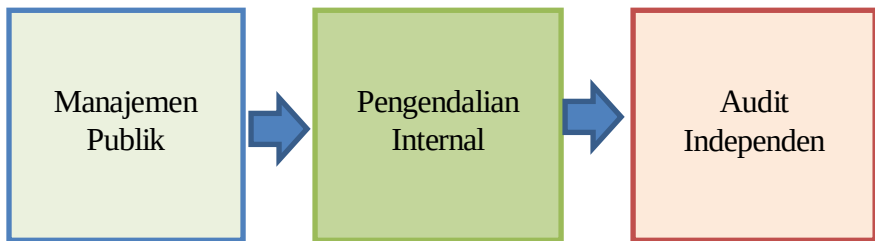
Banyak negara Eropa memahami dan mengubah basis uang tunai ini akuntansi beberapa dekade yang lalu, tetapi entitas publik Rumania terus mengikuti sistem, meskipun berdampak negatif pada pelaporan keuangan dan publik pengelolaan. Dengan demikian, pada awal tahun 2003, Rumania sedang mengembangkan sistem akuntansi publik, akuntansi kas campuran dan akuntansi akrual; pada saat yang sama, pegawai negeri berusaha keras untuk mempelajari akuntansi baru dan modern

Prosedur. Oleh karena itu, pada awal 2010, semua entitas publik di Rumania menerapkan sistem akuntansi akrual, dengan hasil yang baik bagi masyarakat pengelolaan (Laudon and Laudon, 2014) Komite Sektor Publik (PSC) dari Internasional Federasi Akuntan (IFAC) telah berkomentar berkali-kali secara ekstensif tentang manfaat akuntansi akrual untuk pemerintah dan sektor publik individu entitas, seperti transparansi, relevansi dan komparabilitas. Akuntansi informasi yang dihasilkan berbasis akrual dapat membuat informasi publik lebih banyak komprehensif, transparan, konsisten dan berkelanjutan untuk publik pengelolaan. Akibatnya, menurut PSC, laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual memungkinkan manajer dan direktur publik untuk:

1. menilai akuntabilitas untuk semua sumber daya yang dikendalikan entitas dan penyebaran sumber daya tersebut;
2. menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas entitas;
3. dan membuat keputusan tentang menyediakan sumber daya untuk atau melakukan bisnis dengan entitas.

Dalam 30 tahun terakhir, pemerintah telah mencoba melaksanakan reformasi menjadi akuntansi sektor publik dan untuk mengembangkan fiskal dan keuangan publik sistem di tingkat nasional. Umumnya, akuntansi akrual telah menjadi standar praktek bekerja di sektor swasta selama beberapa dekade, dengan manfaat terkenal untuk pelaporan keuangan. Namun, sistem akuntansi akrual mengalami pertumbuhan cepat di tingkat Eropa, untuk memfasilitasi yang lebih baik pengelolaan dana publik dan harmonisasi dengan Eropa arahan dan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS). Namun, hasil yang lebih baik dalam administrasi publik membutuhkan penuh dan nyata transparansi pelaporan keuangan di bawah manajemen publik baru. Untuk itu, manajemen publik harus siap mendorong audit independen atas laporan keuangan dan untuk mengembangkan pengendalian

internal di semua tingkatan dalam administrasi publik (gambar 5.1).



Gambar 5.1 Manajemen Publik, Pengendalian Internal, Audit Independen

Di penghujung tahun 2022, sistem akuntansi publik menghasilkan akurasi informasi dalam rangka memberikan analisis biaya yang efektif dan efisien manajemen publik karena tujuan dari Puspitawati. 2021). Langkah terakhir dalam proses modernisasi akuntansi sektor publik mencakup pengembangan sistem informasi di bawah manajemen publik baru, adopsi transmisi dokumen elektronik, seperti laporan manajemen keuangan, laporan arus kas, dan laporan fiskal kepada Wajib Pajak.

Pelaporan kekurangan dalam akuntansi sektor publik dan sistem manajemen keuangan serta praktik di negara-negara berkembang kontemporer. Pandangan konvensional tentang kekurangan luas akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan di negara berkembang. Konsep kekurangan ditinjau dan kemudian diperiksa melalui studi kasus dari *Volta River Authority* (VRA) di Ghana. Bukti empiris dalam mode tiga dimensi yaitu dari perspektif rasional teknis, perspektif sosio-historis dan perspektif pembangunan sosial-ekonomi. Sistem akuntansi di VRA secara teknis baik dan dioperasikan dengan baik, menutupi 'kekurangan' yang lebih dalam yang menjadi jelas melalui apresiasi terhadap konteks sosial-politik di mana VRA beroperasi. Pencapaian tujuan

awal VRA, pembangunan sosial-ekonomi negara yang mencerminkan 'kekurangan' umum sistem akuntansi berdasarkan konsep entitas.

5.3 Manfaat Manajemen Di Sektor Publik Akuntansi

Manfaat akuntansi manajemen bagi suatu perusahaan adalah membantu pembuatan keputusan Akuntansi manajemen memiliki fungsi utama yaitu:

1. Membantu pembuatan keputusan yang mengenai penggunaan dana untuk tujuan organisasi. Hal ini karena akuntansi manajemen memberikan analisis keuntungan maupun kerugian yang dialami organisasi beserta faktor yang mendukungnya. Akuntansi manajemen juga memberikan ramalan atas prospek organisasi. Sehingga saat prospek buruk, dapat dilakukan antisipasi. Dengan adanya analisis prospek, organisasi juga dapat membuat produk baru, mengalokasikan dana lebih tepat, kapan dan seberapa banyak perusahaan harus berutang, hingga mengelola saham perusahaan agar lebih menguntungkan.

2. Sumber data organisasi

Akuntansi manajemen berfungsi sebagai sumber data yang relevan karena menyediakan informasi keuangan organisasi yang digunakan untuk tujuan internal. Akuntansi manajemen menyediakan data yang lengkap mulai dari biaya produksi, biaya transportasi, arus kas, piutang, hingga biaya tak terduga.

3. Pengawasan perusahaan

Akuntansi manajemen yang menjadi sumber data organisasi juga berfungsi sebagai pengawasan dana perusahaan. Hal ini karena akuntansi manajemen melakukan kontrol dengan cara memastikan kebenaran informasi yang dimasukkan ke dalam

laporan. Sumber informasi dari akuntansi manajemen dapat digunakan sebagai bahan untuk audit. Audit diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepercayaan manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

4. Pengindentifikasi masalah

Akuntansi manajemen dapat membantu dalam analisis masalah ataupun hambatan yang muncul dalam organisasi lebih awal. Identifikasi masalah sejak dini membuat perusahaan terhindar dari kerugian tidak terduga yang terjadi secara tiba-tiba. Akuntansi manajemen juga membantu perusahaan untuk menganalisis kapan situasi *break-even* (organisasi tidak untung ataupun tidak rugi) dilakukan untuk mempertahankan perusahaan.

Hal ini disebabkan oleh karakter akuntansi sebagai penyedia jasa yang relevan untuk berbagai jenis individu dan organisasi. Karakter ini memisahkan akuntansi dari perspektif makro, namun di lain pihak, perspektif ini membuka peluang untuk mengadopsi teknik ekonomi dan statistik. Akibatnya, akuntansi pemerintahan cenderung didefinisikan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintah. Akuntansi guna mendukung pemerintah dalam mempertanggungjawabkan terhadap keputusan sumber daya yang transparan dan akuntabilitas.



Gambar 5.2 Persepsi tentang Modernisasi dari Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntansi manajemen memberikan informasi-informasi tidak hanya informasi keuangan tetapi juga informasi keuangan tetapi informasi secara keseluruhan. Akuntansi manajemen membantu organisasi sektor publik dalam proses perencanaan dan pengendalian. Pada zaman globalisasi yang semakin kompleks permasalahan yang muncul, maka organisasi sektor publik harus bisa menyesuaikan diri. Dengan adanya akuntansi manajemen maka bisa membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya dan membantu organisasi membangun hubungan baik antar bagian dalam organisasi. Proses perencanaan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang target yang akan dicapai organisasi.

1. Penerapan akuntansi manajemen sektor publik

Merupakan langkah untuk mengelola semua sumber daya dalam organisasi. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berusaha memberikan pelayanan kepada

publik. Supaya publik tidak kecewa maka pihak intern organisasi harus dikelola dengan baik terlebih dahulu. Dengan akuntansi manajemen membantu pihak intern untuk mendapatkan kejelasan tugas. Selain itu juga membantu organisasi dalam melakukan pengendalian. Pengendalian dibutuhkan untuk menjamin tujuan organisasi yang telah diterapkan bisa tercapai. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh aspek-aspek tersebut sangat besar pada organisasi sektor publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan dalam merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan. Sehingga dengan adanya akuntansi manajemen seluruh kegiatan dalam organisasi sektor publik dapat dikelola dengan baik. (Zaman and Ionescu, 2016).

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. *Institut Of Management Accountants* (1981) mendefinisikan Akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasi dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta menjamin bahwa, sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Chartered institute of management accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk :

a. Perumusan strategi

- b. Perencanaan dan pengendalian aktivitas
- c. Pengambilan keputusan
- d. Pengoptimalan sumber daya
- e. Pengungkapan (*disclosure*) kepada *shareholders* dan pihak luar organisasi
- f. Pengungkapan kepada karyawan, dan
- g. Perlindungan aset

Baik *Institute Of Manajement Accountants* maupun *Chartered Intitute Of Manajement Accountants* sama-sama menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Oleh karena itu akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral maka pengembangan akuntansi manajemen tidak dapat dilakukan secara parsial dan terisolasi dari sistem yang lain. Pada prinsipnya akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Prinsip-prinsip akuntansi manajemen yang biasa digunakan pada organisasi sektor swasta seperti manajemen strategik dan manajemen biaya pada dasarnya dapat diterapkan di sektor publik. Akan tetapi harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa dimodifikasi. Fokus bahasan akuntansi sektor publik adalah mengenai peran akuntansi sebagai penyedia informasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik.

Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik

terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif yaitu digunakan untuk perencanaan dimasa yang akan datang sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan yang historis dan retrospektif yaitu berupa laporan kinerja masa lalu (Todericiu and Stanit, 2016).

2. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi

Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. (Panzaru, 2016).

Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dan mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlakukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi

yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

Sementara itu tingkat ketidakpastian atau turbulensi yang dihadapi sektor publik di masa-masa yang mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sektor, termasuk sektor publik. Akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc

Informasi sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang regular, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran ataukah tahunan. Sementara itu organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc.

b. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif.

c. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal

Mekanisme formal misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat-rapat komisi dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

3. Akuntansi Sebagai Alat Pengendalian Organisasi

Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi (*negotiated bargain*). Organisasi sektor publik sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*) akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter.

Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan menggunakan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*finance control*) dengan akuntansi sebagai pengendalian organisasi (*Organizational Control*). Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. (Peterescu, 2016).

Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang

dibutuhkan lebih kompleks tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan.

4. Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial

Dalam organisasi sektor public, perencanaan dan pengendalian sebaiknya dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut (*follow-up*) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga suatu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu

- a. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
- b. Perencanaan
- c. Operasional
- d. Penganggaran
- e. Pengendalian dan pengukuran, dan
- f. Pelaporan, analisis, dan umpan balik

5. Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan

handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi :

a. Perencanaan strategik

Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (*cost of program*) dan berapa biaya suatu aktivitas (*cost of activity*), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki (Lomax and Schumacer, 2010).

Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas, atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Keandalan sistem informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik (*putting the customer first*). Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (*cost, quality, and service*).

Untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Pada dasarnya organisasi publik juga dapat menerapkan teknik akuntansi manajemen yang diterapkan di sektor swasta, seperti teknik *activity-based costing*, *job costing*, *batch costing*, *standart costing* dan sebagainya untuk menentukan biaya produk atau pelayanan. Memang terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan (*product costing*). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan *engineered costs* yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan *discretionary costs* yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan *intangible output* yang diukur (Chang and Smith, 2014).

Karena sebagian besar biaya yang terjadi di sektor publik merupakan *discretionary costs*, maka peran manajer publik sangat penting dalam mengendalikan biaya. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money budget*).

b. Pemberian informasi biaya

Biaya (*cost*) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Biaya input

Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.

2) Biaya output

Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Sebagai misal untuk perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang.

3) Biaya proses

Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya.

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan *cost accounting* untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal (masyarakat, DPRD, LSM, universitas, dan sebagainya) untuk perencanaan,

pengendalian, dan pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk dalam kategori biaya rutin (*recurrent expenditure*) dan yang masuk kategori biaya modal (*capital expenditure*), *controllable* dan *uncontrollable*, biaya tetap dan variabel dan sebagainya. Informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat membantu manajer publik dalam menentukan dan melaporkan biaya (Hammad and Ghazali. 2013).

Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu: *cost finding*, *cost recording*, *cost analyzing*, *strategic cost reduction*, dan *cost reporting*.

1) *Cost finding*

Pada tahap *cost finding*, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi atau jasa pelayanan.

2) *Cost Recording*

Setelah berhasil dilakukan *cost finding*, tahap berikutnya adalah melakukan *cost recording* yang meliputi kegiatan pencatatan data kedalam sistem akuntansi organisasi.

3) *Cost analyzing*

Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya (*cost driver*) agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.

4) *Strategic cost management*

Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai *value for money*.

5) *Cost Reporting*

Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk *internal report* yang kemudian diagresikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal.

c. Penilaian investasi

Akuntansi Manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Faktor yang harus diperhatikan akuntan manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian (termasuk *country risk* dan *political risk*), dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Pada sektor swasta, terdapat beberapa teknik penilaian investasi, misalnya dengan menggunakan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate Of Return* (IRR), *Accounting Rate Of Return* (ARR), *Payback Period* (PP), dan sebagainya (Andesto, 2016).

Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta berbeda dengan sektor publik, hal ini dikarenakan sektor swasta berorientasi mengejar laba, sementara sektor

publik tidak, disamping itu sulit untuk mengeluarkan *output* yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial sulit dilakukan. Penilaian investasi dalam organisasi sektor publik dilakukan menggunakan analisis biaya-manfaat (*cost benefit*). Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sulit dilakukan, oleh karena itu untuk memudahkan, kemudian digunakan analisis efektivitas biaya (*cost-effertiveness analysis*). Penilaian investasi dengan menggunakan analisis efektivitas biaya menekankan pada seberapa besar dampak (*outcome*) yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu.

d. Penganggaran

Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata.

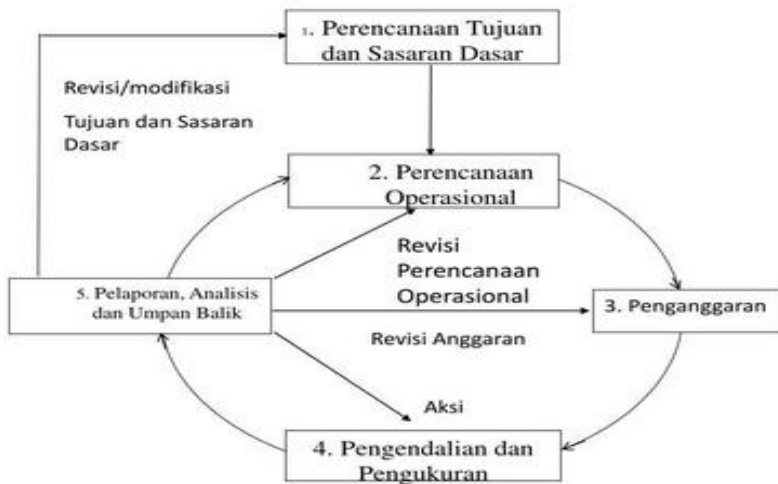
e. Penentuan Biaya Pelayanan (*Cost of Services*) dan Penentuan Tarif Pelayanan (*Charging for Services*)

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya untuk memberikan pelayanan dan tarif yang akan dibebankan pada pemakai pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi. Masyarakat menghendaki pemerintah

memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, keinginan masyarakat tersebut agar kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat semakin baik. Penentuan biaya pelayanan (*cost of services*) dan penentuan tarif (*charging for service*) merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, aman dan nyaman serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi tersebut pemerintah setempat dapat menentukan berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api tersebut.

f. Penilaian kinerja

Dalam tahap penilaian kerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.



Gambar 5.3 Peran Manajemen Akuntansi Sektor Publik

Efektivitas akuntansi dan keuangan sistem manajemen dalam konteks organisasi sektor publik negara berkembang. Itu masalah mengeksplorasi klaim umum dalam literatur bahwa akuntansi dan keuangan sektor publik praktik manajemen negara-negara berkembang kontemporer "kurang".

Penting kesamaan akuntansi sebagai kerajinan netral teknis untuk melayani organisasi dan masyarakat. Itu asumsi dipermasalahkan dalam tulisan ini. Sistem akuntansi yang baik secara teknis mungkin tidak netral dan mungkin merupakan fasad yang mengaburkan kepentingan tertentu yang mereka layani. Kita harus pergi di luar teknis dan memeriksa konteks sosial-politik di mana mereka beroperasi sepenuhnya memahami fungsinya. Menggunakan *Volta River Authority (VRA)* sebagai studi kasus, kekurangan akuntansi dan manajemen keuangan dieksplorasi dalam mode tiga dimensi - dari rasional teknis perspektif, perspektif sosio-historis, dan perspektif pembangunan sosial-ekonomi. Tujuan akuntansi anajemen sektor publik menunjukkan;

1. Bagaimana apresiasi sosial dan analisis historis akuntansi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hal-hal yang diterima begitu saja proses yang mendasari pandangan yang diterima dari akuntansi dan keuangan sektor publik sistem manajemen di negara berkembang;
2. Bagaimana sistem akuntansi yang dianggap efektif dalam pengertian rasional teknis (tidak hanya oleh mereka yang rutinitas sehari-harinya dipola oleh sistem ini tetapi juga oleh lembaga eksternal yang 'kuat' seperti Dunia Bank dan firma audit/akuntansi yang bereputasi internasional), sangat dibatasi oleh sejarah keadaan organisasi dan;
3. Bagaimana 'ketidakcukupan' akuntansi VRA saat ini sistem hanya mencerminkan keterbatasan utama akuntansi konvensional secara umum. Kita mulai dengan memberikan diskusi singkat tentang konsep kekurangan seperti yang muncul dalam literatur akuntansi pada organisasi sektor publik di negara berkembang. Perlunya elaborasi dan studi empiris tentang kekurangannya klaim kemudian disajikan. Pendekatan pengumpulan dan analisis data menggunakan tiga perspektif dimensi dijelaskan.

Konsep kelemahan

Salah satu isu yang paling penting dan sering kontroversial dalam pengelolaan publik sektor negara berkembang adalah (dalam) kecukupan akuntansi dan manajemen keuangan sistem. Banyak penelitian menunjukkan kekurangan dalam sistem akuntansi sebagai kelemahan penting dalam pengelolaan sektor publik di sebagian besar, dan terutama negara berkembang, Kinerja entitas sektor publik dipandang sebagai masalah di negara maju dan negara berkembang "kekurangan" dalam akuntansi dan keuangan sektor publik manajemen telah diidentifikasi sebagai karakteristik keterbelakangan sosial-ekonomi "negara miskin"

umumnya memiliki sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang buruk”.

Di banyak negara berkembang, pelaporan keuangan dan ekonomi tidak memadai manajemen di tingkat pusat telah berkontribusi pada keputusan yang tidak realistis dan tidak konsisten pembuatan, pemantauan perkembangan fiskal yang tidak efektif, dan ketidakseimbangan yang terjadi di keuangan publik. Salah satu masalah utama berkaitan dengan perekrutan dan retensi akuntan yang berkualitas. Sektor publik di delapan negara berkembang, menemukan kekurangan keseluruhan akuntan terlatih; pelatihan dan fasilitas yang tidak memadai, dan sektor publik menderita karena perbedaan gaji antara sektor swasta dan publik. Sebuah konsekuensi penting dari kurangnya personel akuntansi yang berkualitas. Keputusan manajemen yang dipertanyakan, tidak ekonomis, atau tidak tepat telah dibuat tanpa data akuntansi yang tepat dan interpretasi yang tepat darinya. (Stair and Reynolds, 2010).

Sebagian besar peneliti memiliki saran untuk perbaikan. sebagian besar sektor publik di banyak ekonomi [berkembang] dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengelolaan keuangan publik umumnya memerlukan metodologi, praktik dan pelatihan di sektor vital ini. Apa yang dimaksud dengan "metodologi yang lebih baik" masih bisa diperdebatkan. Beberapa menganjurkan transplantasi sistem akuntansi yang beroperasi di negara maju ke negara berkembang. Yang lain menentang resep global dan berpendapat bahwa hanya ada sedikit kemungkinan untuk menemukan sistem monolitik akuntansi sektor publik yang akan efektif di semua negara, mengingat perbedaan sejarah, politik dan budaya yang signifikan di antara negara-negara. (McLeod and Schell, 2008).

Akuntansi untuk proyek-proyek pembangunan besar dilakukan untuk mencoba keluar dari jebakan keterbelakangan

sosial-ekonomi, dan melibatkan investasi besar dalam hal keuangan dan sumber daya manusia. Manajemen sering merupakan aspek penting dari kebijakan ekonomi nasional yang lebih luas. Pentingnya akuntansi untuk guna kemajuan ekonomi dan sosial dalam pembangunan negara. Untuk mencapai tujuannya, proyek harus dikelola dengan baik. Untuk ini, berbagai pihak dalam pelaksanaan manajemen membutuhkan informasi keuangan yang baik dan sistem pengendalian keuangan yang efektif. Juga tidak mungkin tanpa akuntansi yang tepat sistem. Sistem akuntansi di operasi hanya melayani lembaga donor internasional tanpa pertanggungjawaban kepada lokal (Loudon and Loudon 2016); (Laudon and Laudon, 2014).

Akuntansi dan manajemen keuangan di negara berkembang didominasi oleh pandangan rasional teknis akuntansi. Perspektif tampak jelas dalam menafsirkan pengalaman di VRA. Peserta organisasi memberikan deskripsi yang kaya dan persepsi tentang prosedur pengendalian keuangan formal termasuk model perencanaan, penganggaran prosedur pengendalian, praktik manajemen kas, tingkat komputerisasi dan masalah desentralisasi fungsi akuntansi dan pengelolaan keuangan. Kekurangan atau sistem VRA dengan mengacu pada teknis ini Prosedur. Ditunjukkan pada evaluasi sistem VRA pada ditingkat yang tidak terbatas pada pencarian keberadaan prosedur pengendalian tertentu saja, tetapi bagaimana prosedur yang benar-benar diterapkan dalam praktik untuk memfasilitasi sumber daya keuangan organisasi pengelolaan. Prosedur perencanaan dan penganggaran.

Pandangan rasional teknis akuntansi dibuktikan dengan persepsi yang luar biasa di antara peserta organisasi bahwa *Volta River Development Act*, dokumen pembentukan VRA, memberikan prinsip panduan untuk akuntansi dan manajemen keuangan di organisasi. Undang-undang tersebut dengan jelas membahas berbagai masalah pengelolaan keuangan mulai dari: pengakuan

pendapatan, revaluasi dan depresiasi aset, hingga pinjaman dari internasional lembaga keuangan dan perlakuan atas kepentingan terkait. Seorang anggota senior dari Departemen Keuangan mengamati: Pengelolaan keuangan kami dilakukan dengan hati-hati ... kami memiliki ketentuan undang-undang yang membentuk landasan prosedur manajemen keuangan kami di Otorita dan segala upaya untuk memahami sistem kita harus dimulai dari sana.

Akuntansi menunjukkan bahwa masalah di negara-negara berkembang adalah yang miskin sistem akuntansi di organisasi sektor publik mereka. Tidak adanya kualifikasi yang tepat staf dan sistem akuntansi yang dirancang dengan buruk menyebabkan informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan untuk membuat keputusan ekonomi yang masuk akal dan untuk memastikan sumber daya diterapkan dengan benar untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris dalam penelitian kami menunjukkan bahwa dalam kasus VRA tidak ada keraguan kemampuan teknis staf akuntansi dan laporan keuangan umumnya dianggap berstandar internasional. Anggapan bahwa akuntansi secara teknis sehat sistem pasti menghasilkan keputusan ekonomi yang sehat dan membantu dalam memenuhi tujuan pembangunan namun bermasalah. (Hertati, Fery and Safkaur, 2020).

Bukti menunjukkan bahwa sistem akuntansi sebagian dilindungi kepentingan pihak luar dengan mengorbankan penduduk setempat. Seseorang harus melampaui pemeriksaan hal-hal teknis, dan memahami konteks sosio-historis, untuk memahami mengapa hal ini terjadi. Diskusi tentang sistem manajemen sumber daya keuangan VRA memberikan pandangan yang mendalam dan kekhawatiran tentang klaim defisiensi sederhana dalam akuntansi sektor publik dunia ketiga dan literatur manajemen keuangan. Karena klaim kekurangan tidak dapat ditegakkan dengan kuat di pengertian rasional teknis, yang saat ini mendominasi literatur, kami menyarankan agar para peneliti harus berusaha untuk

menggunakan perspektif "kritis" dan "interpretatif" untuk membantu pemahaman dari area penelitian yang sangat besar ini. Masih banyak yang harus dipelajari dari penelitian akuntansi dalam hal ini daerah karena: Kami tidak, tentu saja dan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, memiliki akses ke sudut pandang yang kurang kuat dalam masyarakat kita. Sejauh yang kami ketahui seperti itu pengelompokan, seringkali melalui akun menghina yang disediakan oleh kelompok kuat kritik lokal terhadap akuntansi dan keuangan sektor publik mengenai manajemen di bidang yang kurang dieksplorasi ini.

Hal ini sangat penting mengingat reformasi sektor publik di sebagian besar negara berkembang kebijakan di bidang sektor publik menawarkan kesalahan atau resep tidak efektif dunia ketiga. Reaksi berlebihan terhadap situasi dinegara berkembang memompa pembiayaan pembangunan ke negara-negara dengan akuntansi yang lemah dan tersebar luas kurangnya keterampilan melalui lembaga dengan sistem yang rusak memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi: Jaminan dasar tentang penggunaan dana yang tepat tidak ada. Memperingatkan lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia dan IMF) dan negara-negara donor lainnya tentang bahaya yang terlibat dalam mendukung dunia ketiga proyek pembangunan jika sistem akuntansi pemerintahan mereka terus diwakili dalam Akuntansi pemerintahan dan manajemen keuangan di negara-negara berkebang sebagian besar dunia akademisi akuntansi (yang memiliki banyak pengetahuan tentang kondisi lokal) memiliki anggaran/hibah yang sangat terbatas dibandingkan dengan biaya yang relatif tinggi untuk melakukan penelitian di bidang ini negara. Akuntansi sektor publik menjelaskan salah satu masalah dari literatur akuntansi dunia ketiga kontemporer - perhatian yang luar biasa tentang kekurangan luas dalam akuntansi sektor publik dunia ketiga dan manajemen keuangan praktek.

Kekhawatiran kurangnya kontrol formal dan anggaran prosedur, kurangnya independensi auditor, penggelapan besar-besaran dan penyalahgunaan dana, kurangnya staf yang kompeten, informasi keuangan yang tidak tepat waktu dan tidak akurat, dan kurangnya rekening tahunan yang diterbitkan tidak berlaku dalam konteks VRA. Namun, sejarah keadaan Otorita menghadirkan kendala dan tantangan serius terhadap efektivitas manajemen sumber daya keuangannya sehingga membuat akuntansi dan manajemen keuangan prosedur, fasad yang menutupi realitas sosial-politik yang mendasari dalam organisasi dan oleh karena itu bisa cocok dengan deskripsi sebagai "kekurangan". Ini, menurut kami, sebagian merupakan cerminan dari pengaturan kelembagaan di mana VRA beroperasi dan sampai batas tertentu pembatasan akuntansi konvensional. Memang, itu adalah batasan yang timbul dari penekanan berlebihan akuntansi pada konsep entitas, (Hertati. and Syafarudin, 2018).

5.4 Rangkuman

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu (1) Proses Pengendalian Manajemen, yang meliputi aktivitas, yaitu (a) Perencanaan (b) Koordinasi (c) Komunikasi informasi (d) Pengambilan keputusan (e) Motivasi (f) Pengendalian dan (g) Penilaian kinerja. (2). Struktur Pengendalian Manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta membantu memberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik

berperan untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan (*cost of service*) dan tarif pelayanan (*charging for service*). Peran dan pentingnya manajemen di sektor publik telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir karena keinginan pemerintah untuk mendapatkan yang terbaik menghasilkan administrasi publik, untuk lebih mengontrol pengeluaran publik, untuk menggunakan sumber daya publik secara optimal dan menganalisis secara akurat dan andal informasi yang dikumpulkan dari departemen akuntansi. implementasi dari pemantauan permanen dan reformasi akuntansi telah menciptakan prasyarat untuk manajemen publik yang lebih baik dan dasar informasi yang baik untuk mengadopsi manajerial keputusan di tingkat pusat. Manajemen dan akuntansi sektor publik di pusat dan daerah administrasi sangat terkait. Teknik akuntansi penting sebagai instrumen yang efisien untuk manajemen publik dan untuk memerangi korupsi di sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik beriringan dengan mekanisme kontrol yang diterapkan dan keuangan laporan dielaborasi pada waktunya, sementara menghabiskan lebih sedikit waktu dan lainnya. Dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis, manajer secara luas menarik metode dan teknik modern untuk meningkatkan hasil. Menganalisis persepsi pegawai negeri tentang peran manajemen, dilihat bahwa manajemen kinerja diimplementasikan dalam lembaga publik dan sebagian besar karyawan menyadari manfaat dari manajemen dalam administrasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbejule, A. (2005). *The Releantion Between Management Accounting Systems and Perceived Environmental Uncertainty on Managerial Performance: A Research Note*. *Account. Bus. Research*. Vol. 35, No. 4, pp 295-305.
- Andesto, R. (2016). *The Influence Of Perceived Environmental Uncertainty And Business Strategy On Management Accounting System (Survey On The Indonesia Advertising Companies)*. *European Journal of Accounting, Audit. Financ. Res.* Vol. 4, No.3. pp.27-36.
- Bhimani, A. (2010). *Contemporary Issues in Management Accounting*. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
- Bodnar , G. H. and Hopwood, W. S. (2010). *Accounting Information Systems*, Tenth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Education Inc.
- Boockholdt, J. L. (1999). *Accounting Information Systems, transactions Processing and Controls*, fifth edition. USA: McGraw-Hill
- Chang, R. and Smith. (2014). *Accounting Information system*, International Edition. USA: McGraw-Hill
- Hall, J. A. (2011). *Accounting Information Systems Seventh Edition*. South-Western Cengage Learn. a part Cengage Learn.USA.
- Hammad, S. A. Jusoh, R. and Ghozali, I. (2013). *Decentralization, perceived environmental uncertainty, managerial performance and management accounting system information in Egyptian hospitals*. *International Journal of Accounting and Information management*. Volume 21.
- Hertati, L. and Sumantri, R. (2016). *Just In Time, Value Chain, Total Quality Management, Part Of Technical Strategic Management Accounting*. *International Journal Of Scientific & Technology Research* 5(4) 181-191

- Hertati, L. and Syafarudin, A. (2018). *How the Implementation of the Industrial Revolution 4.0 Management Information System Influenced Innovation: The Case of Small and Medium Enterprises in Indonesia*. Journal of Asian Business Strategy. 8 (2) 52-62
- Hertati, L. Fery, I. Safkaur, O. (2020). *Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Sistem Informasi Keuangan*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 13 (1),125-136
- Hurt, R. L. (2008). *Accounting Information system, Basic concept and current issues*, Mc.Grow Hill companies Inc.
- Laudon, K. C. and Laudon, J. P. L. (2014). *Management Information System: Managing The Digital Firm*. Thirteenth Edition. USA: South-Western Cengage Learning.
- Lestari, R. and Hertati, L. (2020). *Bagaimana Pengaruh Strategi Bisnis, Kekuatan Produk Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen: Studi Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia*. Kajian Akuntansi. 21(1)1-12
- Lomax, R. and Schumacer, R. E. (2010). *Beginner's Guide to Structural Equation Modeling*. Third Edition. New York: Routledge-Taylor & Francis Group
- Loudon, J. P. and Loudon, K. C. (2016). *Management Accounting Systems Managing The Digital Firm*. 12th Edition Person Prentice Hall. USA.
- Loudon, K. C. and Laudon, J. P. (2017). *Manajemen Information System : Managing The Digital Firm*. thirteenth edition - Global edition. USA: Pearson Education Limited
- McLeod, R. and Schell, G. P. (2008). *Management Information System international*, tenth edition. South Asia: Pearson Education Inc
- Muslichah. (2004). *The Effect Of Contingency Variables On Management Accounting System Characteristics And*

- Managerial Performance*. vol. The Intern, 2004.
- O'Brien, J. A. and Marakas, G. M. (2010). *Introduction To Information System*. McGraw Hill:USA.
- Panzaru, S., (2016). Actuality and trends in the entrepreneurship development in Romania, *Review of General Management*, Vol. 24, Issue 2, pp. 57-65.
- Peterescu, I. (2016). *Management History, a Source of Teaching, Review of General Management*. Vol. 24, Issue 2, pp. 5-11.
- Puspitawati, L. (2021). *Strategic Information Moderated By Effectiveness Management Accounting Information Systems: Business Strategy Approach*. Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanagara. Vol. 25, No.1. June 2021. Pp 101-119.
- Stair, R. and Reynolds, G. W. (2010). *Principles of Information System: A Managerial Approach*, Ninth Edition. Course Technology, Cengage Learning. Boston.
- Todericiu, R, and Stanit, A. (2016). *Knowledge management practices improvement in public sector administration*, *Review of General Management*, Vol. 24, Issue 2, pp. 50-56.
- Zaman, G. and Ionescu L. (2016). *Knowledge management practices improvement in public sector administration, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research*, Vol. 50, Issue 2, pp. 247-261.

BAB VI

AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Oleh Dr. Asri Kunda, S.E., M.M.

6.1 Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Setiap lembaga publik tentunya mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan. Karena hal itulah, akuntansi sektor publik ini digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pada publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Lembaga publik yang dimaksudkan di sini adalah lembaga yang tidak berorientasi mencari laba. Lembaga tersebut bisa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Didirikan dan dioperasikan oleh pemerintah maupun swasta selama atas nama publik. Hal ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini seyogyanya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai

lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan lembaga non-pemerintah. Bahkan, rumah sakit dan lembaga pendidikan juga membutuhkan akuntansi jenis ini.

Proses pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena negara, khususnya organisasi pemerintah, tentu memiliki standar sistem akuntansi masing-masing. Jadi, proses tersebut harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang dianut oleh lembaga. Perlu diketahui bahwa akuntansi untuk sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan dan sistem akuntansi. Akuntansi untuk sektor publik yang berkembang di Indonesia sejauh ini lebih melayani untuk persaingan swasta saja. Hal ini tentu menjadi sebuah kesalahan karena pertanggungjawaban kinerja lembaga publik berbeda dengan swasta.

6.2 Karakteristik dari Akuntansi Untuk Sektor Publik

Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat.

Mudahnya, karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal. Pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus

organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba. Misalnya seperti lembaga pemerintahan.

Kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Pertama, pengaruh dalam bidang ekonomi. Misalnya berupa tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan lainnya. Selanjutnya pengaruh dalam bidang politik. Misalnya seperti pemerintahan yang berkuasa, hubungan antar masing-masing lembaga, dan lainnya.

Bidang kebudayaan dan demografis pun juga turut mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Dalam bidang kebudayaan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang berbeda, tingkat pendidikan, keberagaman suku, dan lainnya. Sedangkan dalam bidang demografis, kinerja lembaga publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakat, kesehatan masyarakat, migrasi, dan lainnya.

6.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan

pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber dan yang menjadi wewenangnya, serta memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu, penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai di perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging of services*).

6.4 Sistem Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan:

1. Harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, baik mengenai jumlah fisik maupun jumlah rupiahnya, serta data penting lainnya yang berkaitan dengan transaksi.
2. Harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi.
3. Harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatan akuntansi menjadi laporan untuk manajemen dan pihak lain yang berkepentingan.

6.4.1 Sistem Akuntansi Instansi

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual dan atau terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005, Sistem Akuntansi Instansi adalah: serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan melaporkan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK -BMN). Sistem Akuntansi Instansi (SAK) terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA -UAKPA).
2. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SAUAPPA-W). Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SAUAPPA-E1).
3. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA -UAPA).

Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB).

Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian negara/Lembaga.
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA -E1) yang berada pada tingkat Eselon 1.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA -W) yang berada pada tingkat wilayah.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja.

Unit Akuntansi Barang, terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian negara/Lembaga.
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB - E1) yang berada pada tingkat eselon 1.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB - W) yang berada pada tingkat wilayah.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja.

Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga dapat menunjuk satuan kerja sebagai koordinator UAPPA -W/UAPPB -W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah kementerian negara/lembaga sebagai UAPPA -W/UAPPB -W sesuai struktur kementerian negara/lembaga.

6.4.2 Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan merupakan bagian SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah sumber dokumen dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SAK dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Perdirjen Nomor Per 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan SAK kementerian negara/lembaga membentuk dan menunjuk unit akuntansi di dalam organisasinya, yang terdiri dari :

1. UAPA pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
2. UAPPA -E1 pada tingkat Eselon I.
3. UAPPA -W pada tingkat wilayah.
4. UAKPA pada tingkat satuan kerja.

Kementerian negara/lembaga yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, disamping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga wajib menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara terpisah. Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya (asas desentralisasi). Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem

informasi manajemen barang milik negara (SIMAK -BMN) yang dikompilasi.

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. Mengacu pada definisi Ensiklopedia, Laporan Keuangan adalah sekumpulan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disajikan dalam bentuk laporan sistematis yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data, terdiri dari faktur- faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan bank dan sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi.

6.5 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan – *Compliance and Stewardship*

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif – *Accountability and Retrospective Reporting*

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan

digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi – *Planning and Authorization Information*

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi – *Viability*.

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat – *Public Relation*.

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran – *Source of Facts and Figures*.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif. Dalam kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dijelaskan mengenai tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan laporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atau unit kerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

6.6 Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari dasar kas (*cash base*), dasar akrual, (*accrual base*), dan akuntansi dana (*fund accounting*).

1. Dasar Kas (*Cash Base*)

Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Laporan arus kas

banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan.

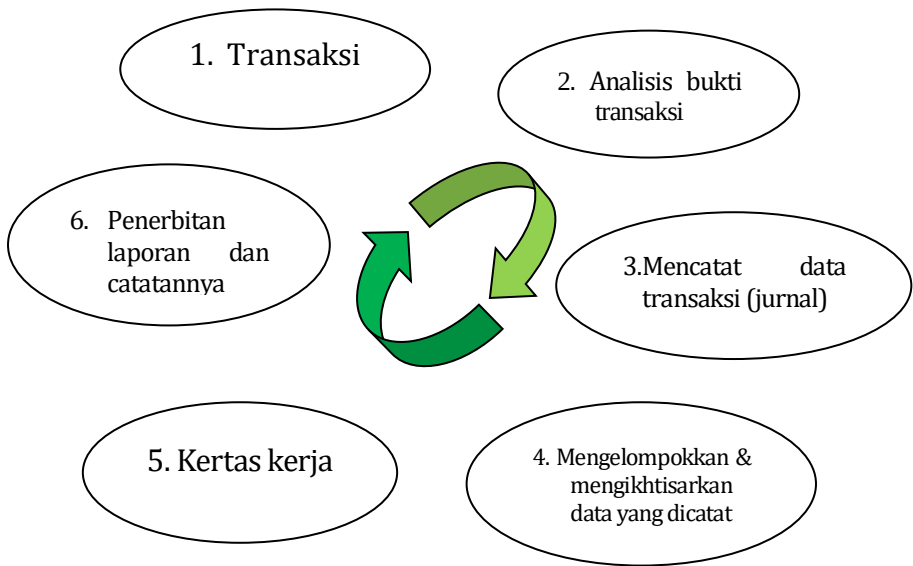
2. Dasar Akrua (*Accrual Base*)

Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SAP 2 adalah Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dirumuskan atau dimasukan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan.

3. Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi disektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti bahwa transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirimkan atau diterima.

6.7 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik



Gambar 6.1 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Penjelasan dari siklus akuntansi keuangan sektor publik pada gambar 6.1 yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi

Adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain.

2. Analisis Bukti Transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut.

3. Mencatat Data Transaksi

Seperti telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah

terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4. Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (di *posting*)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan akan transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing masing. Hal ini disebut dengan *posting*

5. Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

6.8 Laporan Keuangan Sektor Publik

6.8.1 Teknik Laporan Keuangan Sektor Publik

Berdasarkan tahapan dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahapan berikut :

1. Tahap Pencatatan.

- a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- c. Memindahbukukan (*posting*) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2. Tahap Pengikhtisaran.
 - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar.
 - b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian.
 - c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur.
 - d. Pembuatan ayat jurnal penutup.
 - e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan.
 - f. Pembuatan ayat jurnal pembalik
3. Tahap Pelaporan.
 - a. Laporan pada unit kerja organisasi.
 - b. Laporan konsolidasi organisasi

6.8.2 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusuri siapa yang menjadi *stakeholder* organisasi. Menurut Drebin et al. terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan, kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah:

1. Pembayar pajak (*taxpayers*).
2. Pemberi dana bantuan (*grantor*).
3. Investor.
4. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*).
5. Karyawan/ pegawai.
6. Pemasok (*vendor*).
7. Dewan legislatif.
8. Manajemen.
9. Pemilih (*voters*).
10. Badan pengawas (*oversight bodies*)

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga

kerja dan sumber daya material, dewan legislatif, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Lembaga pemerintah (*governing bodies*).
2. Investor dan kreditor.
3. Pemberi sumber daya (*resourceproviders*).
4. Badan pengawas (*oversight bodies*).
5. Konstituen

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi non bisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja.

Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. Mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Sementara itu, Hanley mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi dua belas kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih (*elected members*).
2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak.
3. Pelanggan atau klien.
4. Karyawan/pegawai.
5. Pelanggan dan pemasok.
6. Pemerintah.
7. Pesaing (*competitors*).

8. Regulator.
9. Pemberi pinjaman (*leaders*).
10. Donor dan sponsor.
11. Investor atau partner bisnis.
12. Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina :

1. Masyarakat pengguna jasa publik.
2. Masyarakat pembayar pajak.
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi.
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah.
5. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB.
6. Investor *using* dan *Country Analyst*. Generasi yang akan datang.
7. Lembaga Negara.
8. Kelompok Politik (Partai Politik).
9. Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD).
10. Pegawai pemerintah.

Serikat dagang sektor publik *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggungjawab.
2. Legislatif dan Badan Pengawas yang secara langsung mewakili rakyat,
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/ atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

6.8.3 Manfaat Penyajian Laporan Keuangan

Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitas.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional dengan tujuan untuk:
 - a. Menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit yang lain.
 - b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di dalam pemerintahan.
 - c. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
 - d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity and equality*).

6.8.4 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa karakteristik yang berbeda kedua sektor juga memiliki persamaan yaitu kedua-duanya membutuhkan standar akun keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan yaitu laporan keuangan pemerintah memakai *cash accounting* dan laporan keuangan sektor swasta memakai *accrual accounting*. Perbedaan Laporan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan
Laporan Keuangan Sektor Swasta

<i>Laporan Keuangan Pemerintah</i>	<i>Laporan Keuangan Sektor Swasta</i>
Fokus Finansial dan Politik.	Fokus Finansial.
Kinerja diukur secara financial dan nonfinansial.	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial.
Laporan diperiksa oleh <i>Treasury</i> independent.	Laporan keuangan diperiksa oleh auditor.
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat.	Pertanggungjawaban ke pada pemegang saham dan kreditur.

6.8.5 Jenis Laporan Keuangan

Jenis Laporan Keuangan

1. Laporan posisi keuangan (Neraca).

Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut :

- a. Properti, pabrik dan peralatan.
- b. Aktiva-aktiva tak berwujud.
- c. Aktiva-aktiva finansial.
- d. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas.
- e. Persediaan.
- f. Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer.
- g. Piutang dari transaksi pertukaran.
- h. Kas dan setara kas. Hutang pajak dan transfer.
- i. Hutang karena transaksi pertukaran.
- j. Cadangan (*provision*).
- k. Kewajiban tidak lancar.
- l. Partisipasi minoritas.
- m. Aktiva/ekuitas neto

2. Laporan kinerja keuangan (*Laporan Surplus/Devisit*).

Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut:

- a. Pendapatan dari aktivitas operasi.

- b. Surplus atau devisit dari aktivitas operasi.
 - c. Biaya keuangan (biaya pinjaman).
 - d. Surplus atau defisit neto saham asosiasi dan *joint venture* yang menggunakan metode ekuitas.
 - e. Surplus atau devisit dari aktivitas biasa.
 - f. Pos-pos luar biasa.
 - g. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto.
 - h. Surplus atau defisit neto untuk suatu periode.
3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto.
- Dari suatu entitas diantara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/defisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi:
- a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
 - b. Saldo untuk surplus dan defisit akumulasi pada awal periode dan pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode.
 - c. Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari setiap komponen aktiva atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

4. Laporan arus kas.

Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas.

5. Kebijakan akuntansi, dan catatan atas laporan keuangan

Catatan laporan keuangan dari entitas harus:

- a. Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya.
- b. Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sektor publik, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto.
- c. Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap ditetapkan.

Kebijakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas untuk disajikan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan.
2. Prinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian.
3. Investasi-investasi.
4. Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud.

5. Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain.
6. Persediaan yang dimiliki untuk dijual.
7. Aktiva bersyarat lain.
8. Kontrak-kontrak kontruksi.
9. Investasi *property*.
10. Instrumen finansial dan investasi.
11. Sewa guna usaha/*lease*.
12. Biaya penelitian dan pengembangan.
13. Persediaan untuk dikonsumsi.
14. Penyisihan.
15. Biaya manfaat pensiun.
16. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (*hedging*).
17. Definisi segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen.
18. Akuntansi inflasi.
19. Hibah pemerintah.

6.9 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu:

1. Laporan kinerja keuangan (Neraca).
2. Likuiditas pemerintah.
3. Komposisi investasi.
4. Kekayaan pemerintah.
5. Komposisi kewajiban.
6. Ravaluasi cadangan .
7. Komposisi hutang pension.
8. Laporan kinerja keuangan (surplus/devisit).
9. Efektifitas penarikan pajak.
10. Tingkat pelanggaran peraturan keuangan.
11. Komposisi pendapatan.
12. Komposisi pengeluaran.

13. Beban bunga pinjaman.
14. Rugi surplus transaksi keuangan.
15. Laporan arus kas.
16. Komposisi arus kas.
17. Tingkat panarikan pajak baik indivisual, organisasi maupun produk.
18. Komposisi pajak tidak langsung.
19. Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain.
20. Komposisi pengeluaran kas.
21. Komposisi pengeluaran investasi.
22. Komposisi pencairan investasi.
23. Komposisi likuiditas pertukaran mata uang

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur laporan keuangan, menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut agar memperoleh pengertian, pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan.

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Th (t)} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja Th (t)} - \text{Realisasi Belanja Th (t-1)}}{\text{Realisasi Belanja Th (t-1)}} \times 100\%$$

3. Analisis Derajat Desentralisasi

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Analisis Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sementara rumus untuk rasio efisiensi pajak daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

6. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

7. Analisis Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

8. Derajat Kontribusi BUMD

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

9. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

10. Analisis Varian Belanja

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran.

11. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi belanja th (t)} - \text{Realisasi belanja th (t-1)}}{\text{Realisasi belanja th (t-1)}} \times 100\%$$

12. Analisis Belanja per fungsi terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi belanja fungsi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

13. Analisis Belanja Operasi terhadap total belanja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

14. Analisis Belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

15. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

$$\text{Rasio belanja} = \frac{\text{Total belanja langsung}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Belanja langsung biasanya lebih besar dari belanja tidak langsung,

$$\text{Rasio belanja tidak langsung} = \frac{\text{Total belanja tidak langsung}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

16. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

17. Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$$\text{Rasio belanja} = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

18. Analisis Aset, terdiri dari:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Th (t)} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

19. Analisis Modal Kerja (*Working Capital*)

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

20. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rasio lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

21. Rasio Kas

$$\text{Rasio kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek(Investasi Jangka Pendek)}}{\text{Hutang lancar}}$$

22. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

$$\text{Rasio cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}}$$

23. *Working Capital to Total Asset Ratio*

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total asset}}$$

24. Rasio Solvabilitas

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}}$$

25. Rasio Utang terhadap Ekuitas

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Jumlah Ekuitas dana}} \times 100\%$$

26. Rasio Utang terhadap Aset Modal

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aset modal}}$$

27. Analisis pertumbuhan utang (*Growth of Public Debt*)

$$\text{Rumus} = \frac{\text{TiapPosUtangTh}(t) - \text{TiapPosUtangTh}(t-1)}{\text{Tiap Pos Utang Th}(t-1)}$$

28. Analisis Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio bunga utama} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bunga Utang Jangka Panjang}}$$

29. Analisis Rasio Utang terhadap Pendapatan Pajak Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Pendapatan pajak daerah}}$$

30. Analisis Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

31. Analisis Rasio Utang terhadap Total Pendapatan Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

32. Analisis pertumbuhan arus kas

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Arus kas Th (t)} - \text{Arus Kas Th (t-1)}}{\text{Arus Kas Th (t-1)}}$$

33. Analisis arus kas dari aktivitas operasi (KDO)

$$\text{Rumus} = \frac{\text{KDO Th (t)} - \text{KDO Th (t-1)}}{\text{KDO Th (t-1)}} \times 100\%$$

34. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Investasi

$$\text{Rumus} = \frac{\text{KDI Th (t)} - \text{KDI Th (t-1)}}{\text{KDI Th (t-1)}} \times 100\%$$

35. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

$$\text{Rumus} = \frac{\text{KDP Th (t)} - \text{KDI Th (t-1)}}{\text{KDI Th (t-1)}} \times 100\%$$

36. Analisis Arus Kas Bebas

Arus Kas Bebas = Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi – Belanja Modal

Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu:

1. *Indikator pertumbuhan ekonomi.*

- a. Pendapatan nasional bruto per kapita.
- b. Tingkat konsumsi per kapita.
- c. Volume ekspor.
- d. Harga-harga (tingkat inflasi)

2. *Indikator Struktural*

- a. Persentase tabungan domestik bruto terhadap pendapatan nasional bruto.
- b. Persentase domestik bruto terhadap PNB.
- c. Persentase barang-barang primer terhadap total ekspor.
- d. Konsumsi energi per kapita

3. *Indikator sosial.*

- a. Tingkat kematian.
- b. Tingkat kematian bayi.
- c. Konsumsi kalori per kapita.
- d. Tingkat pendidikan dasar.
- e. Tingkat pendidikan menengah

6.10 Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran APBN, di mana dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per tanggal 31 Desember untuk neraca, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember untuk laporan arus kas dan laporan realisasi anggaran. Batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan APBN setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Unsur-unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah:

- a. Pendapatan.
- b. Belanja.

- c. Transfer.
 - d. Pembiayaan.
 - e. Neraca (*Balance Sheet*), unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statements*). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
 - b. Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga, `informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro ini tidak harus diungkapkan.
 - c. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
 - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan.
 - e. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi.
 - f. Informasi rinci tentang pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disajikan dalam LRA, pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca, dan pos-pos arus kas masuk dan keluar yang disajikan dalam LAK.
 - g. Kejadian penting setelah tanggal pelaporan.
 - h. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, Y. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Badung Bali: CV. Noah Aletheia
- Gheorghe C. F., Nicolae P. V., and Dorel. (2018). *Characterization of Accounting System of Community Operators of Public Utilities Services*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 62. 114 – 121
- Nasution, D. A. D. (2019). *Akuntansi Sektor Publik . Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2014). PMK-270/PMK.05/2014. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

BAB VII

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Oleh Dini Haryati, S.E., M.Ak., CPMP., CSEM., CPHA., APHA

7.1 Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan

alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment systems*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, Sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

7.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang
3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi mencapai *goal congruence*

4. Untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

7.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi
7. Membantu memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

7.4 Informasi yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja

7.4.1 Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada:

1. Varians Pendapatan (*Revenue Variance*)
2. Varians Pengeluaran (*Expenditure Variance*)
3. Varians Belanja Rutin (*Recurrent Expenditure Variance*)
4. Varians Belanja Investasi/Modal (*Capital Expenditure Variance*)

Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan indentifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen paling bawah.

7.4.2 Informasi Non-Finansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh organisasi dewasa ini adalah *Balanced Scorecard*. Dengan *Balanced Scorecard*, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja akan tetapi juga aspek nonfinansial. Pengukuran dengan metode *Balanced Scorecard* melibatkan empat aspek yaitu:

1. Perspektif Finansial (*financial perspective*)
2. Perspektif kepuasan pelanggan (*customer persfective*)
3. Perspektif efisiensi proses internal (*internal process efficiency*)
4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth persfective*)

Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*) atau sering dinamakan *key success factor*, *key result factor*, atau *pulse point*. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik antara lain:

1. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi
2. Sangat *volatile* dan dapat berubah dengan cepat

3. Perubahannya tidak dapat diprediksi
4. Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara *surrogate*). Sebagai contoh, kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung; akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya misalnya jumlah aduan, tuntutan, dan demonstrasi dapat dijadikan variabel kunci.
5. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera

Tabel 7.1 Contoh Variabel Kunci

Dinas/Unit Kerja	Variabel Kunci
Rumah sakit dan hotel	Tingkat hunian kamar
Klinik kesehatan	Jumlah pelanggan yang dilayani per hari
Perusahaan listrik Negara	KWH yang terjual
Perusahaan Telekomunikasi	Jumlah pulsa yang terjual
Perusahaan air minum	Jumlah debit air yang terjual
DLLAJ	Jumlah alat angkutan umum
Pekerjaan umum	Panjang jalan yang diperbaiki Panjang jalan yang dibersihkan
Kepolisian	Jumlah kriminalitas yang ditangani
DPR/DPRD	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani
Dispenda	Jumlah pendapatan yang terkumpul

7.5 Peranan Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indikator tersebut kemudian dibandingkan dengan target kerja atau standar kerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa *feedback*, *reward*, dan *punishment* Kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indikator*). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. *Critical success* faktor tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi.

Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan faktor yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.

7.5.1 Pengembangan Indikator Kinerja

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut:

- a. Biaya pelayanan (*cost of service*)
- b. Penggunaan (*utilization*)
- c. Kualitas dan standar pelayanan (*Quality and standards*)
- d. Cakupan pelayanan (*coverage*) dan
- e. Kepuasan (*satisfaction*)

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang

diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi.

Tabel 7.2 Contoh Pengembangan Indikator Kerja

Dinas/Unit Kerja	Variabel Kunci
Rumah Sakit	Biaya total rata-rata per pasien yang masuk Biaya rata-rata rawat jalan per pasien yang masuk Biaya rata-rata pelayanan medis dan paramedis per pasien yang masuk Biaya rata-rata pelayanan umum (nonklinis) per pasien yang masuk Penggunaan fasilitas Rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit Jumlah pasien rata-rata per bed per tahun Rasio antara pasien baru dengan pasien lama yang masuk kembali Proporsi tingkat hunian
Klinik Kesehatan	Jumlah pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total penduduk untuk wilayah tertentu
Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki/total panjang jalan Panjang jalan yang disapu atau dibersihkan/total panjang jalan Kondisi jalan Keamanan jalan (<i>road safety</i>)
Kepolisian	% Jumlah kriminalitas yang ditangani/jumlah kriminal yang terdeteksi/tercatat % Penurunan jumlah kecelakaan atau pelanggan lalu lintas % Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani/jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk
DPR/DPRD	% Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang ditangani/jumlah total aspirasi yang masuk Jumlah rapat yang dilakukan perbulan/tahun Jumlah peraturan yang dihasilkan per bulan/tahun

	% Jumlah Peserta rapat total anggota
Dispenda	% Jumlah pendapatan yang terkumpul/potensi

Indikator penggunaan (*utilization*) pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya biasanya berupa volume absolute atau persentase tertentu. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif.

Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung bagi pemerintah daerah metode penjarangan aspirasi masyarakat (*need assessment*) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator tersebut memerlukan kerja sama antar unit kerja.

7.6 Indikator Kinerja dan Pengukuran *Value For Money*

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam

melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*.

Istilah “ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi
Kinerja suatu kegiatan program dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi dan standardisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*.

5. Mekanisme Sumber Daya Manusia

Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi

Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
5. Untuk menunjukkan standar kinerja
6. Untuk menunjukkan efektivitas
7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan
8. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan input finansial (biaya) dengan output nonfinansial, misalnya biaya unit (*unit cost statistics*). Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah *unit cost statistics* yang spesifik untuk unit kerjanya. *Unit cost statistics* tersebut misalnya adalah:

Untuk Setiap Pelayanan

1. Biaya Pelayanan per 1000 penduduk
2. Tenaga kerja per 1000 penduduk

Untuk pelayanan tertentu ditambah dengan ukuran lain, misalnya:

Pendidikan

1. Rasio guru/murid atau dosen/mahasiswa
2. Biaya per siswa
3. Subsidi per siswa/mahasiswa per semester/tahun

Jalan Umum

1. Biaya pemeliharaan per kilometer/panjang jalan
2. Biaya pemeliharaan per kilometer/ukuran lain selain panjang jalan

Perumahan

1. Biaya manajemen dan pemeliharaan per rumah
2. Biaya konstruksi per rumah

Angkutan Kereta Api

1. Persentase keterlambatan waktu dari jadwal pemberangkatan
2. Persentase keterlambatan waktu sampai di tempat tujuan
3. Persentase kereta api yang batal diberangkatan
4. Jumlah kecelakaan kereta api

Ukuran-ukuran statistik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat pembaca anggaran dan laporan keuangan pemerintah yang bukan ahli di bidang manajemen keuangan publik sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Bagi pemerintah, angka-angka statistik tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kinerja, menilai tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja serta untuk mengetahui sebab-sebab inefisiensi dan ketidakefektifan unit kerja yang bersangkutan. Unit *cost statistics* sebagai bentuk indikator

kinerja tidak saja berfungsi sebagai benang merah untuk mengukur kinerja, akan tetapi juga mendorong untuk dilakukannya investigasi lebih detail atas hasil yang dicapai oleh suatu unit kerja.

7.7 Pengukuran *Value For Money*

Kinerja pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu kualitas kerja terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan (*fitness for purposes*), konsistensi, dan kepuasan publik (*public satisfaction*). Kepuasan masyarakat dalam konteks tersebut dapat dikaitkan dengan semakin rendahnya komplain dari masyarakat.

7.8 Pengembangan Indikator *Value For Money*

Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu: indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain indikator kinerja berperan untuk menunjukkan memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting. Selain itu indikator kinerja akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran.

7.8.1 Tiga pokok bahasan dalam indikator *value for money*.

Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai efisiensi, ekonomi dan efektivitas program dan kegiatan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E.

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*).

2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitasnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cosh of output*), dan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai

dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*Spending well*).

3. Efektifitas

Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dari uraian di atas *value for money* sangat berkaitan. Ekonomi membahas masukan (*input*), efisiensi membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektifitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

7.8.2 Indikator efektivitas biaya (*Cost-Effectiveness*)

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai target. Sedang dipihak lain, program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi tidak dicapai dengan cara ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif maka program tersebut dikatakan *cost-effectiveness*.

7.9 Langkah-Langkah Pengukuran *Value For Money*

7.9.1 Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif, pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:

1. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
2. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?

3. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

7.9.2 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak hanya dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif.

7.9.3 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi dari yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7.9.4 Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu:

1. Peran Retrospektif

Peran Retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, analisis retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik (*good management*). bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang

dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program atau proyek yang perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

2. Peran Prospektif

Terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang sebagai peran prospektif, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis Retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga bukti tersebut digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu dilaksanakan dan metode mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

7.10 Pengukuran Kinerja dengan *Balance Scorecard*

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh pesatnya teknologi komunikasi dan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya perubahan dalam menjalankan kegiatan usaha dimana kepuasan pelanggan menjadi sasaran strategis bagi perusahaan agar dapat tumbuh berkembang dan tetap eksis dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Dengan kondisi tersebut maka untuk dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang berfokus pada kepuasan pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran juga pertumbuhan sehingga evaluasi kinerja dengan hanya melihat aspek keuangan saja menjadi kurang relevan. Untuk itu perlu digunakan pengukuran kinerja baru yang

menyeimbangkan pengukuran finansial dan nonfinansial yang disebut *balanced scorecard*.

Balanced scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. *Balanced scorecard* melengkapi pengukuran finansial atas kinerja dimasa lampau dengan pengukuran non finansial sebagai pemicu kinerja dimasa mendatang. Pendekatan *balanced scorecard* dimulai dengan sebuah premis bahwa ukuran keuangan tidak cukup untuk mengelola organisasi karena ukuran keuangan hanya bercerita tentang masa lalu. Ukuran keuangan dianggap kurang memberikan arah dalam penciptaan nilai melalui investasi dalam pelanggan, *supplier*, pekerja, teknologi atau inovasi.

Tujuan dan ukuran dalam *balanced scorecard* yang berasal dari misi dan strategi organisasi memberikan gambaran tentang kinerja organisasi melalui empat perspektif. Konsep *balanced scorecard* berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. Kartu skor merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel dimasa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan karyawan di masa depan dibandingkan dengan hasil kerja sesungguhnya. Hasil kerja ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja karyawan yang bersangkutan.

Balanced scorecard sebagai suatu pendekatan baru sistem pengukuran kinerja diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton untuk dapat memberikan usulan seperangkat indikator kinerja yang diturunkan dari visi, misi dan strateg perusahaan dengan menggunakan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan dan ukuran. *Balanced*

scorecard menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran eksternal para pemegang saham dan pelanggan dengan berbagai ukuran internal proses bisnis penting inovasi serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Balanced scorecard sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis sebagai sistem pengukuran kinerja yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perilaku manusia di dalam maupun luar organisasi. *Balanced scorecard* tetap mempertahankan ukuran keuangan sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis. Balanced scorecard memberi para eksekutif kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan isi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D. (2017). *Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Andriani, S. (2012). *Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Arfan, D. A. (2014). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ferina, I. S., and Fika, A. (2013). *Penilaian Kinerja Dengan Menerapkan Indikator Value For Money Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009-2011*. Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sriwijaya.
- Khikmah, A. (2014). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Liando, H. S. et al. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan metode Value For Money*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado.
- Nada, S. L., and Riharjo, I. B. (2016). *Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Nugrahani, T. S. (2007). *Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal AKMENIKA UPY.

- Subastian, A. (2013). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Melalui Pendekatan Value For Money*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Suwandi, M. M. (2017). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Value For Money*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

BAB VIII

AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Oleh Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax.

8.1 Pendahuluan

Reformasi di berbagai bidang yang diperkenalkan sejak tahun 1998 telah mengubah secara mendasar departemen akuntansi pemerintah Indonesia. Perubahan signifikan ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam proses pelaksanaan hak pengelolaan anggaran, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan di bawah tanggung jawab pelaksanaan anggaran negara seperti yang tertuang pada UU No.17 Tahun 2003 mengenai dana anggaran negara pasal 8, sedangkan pada Pasal 9 menerangkan bahwa Menteri yang bertugas menggunakan properti lembaga yang dipimpinnya memiliki kewajiban untuk menyusun dan disampaikannya laporan keuangan lembaga dalam negeri yang dipimpinnya.

Peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut menjadi landasan utama penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Menurut buku *United Nations, The Manual of Government Accounting*, ciri atau syarat utama dari akuntansi pemerintahan adalah dalam akuntansi pemerintah pusat diwajibkan dapat memberi informasi yang dapat diverifikasi (yaitu, dapat dilacak dan diaudit), yang menyediakan transaksi mengenai dana, harta, kewajiban dan modal dana pemerintah pusat dan menyediakan informasi akuntansi yang tepat waktu dan dapat

diandalkan yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah non-pusat seperti DPR dan manajer di berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, akuntansi pemerintah pusat dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

8.2 Pengertian Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari rangkaian proses manual atau dioperasikan menggunakan komputer diawali dari data yang dikumpulkan, melakukan pencatatan dan peringkasan data hingga pelaporan kondisi keuangan dan operasional pemerintah pusat (Mahardini and Miranti, 2018). Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan laporan keuangan pemerintah seperti proses pencatatan, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi keuangan pemerintah, dan menyediakan layanan untuk menafsirkan informasi keuangan (Ariawan *et al.*, 2019).

8.3 Dasar Hukum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Dasar hukum sistem akuntansi pemerintah pusat meliputi (BPKP, 2022) :

1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
4. PMK No.196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
5. PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

6. PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah
7. PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

8.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah Pusat

Ruang lingkup SAPP dalam hal ini instansi pemerintah senior dan instansi pelaksana dan pemerintah daerah yang menerima uang dari pendapatan yang dianggarkan dan anggaran belanja negara yang terkait dengan dana desentralisasi dan pelimpahan bantuan, sehingga tidak berlaku untuk daerah (Kejaksaan, 2011). Pemerintah/lembaga keuangan negara pada peraturan yang berlaku pada menteri keuangan untuk semua organisasi pemerintahan pusat dan organisasi akuntansi pemerintah daerah yang terlibat dalam konkretisasi yang dipercayakan dana atau tugas pembantuan yang pendanaannya didistribusikan antara APBN dan anggaran pelaksanaan dan dalam anggaran perhitungan. Yang bukan termasuk dalam aturan yang berlaku pada Menteri Keuangan (Kejaksaan, 2011) sebagai berikut : (1). Penerimaan pendapatan pemerintah daerah yang anggarannya di dapat dari belanja daerah; (2). Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari : PT dan Perusahaan umum.

8.5 Tujuan Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem pemerintah pusat memiliki tujuan (Hasanah and Fauzi, 2017), yaitu:

1. Melindungi harta pemerintah pusat dan lembaganya dengan mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangan berimbang dengan praktik dan ketentuan yang berlaku umum

2. Menyediakan informasi dengan akurat serta tepat terkait kegiatan dana yang dianggarkan pemerintah pusat, baik di tingkat regional maupun di masing-masing lembaga, sebagai dasar untuk evaluasi kinerja, untuk menetapkan kepatuhan terhadap persetujuan *budget*, dan untuk menentukan akuntabilitas.
3. Menyediakan laporan posisi keuangan lembaga pemerintahan pusat dengan menyeluruh.
4. Menyusun informasi keuangan guna mendukung rencana serta pengendalian aktivitas keuangan dan pemerintahan yang efisien.

8.6 Karakteristik Akuntansi Pemerintah Pusat

Berdasarkan pada PMK No.171 PMK 05 Tahun 2007 terkait dengan pemerintah pusat bahwa SAPP mempunyai dua subsistem, yaitu :

1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
Sistem ini diselenggarakan oleh departemen keuangan sebagai *state general ledger (Chief Financial Officer)*. SA-BUN memiliki 7 subsistem yaitu : Sistem Akuntansi Pusat (SiAP); Utang dan Hibah Pemerintah (SAUP dan H); Transfer Daerah (SA-TD); Penerus Pinjaman (SA-PP); Investasi Pemerintah (SA-IP); Transaksi Khusus (SA-TK); Biaya Lainnya (SA-BL). Laporan yang disusun dari SA-BUN bentuknya adalah laporan realisasi anggaran yang didalamnya terdapat pendanaan, laporan arus kas, neraca, CALK.
2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Sistem ini diselenggarakan oleh departemen dalam negeri. Data dikelola guna menyusun laporan keuangan berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan dan CALK. Pada sistem ini terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SIMAK-BMN meliputi akuisisi, modifikasi dan penghapusan akun BMN guna menunjang SAK. Selain itu,

menghasilkan laporan, buku, kartu berupa informasi manajemen disetiap pengelolaannya.

8.7 Ciri Pokok Akuntansi Pemerintah Pusat

Adapun ciri pokok akuntansi pemerintahan pusat adalah (Anggraini *et al.*, 2017):

1. Standar Akuntansi

Yang dipakai pada akuntansi pemerintah merupakan standar kas untuk pendapatan yang diakui, pengeluaran dan dana dalam laporan realisasi anggaran, aset di neraca, kewajiban dan ekuitas. Sebuah kriteria periode untuk pengakuan. Standar kas merupakan standar akuntansi untuk transaksi yang diakui yang berpengaruh pada peristiwa lain ketika kas/setara kas diterima/dibayarkan. Basis akrual merupakan standar akuntansi dimana terjadinya transaksi/kejadian lain ketika transaksi itu terjadi, terlepas dari kapan kas/setara kas diterima/dibayarkan.

2. Sistem Akuntansi Konsolidasi.

Sistem Pembukuan berpasangan yang menurut persamaan akuntansi, harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Dan setiap transaksi dicatat dengan debit dari akun dan kredit ke akun terkait.

3. Dana Tunggal

Merupakan Kegiatan Akuntansi yang kegiatan operasional berlandaskan dan terkait undang-undang APBN. Dana tunggal ini yang mana penerimaan dan pengeluaran pemerintah dicatat sebagai satuan tunggal.

4. Sentralisasi Akuntansi

Pelaporan akuntansi pada kegiatan keuangan instansi secara progresif dilakukan oleh departemen akuntansi baik dari kantor pusat atau regional.

5. Bagan Estimasi Standar SAPP

Keuangan sebagai tujuan penganggaran merupakan standar yang telah ditetapkan kementerian.

8.8 Standar Akuntansi Pemerintah Pusat

SAPP merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk pengumpulan, evaluasi, penyusunan, penyampaian dan pengungkapan transaksi keuangan sehubungan dengan disusunnya laporan keuangan, SAPP terdiri dari 2 sub kategori, yaitu (Kejaksanaan, 2011) :

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)

adalah sub dari SAPP dengan penyelenggara Departemen Akuntansi Informasi (DIA). SiAP digunakan untuk menyusun laporan keuangan saat berlangsungnya APBN bagi pemerintah pusat SiAP terdiri dua sub kategori, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SiAP menangani transaksi kas umum negara dan *billing* umum. SiAP terdiri dari dua bagian (Anggraini *et al.*, 2017), yaitu: sistem akuntansi kas umum negara (terdapat laporan arus kas dan neraca dari kas umum yang merupakan bagian dari akuntansi pusat), dan sistem akuntansi umum (sub kategori yang berisi informasi laporan realisasi anggaran pusat).

2. Sistem Akuntansi Intansi (SAI)

adalah sub dari SAPP dan menyusun laporan keuangan sebagai kewajiban badan atas digunakannya anggaran. SAI terdiri dua sub kategori, Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

8.9 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan akuntansi yang dinilai dari kinerja APBN termasuk LRA, Laporan Arus Kas, Neraca, CALK. Laporan ini disusun menyesuaikan standar internasional pengelolaan negara. LKPP dirilis pada 2004 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat saat Indonesia merdeka. Sejak 2015 akrual basic sudah diterapkan pada kas, sehingga laporan keuangan juga disesuaikan dengan basis akuntansi akrual. Adapun komponen /jenis laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual yaitu (Astuti, 2022):

1. Laporan kinerja anggaran yang meliputi : LRA, laporan perubahan saldo pada anggaran berlebih
2. Laporan finansial yang meliputi: neraca, laporan operasional (melengkapi siklus akuntansi pelaporan berdasarkan akuntansi akrual), laporan arus kas, laporan ekuitas.

8.10 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan akuntansi lembaga administrasi pusat yang diatur pada peraturan ini disusun menurut SAP menurut metode akuntansi akrual. Adapun kebijakan akuntansi pemerintahan pusat, terdiri dari (Kementerian Keuangan RI, 2022):

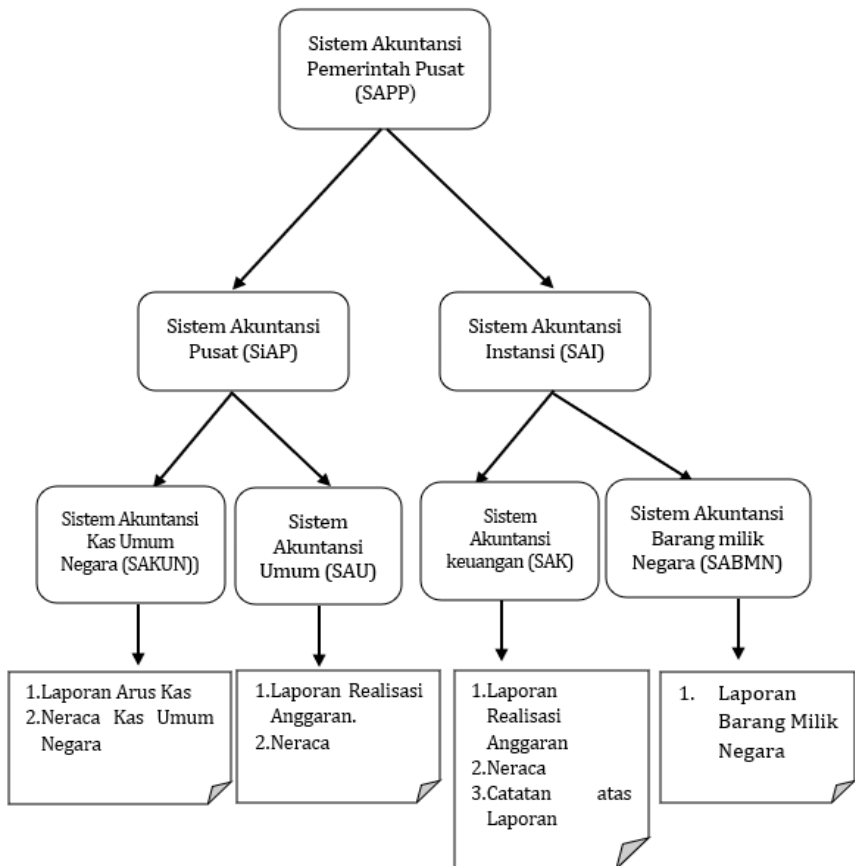
1. Pengantar kebijakan akuntansi;
2. Pelaporan keuangan;
3. Setara kas dan kas;
4. Pemodalan;
5. Akuntansi piutang;
6. Akuntansi persediaan;
7. Akuntansi aktiva tetap;
8. Hutang atau kewajiban;
9. Akuntansi modal atau ekuitas;
10. Pendapatan;

11. Belanja, transfer dan biaya;
12. Kebijakan akuntansi beban;
13. Kebijakan akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) /Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) /SAL; dan
14. Akuntansi transitoris.

SAPP ini berperan dalam meringankan departemen akuntansi serta pelaporan bagi pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan tahunan bagi pusat, kementerian keuangan dan kementerian negara serta Lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perbandingan laporan keuangan di tiap periode dan tiap unit pelaporan. Selain itu, menjadi pedoman konkretisasi sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

8.11 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem akuntansi untuk pemerintah pusat (SiAP) merupakan rangkaian proses manual diolah menggunakan komputer yang bermula dari pengikhtisaran, pencatatan, maupun pelaporan posisi keuangan yang ditujukan pada BUN (Bendahara Umum Negara), kemudian mengolah transaksi kas umum negara serta akuntansi lainnya (Anggraini *et al.*, 2017).



Gambar 8.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sumber: (Anggraini et al., 2017)

Sistem akuntansi pusat dilakukan oleh:

1. KPPN yang melakukan proses data transaksi input dan *output*
2. Kantor pelayanan perbendaharaan negara khusus yang melaksanakan transaksi pengeluaran dari bantuan luar (asing) / BLN
3. DPKN (Direktorat Kas Negara) guna menangani pendapatan serta pengeluaran BUN dari kantor pusat

4. DIA memproses APBN dan memverifikasi pendapatan dan pengeluaran BUN dari kantor pusat.

Sistem akuntansi pusat memiliki serangkain proses dalam memanifestasikan laporannya, yaitu (Fahmawati, 2022) :

1. Kantor pelayanan perbendaharaan negara yang menyusun Laporan Arus Kas (LAK), LRA, Neraca di wilayah kerja dan laporannya diberikan ke kantor jenderal perbendaharaan pada tiap bulan
2. Kantor wilayah perbendaharaan Direktorat Jenderal menyusun LAK, LRA, sistem akuntansi umum, dan neraca kas umum negara pada tingkat daerah kerjanya. Dan laporan keuangan tersebut di sampaikan kepada direktorat jendral perbendaharaan.
3. Direktorat jenderal perbendaharaan menyusun LAK, LRA, sistem akuntansi umum, neraca kas umum yang merger laporan keuangan di semua unit direktorat jenderal perbendaharaan baik di daerah atau pusat.

8.12 Siklus Akuntansi Pemerintah Pusat

Siklus akuntansi negara mencakup tahapan berikut (Windarta, 2015):

1. Penyusunan Neraca Pendahuluan.
Langkah ini merupakan langkah awal dan menjadi dasar untuk memulai *trading*. Menurut Buletin Teknis, neraca pendahuluan Badan SAP adalah hasil akhir dari langkah dimana neraca pendahuluan ini memuat tentang aset, kewajiban serta ekuitas dana.
2. Menyetujui Pendaftaran APBN
APBN memuat rencana keuangan tiap unit manajemen pusat dalam 1 periode anggaran termasuk penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Langkah ini meliputi

pencataan, penjurnalan pos pendapatan dan pengeluaran, pendanaan. Subsistem yang melakukan adalah Sistem Akuntansi Umum, Perbendaharaan Negara di bawah sistem akuntansi pusat. Akun terkait termasuk perkiraan pendapatan, alokasi biaya, surplus/defisit, perkiraan pendapatan penggalangan dana, perkiraan biaya penggalangan dana, dan pendanaan bersih. Sedangkan jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan APBN.

3. Pendaftaran DIPA setelah APBN disetujui

Kementerian keuangan (unit pusat) mengklasifikasikan unsur yang ada pada APBN kepada entitas yang dianggarkan dalam bentuk Daftar Isian pada Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA ini akan dicatat pada subsistem SAU dan SAB yang nantinya direcord pada sistem akuntansi lembaga. Akun ini meliputi: perkiraan pendapatan diamortisasi, alokasi beban, eksekusi pendapatan pembiayaan, alokasi beban pada pembiayaan serta piutang atau utang kas pada negara.

4. Pencatatan Kegiatan Pendapatan

Pelaksanaan anggaran diantaranya adalah transaksi penerimaan, pengeluaran atau perubahan ekuitas bersih. Sistem akuntansi umum ikut serta jika terdapat perubahan kekayaan bersih dan SAI terkitab. Dengan menilai apakah transaksi yang terjadi adalah transaksi yang mengubah nilai aset tertentu pada entitas yang bersangkutan. Fase ini memiliki banyak jenis transaksi, karena fase ini mencakup pelaksanaan semua item anggaran. Akibatnya, akun yang termasuk akan banyak, bergantung pada rincian akuntansi.

5. Menetapkan Neraca Saldo Percobaan

Pada akhir periode biasanya setiap tahun, tetapi bisa juga bulanan, jika perlu, neraca saldo ditarik, yang mencerminkan semua transaksi untuk periode yang relevan.

Pada neraca saldo memuat tentang unit akuntansi, letak akun yang akan disusun hingga selesainya laporan keuangan pemerintah pusat

6. Menyusun Jurnal Penyesuaian

Penyesuaian dilakukan pada hak/kewajiban keuangan di periode berjalan seperti masalah kumulatif hingga ditanggihkan, koreksi kesalahan dan lain lain.

7. Menyusun Jurnal Penutup

Jurnal penutup dilakukan untuk menyelaraskan akun yang timbul pada akun nominal dan riil. Akun nominal termasuk akun bisnis dan anggaran. Akun nominal ditutup pada akhir periode dan dilaporkan pada neraca.

8. Laporan yang disusun melalui proses diatas menjadi lengkap termasuk laba rugi kegiatan yang dianggarkan, neraca, laporan arus kas.

8.13 Perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintah di Indonesia

Sistem akuntansi publik telah membawa sejumlah modifikasi serta perbaikan dengan dikeluarkannya KMK RI No. 476/KMK.01/1991 tanggal 21 Mei 1991 tentang Akuntan Publik hingga 2005, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan No. 59/PMK.06/2005 tentang Rezim Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Pusat (Pratama *et al.*, 2018). Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah menggunakan akrual basis. Pelaksanaan ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.

Dalam prosesnya sistem akuntansi pemerintah yang sebelumnya mengalami permasalahan, dalam praktiknya akuntansi pemerintah hanya mampu memenuhi akuntabilitas, namun tujuan regulasi belum dapat memberikan informasi yang

cukup. Berdasarkan pada pertimbangan ini, sistem akuntansi pemerintah pusat telah mengembangkan tujuan utama (Kementerian Keuangan RI, 2022) yaitu:

1. Menyusun sistem akuntansi pemerintah dengan informasi yang terbaru
2. Mengembangkan standar dan prinsip akuntansi pemerintah
3. Pembentukan pusat akuntansi di kementerian keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. *et al.* (2017) 'Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pertanggungjawaban keuangan Instansi', *Jurnal pemberdayaan masyarakat madani (JPMM)*, 1(1), p. 132. doi: doi.org/10.21009/JPMM.001.1.10.
- Ariawan, I. G. *et al.* (2019) 'Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1), p. 43. doi: 10.23887/jinah.v7i1.19851.
- Astuti, D. P. (2022) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*, ditjenpktn.kemendag.go.id.
- BPKP (2022) *Dasar Hukum SAPP*, <https://www.bpkp.go.id/>. Available at: <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/285/Sistem-Akuntansi-Pemerintah-Pusat-SAPP.bpkp>.
- Fahmawati, S. (2022) 'Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat', www.kompasiana.com. Available at: <https://www.kompasiana.com/sucifahmawati0323/62e4cf97a51c6f4a29724753/sistem-akuntansi-pemerintah-pusat-dan-pelaksanaan-anggaran>.
- Hasanah, N. and Fauzi, A. (2017) *Akuntansi Pemerintahan*. Jilid 1. Bogor: In Media. Available at: http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTANA SI_PEMERINTAHAN.pdf.
- Kejaksanaan (2011) *Modul Sistem Pemerintahan Pusat*, <https://www.kejaksanaan.go.id/>. Available at: <https://www.kejaksanaan.go.id/upldoc/produk/km/modul>

sistem akuntansi pemerintah pusat.pdf.

Kementerian Keuangan RI (2022) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta. Available at: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6-93b5b80512dd/22_PMK.05_2022Per.pdf.

Mahardini, N. Y. and Miranti, A. (2018) 'Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015', *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), p. 22. doi: 10.30656/jak.v5i1.500.

Pratama, A. *et al.* (2018) 'Prodi ilmu pemerintahan fisip unikom', *Jurnal Agregasi*, 6, p. 181.

Windarta, W. R. (2015) 'Narasi Siklus Akuntansi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan'.

BAB IX

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Oleh Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CCT.

9.1 Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ditetapkannya satu paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebelum paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut ditetapkan, Pemerintah telah melakukan usaha-usaha pengembangan bidang keuangan daerah dengan menetapkan UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan PP 105 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dalam implementasinya mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain karena pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah belum dilengkapi dengan ketentuan atau pedoman lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan telah membentuk Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :355/KMK.07/2001. Kelompok Kerja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah dari tim tersebut telah menghasilkan sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sebagai *prototype* sistem akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya

Menteri Dalam Negeri telah berupaya mengisi kekosongan peraturan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, maka pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang memadai dan andal untuk melakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Selanjutnya dalam tahun 2004 telah ditetapkan pula UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk menyusun laporan keuangan yang memadai dan andal, diperlukan sistem akuntansi Keuangan daerah (Keuda) yang dapat memenuhi kebutuhan pihak internal dan eksternal Pemda. Sistem akuntansi Keuda pada dasarnya berisi ketentuan yang mengatur sistem dan prosedur akuntansi yang mencakup pengorganisasian formulir, catatan dan laporan keuangan oleh unit-unit organisasi Pemda. Sistem akuntansi Keuda juga mencakup sistem dan prosedur pengurusan administratif dan kebendaharawanan dalam rangka mekanisme pengelolaan Keuda yang mengakibatkan bertambah dan atau berkurangnya sumber-

sumber ekonomis Daerah yang berupa uang, barang atau jasa. Sistem akuntansi Keuda yang baik disamping akan menghasilkan laporan keuangan yang memadai dan andal untuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja, dimaksudkan pula untuk meningkatkan keamanan sumber-sumber ekonomis yang dikelola oleh Pemda dan meningkatkan efisiensi biaya pengurusan administratif dan kebendaharaan dalam rangka pengelolaan Keuda. Penyusunan Sistem akuntansi Keuda harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan manajemen Pemda yang akan melaksanakannya.

Dengan demikian menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan kewajiban. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari laporan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang kemudian akan dilakukan konsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah

9.2 Sistem Akuntansi SKPD

SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, bisa berupa Badan, Dinas atau Kantor. SKPD yang merupakan entitas akuntansi, mempunyai kewajiban dalam menyusun laporan keuangan, yang nantinya akan digabungkan dengan entitas pelaporan. Proses akuntansi dimulai dari pencatatan atas transaksi penerimaan, pengeluaran atau transaksi lainnya yang tidak terkait dengan kas. Setelah dilakukan pencatatan dalam buku jurnal, secara periodik akan diposting ke dalam buku besar/pembantu untuk kemudian menyusun neraca saldo yang akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan yang meliputi:

1. Neraca SKPD,
2. Laporan Realisasi Anggaran,
3. Laporan Operasional,
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Permendagri 64 Tahun 2013, mengatur sistem dan prosedur akuntansi pemda yang meliputi:

1. Akuntansi pendapatan,
2. Akuntansi Belanja dan Beban,
3. Akuntansi Aset,
4. Akuntansi Kewajiban, dan
5. Akuntansi Penyesuaian dan Koreksi.

9.2.1 Akuntansi Pendapatan

Akuntansi Pendapatan merupakan serangkaian proses dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pendapatan pada SKPD. Pendapatan di dalam SKPD ada 2, yaitu pendapatan yang merupakan realisasi dari APBD yang nantinya akan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan-LO yang merupakan hak dari pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas. Rekening pendapatan-LO muncul sebagai konsekuensi akibat adanya basis akrual.

1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencatatan pendapatan adalah:

- a. Surat Setoran Pajak
- b. Surat Setoran Restribusi
- c. Surat Tanda Setoran

- d. Surat Tanda Bukti Pembayaran
 - e. Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan SKPD
 - f. Rekapitulasi Penerimaan Harian
2. Fungsi Terkait
- Fungsi terkait dalam pencatatan akuntansi pendapatan di SKPD adalah Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk melakukan penatausahaan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan fungsi akuntansi PPK SKPD yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan SKPD
3. Catatan Akuntansi
- Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:
- a. Buku jurnal
 - b. Buku Besar
 - c. Buku Pembantu
4. Metode Penjurnalan
- Metode penjurnalan berbasis akrual dilakukan sebagai bagian dari siklus akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari *budgetary reports* dan *financial reports* maka jurnalnya ada 2 metode yaitu jurnal anggaran untuk pelaporan anggaran dan jurnal finansial untuk pelaporan finansial.

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Tidak dilakukan penjurnalan	Piutang Pajak Pendapatan Pajak Daerah-LO
Penerimaan Pajak Daerah	Surplus/Defisit-LRA Pendapatan Pajak Daerah-LRA	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi	Surplus/Defisit-LRA Pendapatan Retribusi-LRA	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi-LO
Menyetorkan Pendapatan ke Kasda	Tidak dilakukan penjurnalan	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan

9.2.2 Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah (PSAP No. 2), sedangkan pengertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PSAP No. 12). Belanja merupakan akun LRA sedangkan beban merupakan akun Laporan Operasional-LO yang merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan yang berbasis akrual.

1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencatatan belanja atau beban adalah:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana
- b. SPJ dari Bendahara Pengeluaran

2. Fungsi Terkait

Fungsi yang terkait dalam akuntansi belanja dan beban adalah:

- a. PA
- b. Bendahara Pengeluaran
- c. PPK SKPD
- d. Kuasa BUD

3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

- a. Buku jurnal
- b. Buku Buku Besar
- c. Buku Pembantu

4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Menerima SP2D-LS Gaji	Belanja Gaji-LRA Surplus/Defisit-LRA	Beban Gaji-LO R/K PPKD
Menerima SP2D-LS Belanja Modal	Belanja Modal-LRA Surplus/Defisit-LRA	Aset Tetap R/K PPKD
Menerima SP2D-LS Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa-LRA Surplus/Defisit-LRA	Beban Barang dan Jasa-LO R/K PPKD
Menerima SP2D UP/GU/TU	Tidak dilakukan penjurnalan	Kas di Bendahara Pengeluaran R/K PPKD
Mencatat transaksi belanja selain belanja modal	Belanja-LRA Surplus/Defisit-LRA	Beban-LO Kas di Bendahara Pengeluaran

9.2.3 Akuntansi Aset

Akuntansi aset tetap merupakan suatu rangkaian proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban APBD atas transaksi aset tetap.

1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi aset adalah:

- SP2D-LS Belanja Modal
- Bukti serah terima barang
- Berita acara penyelesaian pekerjaan
- SPJ
- Surat permohonan kepada SKPD tentang penghapusan aset tetap
- Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap

2. Fungsi Terkait

- Bendahara Barang
- Bendahara Pengeluaran

- c. PPTK
- d. PPK SKPD
- 3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

 - a. Buku jurnal
 - b. Buku Buku Besar
 - c. Buku Pembantu
- 4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Menerima SP2D-LS Belanja Modal	Belanja Modal-LRA Surplus/Defisit-LRA	Aset Tetap R/K PPKD
Penghapusan Aset Tetap karena penjualan	Tidak dilakukan penjurnalan	R/K PPKD Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
Penghapusan Aset Tetap karena pemusnahan fungsi	Tidak dilakukan penjurnalan	Defisit dari kegiatan Non Operasional-LO Akumulasi Aset Tetap Aset Tetap

9.2.4 Akuntansi Kewajiban

Akuntansi kewajiban pada SKPD dilakukan dalam rangka pencatatan atas pengakuan hutang jangka pendek pada SKPD.

- 1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan meliputi:

 - a. SP2D
 - b. Bukti memorial
 - c. Bukti potong
 - d. Bukti pengeluaran lainnya
- 2. Fungsi Terkait
 - a. Bendahara pengeluaran
 - b. PPK SKPD
- 3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

- a. Buku jurnal
- b. Buku Buku Besar
- c. Buku Pembantu

4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Dalam Kasus LS Barang dan jasa, seringkali terdapat potongan pajak, sehingga dana yang diterima pihak ke tiga adalah netto, namun PPK SKPD tetap mencatat belanja tersebut brutto. Jurnal untuk mencatat potongan pajak Ketika Bukti Setoran Pajak telah diterima	Tidak dilakukan penjurnalan	Kas di Bendahara Pengeluaran Utang Pajak

9.2.5 Akuntansi Penyesuaian dan Koreksi

Akuntansi koreksi atas kesalahan diatur dalam PSAP No. 10 dalam PP No. 71 tahun 2010. Berikut ini adalah beberapa contoh jurnal koreksi kesalahan dan jurnal penyesuaian.

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Belanja telephone di catat belanja PAM	Belanja telephon Belanja PAM	Beban Telephone-LO Beban PAM-LO
Pengakuan penyusutan aset tetap	Tidak dilakukan penjurnalan	Beban penyusutan aset tetap-LO Akumulasi penyusutan Aset tetap
Penyesuaian atas persedian	Tidak dilakukan penjurnalan	Beban persediaan Persediaan

9.3 Sistem Akuntansi PPKD

Sistem akuntansi PPKD terdiri atas sub sistem akuntansi yang meliputi:

1. Akuntansi pendapatan,
2. Akuntansi Belanja dan Beban
3. Akuntansi Aset dan Investasi
4. Akuntansi Kewajiban,
5. Akuntansi Konsolidasi, dan
6. Akuntansi Penyesuaian dan Koreksi.

9.3.1 Akuntansi pendapatan

1. Dokumen Sumber

Pendapatan	Dokumen Sumber
Kekayaan Daerah yang dipisahkan	RUPS/Dokumen yang dipersamakan
Jasa giro	Nota Kredit/BM/Rekening Koran/Sertifikat Deposito
Bagi hasil pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan/BM
DAU	Perpres/Nota Kredit/BM
DAK	PMK/Nota Kredit/BM
Dana Penyesuaian	PMK/Dokumen yang dipersamakan/BM
Bantuan Keuangan	SK Kepala Daerah/Dokumen yang Dipersamakan/BM
Hibah	SK Kepala Daerah/Dokumen yang Dipersamakan/Nota Perjanjian Hibah/BM
Dana Darurat	SK Kepala Daerah/Dokumen yang Dipersamakan/PMK

2. Fungsi Terkait
 - a. Bendahara Penerimaan
 - b. Akuntansi PPKD
3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

- a. Buku jurnal
- b. Buku Buku Besar
- c. Buku Pembantu

4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Mencatat penerimaan Dana Perimbangan	Surplus/Defisit-LRA Pendapatan Dana Perimbangan-LRA	Kas di Kasda Pendapatan Dana Perimbangan -LO
Mencatat penerimaan hibah uang	Surplus/Defisit-LRA Pendapatan Hibah-LRA	Kas di Kasda Pendapatan Hibah-LO
Mencatat penerimaan hibah barang	Surplus/Defisit-LRA Pendapatan Hibah-LRA	Aset Tetap Pendapatan Hibah-LO
Penerimaan setoran pendapatan dari SKPD	Tidak dilakukan penjurnalan	Kas di Kasda R/K SKPD
Penerimaan kas dari dividen	Surplus/Defisit-LRA Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LRA	Kas di Kasda Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	Surplus/Defisit-LRA Pendapatan bunga-LRA	Kas di Kasda Pendapatan bunga-LO

9.3.2 Akuntansi Belanja dan Beban

1. Dokumen Sumber
 - a. Surat tagihan
 - b. Bukti pengeluaran kas
 - c. SPJ
 - d. NPHD
 - e. Nota kredit
 - f. BM
 - g. Bukti akuntansi lainnya
2. Fungsi Terkait
 - a. PPKD
 - b. Kuasa BUD
 - c. Fungsi akuntansi PPKD

3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

- a. Buku jurnal
- b. Buku Besar
- c. Buku Pembantu

4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Menerbitkan SP2D UP/GU/TU/LS	Tidak dilakukan penjurnalan	R/K SKPD... Kas di Kasda
Pembayaran bunga atas hutang	Belanja bunga-LRA Surplus/Defisit-LRA	Utang bunga Kas di Kasda
Belanja Hibah	Belanja hibah-LRA Surplus/Defisit-LRA	Beban hibah-LO Kas di Kasda
Belanja bantuan keuangan	Belanja bantuan keuangan-LRA Surplus/Defisit-LRA	Belanja bantuan keuangan-LO Kas di Kasda
Belanja subsidi	Belanja subsidi-LRA Surplus/Defisit-LRA	Beban subsidi-LO Kas di Kasda
Belanja bantuan social	Belanja bantuan sosial-LRA Surplus/Defisit-LRA	Beban bantuan sosial-LO Kas di Kasda

9.3.3 Akuntansi Aset dan Investasi

1. Dokumen Sumber
 - a. Surat pernyataan investasi
 - b. BA Penyertaan modal
 - c. BA pembagian dividen
 - d. Sertifikat SBI
 - e. Sertifikat deposito
 - f. Sertifikat saham/obligasi
 - g. Bukti memorial
2. Fungsi Terkait
 - a. Kuasa BUD

- b. PPKD
- c. Fungsi akuntansi PPKD
- 3. Catatan Akuntansi
 - Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:
 - a. Buku jurnal
 - b. Buku Besar
 - c. Buku Pembantu
- 4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Melakukan Investasi Jangka Pendek	Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal Surplus/Defisit-LRA	Investasi Jangka Pendek Kas di Kasda
Melakukan Investasi Jangka Panjang	Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal Surplus/Defisit-LRA	Investasi Jangka Panjang Kas di Kasda
Pengumuman Dividen atas Hasil Investasi	Tidak dilakukan penjurnalan	Piutang lainnya Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO

10.3.4 Akuntansi Kewajiban

- 1. Dokumen Sumber
 - a. Surat perjanjian hutang
 - b. SP2D
 - c. BM
 - d. Nota kredit bank
 - e. Dokumen akuntansi lainnya yang terkait
- 2. Fungsi Terkait
 - a. Fungsi akuntansi PPKD
 - b. Kuasa BUD
 - c. PPKD

3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

- a. Buku jurnal
- b. Buku Buku Besar
- c. Buku Pembantu

4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Menerima kas dari pinjaman jangka Panjang Lembaga keuangan	Surplus/Defisit-LRA Penerimaan pembiayaan Pinjaman	Kas di Kasda Kewajiban jangka panjang
Pengeluaran kas untuk membayar kewajiban jangka panjang	Pengeluaran pembiayaan-pembayaran pokok pinjaman Surplus/Defisit-LRA	Kewajiban jangka Panjang Kas di Kasda
Jurnal untuk mencatat bagian hutang jangka Panjang yang akan jatuh tempo	Tidak dilakukan penjurnalan	Utang jangka Panjang Bagian lancar hutang jangka panjang

9.3.5 Akuntansi Konsolidasi

Proses konsolidasian laporan keuangan masing-masing SKPD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada PPKD.

1. Dokumen Sumber
 - a. SP2D UP/GU/TU/LS
 - b. Nota kredit
 - c. Laporan keuangan SKPD

2. Fungsi Terkait
 - a. Fungsi akuntansi PPKD
3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

 - a. Buku jurnal
 - b. Buku Besar
 - c. Buku Pembantu
4. Metode Penjurnalan

Konsolidasian dilakukan dengan melakukan eliminasi R/K SKPD dan R/K PPKD. R/K PPKD yang bersaldo kredit di debit dan R/K SKPD yang bersaldo debit di kredit sehingga R/K SKPD maupun R/K PPKD bersaldo nol.

R/K PPKD

R/K SKPD

9.3.6 Akuntansi Penyesuaian dan Koreksi.

1. Dokumen Sumber
 - a. Bukti memorial
 - b. Surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan hutang
 - c. Bukti akuntansi lainnya yang terkait dengan transaksi
2. Fungsi Terkait
 - a. Fungsi akuntansi PPKD
 - b. PPKD
3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan meliputi:

 - a. Buku jurnal
 - b. Buku Besar
 - c. Buku Pembantu

4. Metode Penjurnalan

Transaksi	Laporan Anggaran	Laporan Finansial
Koreksi atas kesalahan pencatatan belanja hibah/beban hibah dicatat belanja subsidi/beban subsidi	Belanja hibah-LRA Belanja subsidi- LRA	Beban hibah-LO Belanja subsidi-LO
Pembentukan cadangan piutang tidak tertagih	Tidak dilakukan penjurnalan	Beban penyisihan piutang-LO Penyisihan piutang tak Tertagih-LO
Terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan piutang	Tidak dilakukan penjurnalan	Penyisihan piutang tak tertagih-LO Piutang

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Ed. 2. Indeks Jakarta
- Nordiawan, D., Putra, I. S., and Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan* (Widyaningrum. Resthi, Ed.). Salemba Empat
- Ratmono, D., and Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* (Pertama). UUP STIM YKPN.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

BAB X

AUDITING DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Oleh Syamsuddin, S.Pd., M. Ak.

10.1 Auditing dan Sektor Pemerintah

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dapat menjadi kendali pemerintah. Selanjutnya dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat menghindarkan pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan seperti penyalahgunaan aset atau tindak pidana korupsi. Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemerintah telah membentuk beberapa unit dan lembaga yang digunakan untuk memberantas korupsi, yaitu Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Antipova, 2017).

Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat) adalah unit di bawah kepala daerah yang bertugas mengawasi sistem pengendalian intern kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern ini merupakan unsur penting dalam suatu lembaga pemerintahan karena tindakan korupsi terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dalam lingkup pemerintahan daerah. Manfaat temuan audit dalam sistem pengendalian intern adalah dapat menjadi sarana pendeteksi kecurangan dalam tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa proses pelaksanaan dan tanggung jawab penggunaan dana negara agar tidak disalahgunakan. Instansi

pemerintah dapat menggunakan hasil audit Lembaga Pemeriksa Keuangan Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK) sebagai pedoman dan sarana perumusan strategi dalam upaya meminimalisir terjadinya kasus korupsi. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari beberapa hal, antara lain hasil temuan pemeriksaan mengenai sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan opini audit atas pelaksanaan keuangan daerah.

Jika terjadi peningkatan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan yang diungkapkan oleh BPK membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dan pemborosan dana negara. Penipuan seperti korupsi dapat ditekan jika tindakan pencegahan diambil dengan benar dengan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah dan mendeteksi ketidakpatuhan tersebut sejak dini.

Proses audit dan adanya penyimpangan yang terjadi contohnya terkait tindakan korupsi. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai perilaku yang dengan sengaja menyalahgunakan jabatan seseorang di sektor pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan individu. Pengertian tersebut dapat mencakup kegiatan jual beli kekayaan negara yang dilakukan secara tidak sah, pengadaan melalui sogok, gratifikasi, atau penggelapan berbagai dana pemerintah. Dalam pendekatan sosiologis, definisi korupsi yang umum digunakan adalah “penyalahgunaan wewenang resmi untuk keuntungan pribadi” (Tuanakotta, 2010). Konflik kepentingan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab munculnya peluang terjadinya

tindakan korupsi ini. Hal ini dapat digambarkan dalam kerangka teori keagenan dengan masyarakat sebagai pihak prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah menggunakan dana negara berupa APBD dan masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran tersebut. Melibatkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan anti korupsi dapat meningkatkan peluang keberhasilan pemberantasan korupsi di masa depan (Zeho *et al.*, 2020).

Penyalahgunaan dana negara dapat terjadi karena adanya kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan informasi terkait APBD lebih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah selaku pengelola daerah daripada masyarakat. Kesenjangan informasi ini juga dapat menimbulkan kecurangan karena pemerintah daerah yang seharusnya menjalankan amanah masyarakat untuk memanfaatkan dana keuangan dengan sebaik-baiknya, terkadang mengabaikan profesionalisme dan mengutamakan kesejahteraan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan masyarakat untuk memimpin suatu daerah. . Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan dapat dilakukan dengan memantau kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan telah diterapkan dalam proses pengelolaan dana negara. Contoh bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan mengaudit laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Selanjutnya, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan informasi. Berkurangnya tingkat kesenjangan informasi diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi. Bentuk keluaran hasil pemeriksaan BPK adalah opini dan temuan pemeriksaan yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus

2020 yang berisi Pedoman Teknis Hasil Pemeriksaan Codering, terdapat beberapa temuan yaitu temuan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif) (Purba and Umar, 2021).

Sistem pengendalian internal pemerintah yang lemah dapat menyebabkan rentannya suatu pemerintahan terhadap korupsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelaahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, sistem pengendalian intern merupakan metode terstruktur. yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan karyawan. Apalagi dipengaruhi oleh manajemen untuk mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan penyajian laporan keuangan, kekayaan negara yang dilindungi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam proses pengelolaan dana negara untuk mencapai tujuan kelembagaan (Indonesia, 2008).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, salah satu komponen penting yang harus diungkapkan dalam menilai akuntabilitas suatu laporan keuangan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus memperoleh keterangan resmi dari pemeriksa bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material karena tidak ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Proses pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

Beberapa penelitian menjelaskan mengenai kepatuhan pemerintah daerah terhadap aturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. (Maharti, Masyithoh and Kurniawan, 2018) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh kuat temuan audit terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah. Temuan ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melanggar atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, sehingga potensi penyimpangan lebih tinggi. Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian material pada keuangan daerah, sehingga menimbulkan kerugian di kemudian hari. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi dalam suatu organisasi karena dapat membantu organisasi dalam memberikan informasi laporan keuangan perusahaan secara objektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen (Sari and Prabowo, 2019). Buruknya proses pemerintahan di suatu daerah yang memicu terjadinya korupsi dapat ditunjukkan dengan adanya kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, menurut (Probohudono, 2015) menyatakan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum mampu menjalankan sistem pemerintahan dan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah atau provinsi masih belum

dapat mengoptimalkan proses pengelolaan, pengendalian, dan penyajian laporan keuangan. Akibatnya alokasi dana untuk kepentingan masyarakat belum terserap dengan baik dan tidak tepat sasaran.

Selain ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, opini audit juga dapat menjadi informasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat oleh pemeriksa secara profesional adalah untuk menentukan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan adalah wajar sebagai opini pemeriksaan. Opini audit adalah pernyataan profesional oleh pemeriksa sebagai kesimpulan apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu wajar atau tidak, sehingga sumber informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Indonesia *et al.*).

(Masyitoh, Wardhani and Setyaningrum, 2015) berpendapat bahwa opini audit yang diperoleh dapat mencerminkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah; jika opini audit yang diperoleh pemerintah baik, maka pemerintah daerah telah melakukan dengan baik sehingga tidak ada potensi penyelewengan dana negara. Opini audit atas laporan keuangan yang wajar merupakan informasi yang menggambarkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah daerah telah melakukan proses akuntabilitas yang baik yang diyakini dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat korupsi. Audit yang berkualitas berasal dari proses independen dan profesionalisme tinggi yang dilakukan oleh auditor ahli (Hamdani and Pamungkas, 2020). Dalam penelitian

lainnya yang diungkap oleh (Jehandu, Salle and Layuk, 2019) di Pemerintah Provinsi Papua, ketika persepsi opini audit baik, kepercayaan terhadap penanganan korupsi oleh auditor akan semakin tinggi. Tujuan dilakukannya audit atas laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi apakah penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak. Pada akhir pemeriksaan, auditor mengevaluasi temuan secara keseluruhan dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak. Opini auditor menjadi dasar penilaian tingkat kewajaran yang memberikan gambaran tentang tingkat akuntabilitas pemerintah provinsi sebagai bentuk kontribusi dalam mengurangi tingkat korupsi. Jika kewajaran laporan keuangan baik, maka dapat diyakini bahwa proses akuntabilitas yang baik telah dilaksanakan untuk mengurangi korupsi, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, rekomendasi merupakan sarana untuk melakukan tindakan perbaikan yang diberikan oleh pemeriksa kepada orang perseorangan atau badan yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh orang atau badan yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dari pemeriksa keuangan.

Menurut (Lin and Liu, 2013), lebih penting untuk melakukan kegiatan tindak lanjut atas hasil daripada mendeteksi temuan audit karena dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Pihak yang telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa dapat menghilangkan bahkan mencegah terulangnya kesalahan yang sama, seperti penyelewengan dan pemborosan dana negara. Pemerintah daerah yang telah melaksanakan rekomendasi dari penguji menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan

upaya untuk memperbaiki kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (Azhar and Setyaningrum, 2015) mengemukakan bahwa semakin baik tindak lanjut perbaikan yang dilakukan, semakin rendah tingkat korupsinya. Karena dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang diberikan oleh auditor, Kementerian atau lembaga telah melakukan upaya perbaikan sistem pengendalian intern sehingga dapat mendeteksi kecurangan atau korupsi yang terjadi. Dengan adanya pemeriksaan audit diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau menghilangkan dan mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Selain itu, hasil audit diharapkan dapat memberikan cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai visi dan misi.

Tata kelola keuangan negara yang baik akan dapat dibangun jika proses pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara disusun sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang tepat. Pengaturan mengenai pemeriksaan pemerintah atau disebut juga pemeriksaan keuangan negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam konteks audit pemerintah, objek dari proses audit adalah pemerintah itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam pengelolaan dana masyarakat, baik penerimaan maupun pengeluaran negara, dapat dikendalikan melalui pemeriksaan pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai fungsi pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat. Penggunaan dana publik untuk kegiatan pemerintah tidak boleh mengalami pemborosan atau bahkan penyalahgunaan tetapi penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Audit pemerintah dapat menjadi alat pendeteksi jika terjadi penyalahgunaan dana negara. Selain itu, saran dan rekomendasi dapat diberikan untuk perbaikan sistem akuntansi pemerintah atas hasil audit yang telah dilakukan. Kewenangan pemeriksaan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh lembaga negara yang independen yang bebas dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penting untuk diketahui bahwa korupsi bukanlah fenomena sosial yang baru; hal ini sudah berlangsung lama (Klitgaard, 1988; Othman, Shafie and Hamid, 2014; Assakaf, Samsudin and Othman, 2018). Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui korupsi sebagai isu masalah global utama, dengan mencantumkan memerangi korupsi sebagai salah satu dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan karena dampak buruk korupsi yang menimbulkan tantangan bagi pembangunan suatu negara, mendistorsi pengeluaran publik dan pasar, mengurangi pertumbuhan ekonomi, merusak supremasi hukum dan demokrasi, dan mengikis kualitas hidup (Enste and Heldman, 2017). Akarnya terletak jauh di dalam politik dan birokrasi lembaga, dan pengaruhnya terhadap pembangunan bervariasi sesuai dengan situasi nasional. Sementara efek negatif korupsi juga dapat ditemukan di negara maju, namun paling parah dirasakan di negara berkembang (Rady, 2016), dan ada banyak kekhawatiran tentang bagaimana mengatasi ancaman tersebut. Bahkan korupsi disebut sebagai sebuah epidemi di negara berkembang (Othman, Shafie and Hamid, 2014).

Sejak tahun 1953, kepentingan internasional dalam memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas di sektor publik menyebabkan pembentukan lembaga penting, *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Badan ini memiliki 190 anggota penuh dan beroperasi sebagai organisasi induk yang mengurus urusan komunitas audit

pemerintah. Selama beberapa dekade, lembaga tersebut telah menyediakan kerangka kerja yang baik untuk audit pemerintah, memastikan bahwa pengetahuan dibagikan, audit dilaksanakan dan kapasitas profesional ditingkatkan. Pengembangan antaranggota Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) di negara masing-masing digalakkan (INTOSAI, 2015).

Beberapa literatur menunjukkan bahwa audit sektor publik yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi domestik (Gustavson and Sundström, 2018), hal ini merupakan landasan dan elemen penting dalam memerangi korupsi di sektor publik. Harapan ini muncul dari asumsi bahwa informasi yang diaudit cukup akurat, lengkap, dan tidak bias. Auditing merupakan komponen penting dari akuntabilitas karena melegitimasi informasi yang bergantung pada akuntabilitas keuangan dan kondisi formal (Power, 1997). Oleh karena itu, profesi audit membantu organisasi di sektor publik untuk mencapai akuntabilitas dan integritas, meningkatkan operasi, dan menanamkan kepercayaan di antara warga negara. Salah satu peran auditor sektor publik adalah berfungsi sebagai badan yang mengawasi perilaku entitas sektor publik, terutama yang berkaitan dengan dana publik, yang berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi korupsi publik. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan auditor untuk memainkan peran penting dalam memerangi korupsi di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antipova, T. (2017) 'Governmental auditing systems in Indonesia and Russia', in *International Conference on Information Technology Science*. Springer, pp. 159–166.
- Assakaf, E. A., Samsudin, R. S. and Othman, Z. (2018) 'Public sector auditing and corruption: A literature', *Asian J. Financ. Account*, 10, pp. 226–241.
- Azhar, K. and Setyaningrum, D. (2015) 'Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia', *Universitas Indonesia. Diakses dari [http://lib. ui. ac. id/naskahringkas/2018-10/S59195-Khaliful% 20Azhar](http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2018-10/S59195-Khaliful%20Azhar)*.
- Enste, D. and Heldman, C. (2017) 'Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results'.
- Gustavson, M. and Sundström, A. (2018) 'Organizing the audit society: Does good auditing generate less public sector corruption?', *Administration & Society*, 50(10), pp. 1508–1532.
- Hamdani, R. and Pamungkas, S. (2020) 'Pengalaman Kerja dan Penilaian Profesional Auditor: Bukti dari Mahasiswa di Yogyakarta', *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(1), pp. 154–162.
- Indonesia, P. R. (2008) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah'.
- Indonesia, P. R. *et al.* (no date) '3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan', *Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.
- INTOSAI, I. (2015) 'Capacity Building Committee', *International Journal of Government Auditing*.
- Jehandou, V., Salle, A. and Layuk, P. K. A. (2019) 'Pengaruh opini audit

dan temuan audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi Papua', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 4(3), pp. 114–131.

Klitgaard, R. (1988) *Controlling corruption*. Univ of California Press.

Lin, Z. J. and Liu, M. (2013) 'The effects of managerial shareholding on audit fees: evidence from Hong Kong', *International Journal of Auditing*, 17(3), pp. 227–245.

Maharti, R. A., Masyithoh, S. and Kurniawan, I. S. (2018) 'Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja', *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 2(2).

Masyitoh, R. D., Wardhani, R. and Setyaningrum, D. (2015) 'Pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi pada pemerintah daerah tingkat II tahun 2008-2010', in *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan*, pp. 1–26.

Othman, Z., Shafie, R. and Hamid, F. Z. A. (2014) 'Corruption–Why do they do it?', *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, pp. 248–257.

Power, M. (1997) *The audit society: Rituals of verification*. OUP Oxford.

Probohudono, A. N. (2015) 'Analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), pp. 81–110.

Purba, R. B. and Umar, H. (2021) *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.

Rady, T. (2016) 'Corruption, business, and economic development', *Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict*, 20, p. 45.

Sari, S. A. and Prabowo, T. J. W. (2019) 'PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG', *Diponegoro Journal of*

Accounting, 8(3).

Tuanakotta, T. M. (2010) 'Akuntansi forensik dan audit investigatif', *Jakarta: Salemba Empat*, 431.

Zeho, F. H. *et al.* (2020) 'Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development', *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), pp. 89–100.

BAB XI

KONSEP PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Oleh Dr. Otniel Safkaur, S.E., M.Si., CMA.

11.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntansi sektor publik melingkupi tingkat inflasi, tenaga kerja produktif. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan sektor privat ada 4 poin utama. Peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pelayanan yang diterapkan di sektor publik dan sektor swasta tentu. Jenis dan karakteristik Akuntan Sektor Publik. Untuk itu maka dalam membahas cara menyusun anggaran pada sektor publik dan sektor private/swasta juga akan berbeda.

Dalam hal apapun, perbedaan cara; Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistik. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publi dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: Laporan posisi keuangan atau laporan *balance sheet* melaporkan aset, hutang dan aset bersih. Laporan kinerja berisi informasi prestasi kerja berdasar penggunaan anggaran, sesuai pasal 18 (1).

Ruang lingkup akuntansi sektor publik dan perkembangannya. Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Salah satu perbedaan manajemen pada sektor publik dan sektor swasta yang dapat diidentifikasi dengan jelas adalah pada manajemen pelayanannya. Sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pihak manajemen tentu saja harus

mengidentifikasi, mengukur, serta melaporkan informasi keuangan kepada pihak direksi dan pemilik perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang sistematis, transparan, dan terperinci yang telah dibuat oleh bagian akuntansi manajemen.

Akuntan publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Dengan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menjadi implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan, namun laporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir dari akuntabilitas publik. Lalu apa itu laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut.

11.2 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Komponen yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan sektor publik antara lain adalah laporan posisi keuangan atau yang juga disebut dengan neraca yang terdiri dari property, aktiva tak berwujud, aktiva finansial, persediaan, cadangan, kewajiban tidak lancar, kas dan setara kas, partisipasi minor, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya untuk komponen keuangan sektor publik adalah kinerja keuangan yang meliputi surplus atau defisit, perubahan aktiva atau ekuitas netto, arus kas yang memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam suatu periode tertentu, kebijakan akuntansi serta catatan laporan keuangan. Namun untuk lembaga sektor publik seperti pemerintahan, laba bukan merupakan ukuran yang relevan

karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah bertanggungjawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik.

11.3 Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik

Selain itu, perlu diketahui bahwa akuntabilitas publik ada dua jenis yakni:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Jenis yang pertama adalah akuntabilitas vertikal dimana tugasnya adalah memiliki tanggung jawab kepada pihak yang lebih tinggi terkait pengelolaan dana.

Contoh dari akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada beberapa unit di atasnya seperti aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Jenis yang kedua adalah akuntabilitas horizontal di mana jenis ini memiliki pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

Jenis Laporan keuangan sektor publik yaitu:

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca atau laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periodetertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus melakukan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut :

- a. Properti, pabrik, dan peralatan
- b. Aktiva tidak berwujud
- c. Aktiva keuangan
- d. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas
- e. Persediaan

- f. Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer
 - g. Piutang dari transaksi pertukaran
 - h. Kas dan setara kas
 - i. Utang pajak dan transfer
 - j. Utang karena transaksi pertukaran
 - k. Cadangan (*provsion*)
 - l. Kewajiban tidak lancar
 - m. Partisipasi minoritas
 - n. Aktiva / ekuitas neto
2. Laporan kinerja keuangan
- Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya. Laporan Surplus rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut :
- a. Pendapatan dari aktiva operasi
 - b. Surplus atau defisit dari aktiva operasi
 - c. Biaya keuangan (biaya pinjaman)
 - d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan *joint venture* yang menggunakan metode ekuitas
 - e. Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
 - f. Pos-pos luar biasa
 - g. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
 - h. Surplus atau defisit neto untuk periode.
3. Laporan perubahan Aktiva / Ekuitas Neto.
- Laporan perubahan aktiva / ekuitas neto menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pendapatan dan biaya lainnya

diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva /ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan aktiva / ekuitas neto ini meliputi kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode. Pengungkapan komponen aset / ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antaranilai tercatat setiap komponen aset / ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

4. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

11.4 Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai bentuk kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*), akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*), perencanaan dan informasi Otorisasi (*planning and authorization information*), kelangsungan organisasi (*viability*), hubungan masyarakat (*public relation*), sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*). Adapun tujuan umum dari pelaksanaan laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial, informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan didalamnya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Fungsi yang pertama adalah dalam hal kepatuhan dan pengelolaannya dimana jika dengan membuat laporan keuangan berarti sudah melakukan jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan.

Tidak hanya itu, laporan keuangan juga bisa menjamin pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah

dilakukan dengan baik bahkan sesuai dengan hukum, serta peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Selanjutnya, laporan keuangan sektor publik juga digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk tujuan:

- a. mengetahui bagaimana kinerja dan evaluasi dari manajemen,
- b. membantu mengetahui hasil yang sudah dicapai atas target yang sudah ditetapkan,
- c. sebagai pembanding dengan organisasi lain yang sejenis.,
- d. membantu mengetahui kemungkinan untuk pihak luar dalam hal biaya atas barang dan jasa yang telah diterima,
- e. mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi.

2. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Fungsi yang berikutnya dari laporan keuangan sektor publik adalah untuk membuat perencanaan, kebijakan serta aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Selain itu juga berfungsi sebagai pencari informasi pendukung terkait otorisasi penggunaan dana.

3. Kelangsungan Organisasi

Fungsi dari laporan keuangan sektor publik adalah untuk mengetahui secara langsung terkait organisasi apakah organisasi ini masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak.

4. Hubungan dengan Masyarakat

Fungsi berikutnya dari laporan keuangan adalah berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada para organisasi, agar mereka bisa berkomunikasi dengan publik. Bahkan mereka juga bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak lain seperti yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah didapatkan.

5. Sumber Fakta dan Gambaran

Fungsi dan tujuan yang terakhir dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui atas fakta serta gambaran organisasi secara lengkap.

11.4.1 Kepatuhan dan Pengelolaan

Fungsi Kepatuhan merupakan bagian penting dari struktur tata kelola dan framework pengelolaan risiko Danamon. Pelaksanaan fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan, mengelola risiko kepatuhan, memastikan kebijakan dan kegiatan usaha Danamon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan komitmen Danamon kepada regulator. Mematuhi berbagai kaidah perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan peran dan fungsi kepatuhan merupakan salah satu wujud komitmen Danamon.

11.4.2 Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Adanya keterbatasan dalam website terutama dalam upaya update/memberikan contoh retrospektif maupun penggunaan kata retrospektif. Maka dari itu bagaimana jika Anda coba berbagi dan melengkapi cara penggunaan kata/istilah maupun contohnya dengan cara mengisi komentar di bawah ini. Yang artinya Anda sudah membantu website ini dan pengguna lain yang sama-sama membutuhkan informasi maksud dari retrospektif.

11.4.3 Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Perencanaan dan informasi Otorisasi (*planning and authorization information*), kelangsungan organisasi (*viability*), hubungan masyarakat (*public relation*), sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*). Adapun tujuan umum dari pelaksanaan laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang bergunabagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

11.4.4 Kelangsungan Organisasi

Struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

11.4.5 Hubungan dengan Masyarakat

Fungsi manajemen untuk menjalin hubungan dengan publik melalui komunikasi dan sarana lain dengan tujuan untuk menumbuhkan saling pengertian dan saling percaya, rasa simpati, memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan, terhadap setiap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan oleh perusahaan/ organisasi.

11.4.6 Sumber Fakta dan Gambaran

Proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data yang ada sehingga menjadi sajian dan cerita sejarah yang dapat dipercaya disebut metode sejarah.

11.5 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Informasi terkait laporan keuangan sektor publik dimana laporan keuangan tersebut sangat penting untuk menyajikan informasi, serta bisa dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh suatu organisasi publik kepada masyarakat. Perusahaan membutuhkan laporan keuangan usaha, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak yang berkepentingan atau juga kepada investor. Laporan keuangan dibuat dengan sebenar-benarnya, akurat, dan rapi. Dalam membuatnya memang

dibutuhkan proses penyusunan laporan yang detail, teliti, dan akurat. Laporan keuangan berantakan jika dilihat oleh para pimpinan dan pihak investor? Butuh alat untuk melakukan pembukuan yang lebih modern dan praktis serta *real time*.

Selain fungsi, laporan keuangan sektor publik juga memiliki tujuan diantaranya adalah:

1. memahami kinerja dan evaluasi manajemen,
2. memahami pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
3. menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya,
4. memberikan kemungkinan bahwa pihak luar mengetahui harga pokok barang dan jasa yang sudah diterima,
5. memahami efisiensi sumber daya yang digunakan organisasi,
6. *compliance* dan *stewardship* (kepatuhan dan pengelolaan),
7. menyajikan laporan keuangan berarti telah menjadi suatu jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan lembaga yang berwenang.

Untuk itu melakukan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Sektor Publik pada organisasi publik memiliki beberapa tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yaitu:

1. *Accountability and Retrospective (Reporting Akuntabilitas Dan Pelaporan Retrospektif)*

Pertama, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti :

- a. Memahami kinerja dan evaluasi manajemen
- b. Memahami pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- c. Menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya
- d. Memberikan kemungkinan bahwa pihak luar mengetahui harga pokok barang dan jasa yang sudah diterima

- e. Memahami efisiensi sumber daya yang digunakan organisasi
2. *Compliance and Stewardship* (Kepatuhan Dan Pengelolaan)
Menyajikan laporan keuangan berarti telah menjadi suatu jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan lembaga yang berwenang. Untuk itu melakukan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Viability* (Kelangsungan Organisasi)
Selanjutnya fungsi pelaporan keuangan adalah untuk menentukan bagaimana keberlangsungan organisasi tersebut, apakah masih memiliki kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa atau tidak.
4. *Public Relation* (Hubungan Masyarakat)
Melalui fungsi laporan keuangan ini memberikan kesempatan bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan publik, maupun dengan pihak lain yang berkepentingan atas pencapaian yang telah mereka buat.
5. *Planning and Authorization Information* (Perencanaan Dan Informasi Otorisasi)
Adanya fungsi laporan keuangan digunakan untuk menjalankan sebuah rencana, kebijakan, dan kegiatan dimasa depan, serta untuk menemukan informasi pendukung mengenai penggunaan dana yang diizinkan.
6. *Source Of Facts and Figures* (Fakta Dan Sumber Gambar)
Selanjutnya fungsi dari Laporan keuangan dirancang untuk menyajikan informasi kepada pihak kepentingan untuk mengetahui fakta serta memahami gambaran dari organisasi secara lengkap.

11.6 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta

Laporan keuangan publik (sektor pemerintah) dan swasta memiliki perbedaan terkait pengelolaannya. Jika dilihat dari perbedaannya, bisa dilihat dari beberapa jenis laporan keuangannya, tujuannya, teknik akuntansi yang dipakai, serta elemen laporan keuangannya. Dilihat dari persamaannya, bisa dilihat bahwa laporan keuangan sektor publik dengan swasta menggunakan sumber dokumen yang sama. Selain itu juga sama-sama memiliki peran yang berhubungan dengan masyarakat. Berikut ini terkait perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta.

Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Berfokus pada finansial dan politik
2. Berfokus pada bagian organisasi
3. Melihat ke masa depan secara detail
4. Kinerja diukur secara finansial dan nonfinansial
5. Mempertanggung jawabkan kepada parlemen dan masyarakat luas
6. Laporan diperiksa oleh *treasury*
7. Peraturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan
8. *Cash accounting*

Laporan Keuangan Sektor Swasta

1. Berfokus pada finansial
2. Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
3. Tidak dapat melihat masa depan secara detail
4. Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
5. Mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan kreditur
6. Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen

7. Peraturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi
8. *Accrual accounting*

11.6.1 Laporan Keuangan Sektor Publik

Menyediakan laporan keuangan sektor publik merupakan tugas dan kewajiban perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi laporan keuangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi sektor publik maupun pihak eksternal. Adanya tuntutan untuk membuat laporan keuangan sektor publik kepada masyarakat menjadikan organisasi sektor publik lebih transparansi serta akuntabilitas. Laporan keuangan sektor publik dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta terbuka untuk publik. Tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik ini supaya berguna bagi sejumlah pemakai laporan keuangan segmen, sehingga bisa mengevaluasi keputusan dari mana alokasi sumber daya yang dibutuhkan dan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sektor publik perlu membuat kebutuhan informasi laporan keuangan yang harus direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen pengendalian. Begitu juga dengan pemegang saham di sektor publik, yang membutuhkan informasi laporan keuangan sektor publik secara relevan, handal, dan bervariasi untuk mengambil suatu keputusan. Di mana dalam akuntansi sektor publik merupakan kewajiban dan mempertanggung jawabkan atas segala kegiatan seperti melaporkan, menyajikan dan melaksanakan.

Adapun dua macam akuntabilitas sektor publik yaitu:

1. *Horizontal Accountability* (Akuntabilitas Horizontal)
Akuntabilitas horizontal bertanggung jawab atas pengelolaan dana bagi masyarakat luas.

2. *Vertical Accountability* (Akuntabilitas Vertikal)

Akuntabilitas vertikal merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada atasan pengelola dana. Misalnya, unit pengelola pelayanan bertanggung jawab kepada pejabat pemerintah, pemerintah daerah, serta bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sektor publik adalah sebuah organisasi yang secara kompleks maupun heterogen. Di mana organisasi sektor publik harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana dan kinerja mereka. Kemudian pada sektor melibatkan penerapan sistem akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi sektor publik. Tentu bentuk tanggung jawab akuntansi sektor publik adalah melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun informasi keuangan bukanlah tujuan akhir dari akuntansi sektor publik, tetapi juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu pada dasarnya bentuk laporan keuangan instansi pemerintah sama dengan sektor swasta, namun sifat dan karakteristik sektor publik harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian dari segi karakteristik laporan keuangan sektor publik juga memiliki keterbatasan pada faktor non moneter seperti faktor sosial politik yang perlu diperhatikan. Adapun laporan keuangan yang harus disiapkan oleh organisasi sektor publik yang mencakup laporan keuangan formal yaitu laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Apa Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta?

Terdapat perbedaan pengelolaan laporan keuangan antara lembaga pemerintah (sektor publik) dan lembaga non-pemerintah (sektor swasta). Dari perbedaan tersebut memiliki beberapa jenis laporan keuangan, tujuan laporan keuangan,

teknik akuntansi yang digunakan, serta elemen laporan keuangan. Dalam persamaan laporan keuangan sektor publik dengan swasta bisa dilihat dari beberapa sumber dokumen yang digunakan, serta memiliki peran yang berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan perbedaannya juga memiliki karakteristik yang berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk menyajikan laporan keuangan. Berikut tabel perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta adalah:

Tabel 11.1 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Sektor Swasta
Berfokus pada finansial dan Politik	Berfokus pada finansial
Berfokus pada bagian organisasi	Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
Melihat masa depan secara detail	Tidak dapat melihat masa depan secara detail
Kinerja diukur secara finansial dan non finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
Mempertanggungjawabkan pada parlemen dan masyarakat luas	Mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham dan kreditur
Laporan keuangan diperiksa oleh <i>treasury</i>	Lap keuangan diperiksa oleh auditor independen
Peraturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan	Peraturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang standar akuntansi pasar modal dan praktek akuntansi
<i>Cost Accounting</i>	<i>Accrual accounting</i>

Demikianlah pemahaman perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Di mana laporan keuangan ini sangat penting untuk menyajikan informasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh suatu organisasi publik kepada masyarakat. Begitu juga dengan perusahaan tentunya akan

membutuhkan laporan keuangan usaha sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak kepentingan atau investor. Dalam membuat laporan keuangan juga dibutuhkan proses penyusunan laporan yang handal, detail, dan akurat.

11.6.2. Laporan Keuangan Sektor Swasta

Keberadaan berbagai jenis organisasi seperti organisasi publik dan swasta di Indonesia semakin mengalami kompleksitas yang terus meningkat. Organisasi sektor publik dan swasta memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing. Sektor publik memiliki tujuan utama organisasi untuk memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor swasta (entitas komersil/bisnis) tujuan utamanya adalah memaksimalkan laba. Kedua jenis organisasi tersebut diatas walaupun berbeda dalam pencapaian tujuannya, namun tetap harus bisa mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang dilakukan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan adanya pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu bentuk pelaporan tersebut adalah dengan disusunnya laporan keuangan oleh sebuah organisasi atau unit pelaporan. Laporan keuangan berfungsi sebagai media informasi keuangan bagi sejumlah pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Namun demikian, antara organisasi publik dengan swasta tentu memiliki perbedaan tersendiri tidak mungkin pelaporan sebuah unit pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya sama dengan pelaporan entitas bisnis yang berfokus pada pelaporan finansial semata.

11.7 Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

Perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Banyak dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan kerja dan perbedaan tujuan organisasi. Penggunaan laporan keuangan sektor publik akan berbeda dengan penggunaan laporan keuangan organisasi/perusahaan sektor swasta. Pada sektor publik, anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian yang sangat penting. Ulasan tentang tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. laporan keuangan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah sangat dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik; Informasi mengenai perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Akuntansi sektor publik dan *good governance*. Jika dilihat dari perbedaannya, bisa dilihat dari beberapa jenis laporan keuangannya, tujuannya, teknik akuntansi yang dipakai, serta elemen laporan keuangannya. laporan posisi keuangan laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang memperlihatkan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu saat. Persamaan dan perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta (*private*). Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Swasta:

1. Akuntansi Sektor Publik, Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik: Kebijakan untuk membantu pembuatan dan pengimplementasian kebijakan.
2. Persamaan dan perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta (*private*) Salah satu bentuk kinerja adalah kinerja pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara sesuai undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dalam bentuk laporan keuangan sesuai pasal 32 (2) perpres 29/2014. Anggaran sektor publik merupakan *blue print* tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi sektor publik. sedangkan untuk sektor privat, anggaran bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan

lingkungan dan ekonomi yang terjadi. perbedaan laporan keuangan publik dan swasta; sektor publik dalam arti luas dimaknai sebagai bidang yang membahas metoda manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai pungutan negara (pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2006). *A Handbook of Human Resources Management* (16th ed.), London: Kogan Page
- Analoui, F. (ed.) (1999). *Effective human resource development: a challenge for developing countries*, Ashgate, Aldershot, Hants, England
- Bates, R., and Chen, H. C. (2004). *Human resource development value orientations: A construct validation study*. Human Resource Development International, 7, 351-370.
- Bassellier, G., Reich, B. H. and Benbasat, I. (2000). *Information Technology Competence of Business Managers : A Definition and Research Model*. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
- Blunt, P. (1995). *Cultural relativism, 'good' governance and sustainable human development*. Public Administration and Development, Vol.15. pp.1-9
- Choe, J.-M. (1996). *The relationship among performance of accounting information systems, influence factors and evolution level of information system*, Journal of Management Information System; 12, 4.
- Dessler, G. (2013). *Human Resources Management*. Twelfth Edition. USA : Prentice Hall.
- Delahaye, B. L. (2005). *Human resource development: adult learning and knowledge management*, Queensland, Wiley Milton
- O'Brien, James A. and Marakas, G. M. (2010). *Management Information Systems*. Tenth Edition. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Fitriati and Mulyani, S. (2015). *The Influence of Leadership Style on Accounting Information System Success and Its Impact on Accounting Information Quality*. Research Journal of Finance and Accounting. Pp. 167-173.

- B. Al-Najjar. (2010). *"Corporate governance and institutional ownership: evidence from Jordan," Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, vol. 10, no. 2, pp. 176-190,
- Bartlett, K. R. (2001). *The relationship between training and organizational commitment: A study in the health care field*. *Human Resource Development Quarterly*, 12, 335-352.
- Beest, F. Van, B. G. and Boelens, S. (2009). *Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics*. Netherland : Nijmegen Center for Economics NiCE Working Paper
- Combs, J., Liu, Y., Hall, S., and Kitchen, D. (2006). *How much do high-performance work practices matter? A metaanalysis of their effects on organizational performance*. *Personnel Psychology*, 59, 501-528.
- Clardy, A. (2008). *The strategic role of human resource development in managing core competencies*. *Human Resource Development International*, 11, 183-197.
- Cooper, D. R, and Schindler, P. S. (2006). *Business Research Methods* (9th ed.). *International edition*. Mc Graw Hill.
- Delaney, J. T. and Huselid, M. A. (1996). *The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance*. *Academy of Management Journal*, 39, 949-969
- Garavan, T. N., Costine, P., and Heraty, N. (1995). *The emergence of strategic human resource development*. *Journal of European Industrial Training*, 19(10), 4-10.
- Grieves, J. (2003). *Strategic human resource development*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Garavan, T. N. (2007). *A strategic perspective on human resource development*. *Advances in Developing Human Resources*, 9:11-30.

- Grady, Paul. 1965. *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises*. Accounting Research Accounting Study No. 7. AICPA:2
- Gubbins, C., Garavan, T. N., Hogan, C., and Woodlock, M. (2006). *Enhancing the role of the HRD function: The case of a health services organisation*. Irish Journal of Management, 171-206.
- Hertati. and Zarkasyi. (2015). *Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia*. Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org.ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.8, 2015
- Holton, E. F., Bates, R. A., and Ruona, W.E.A. (2000). *Development of a generalized learning transfer system inventory*. Human Resource Development Quarterly, 11, 333–360.
- Hiro, Tugiman. (2003). *Manajemen Organisasi Nirlaba (Not For Profit Organization Management)*. Bandung: Penerbit Perkumpulan “Perhimpunan Santo Borromeus”.
- Kelly D. (2001). *Dual Perceptions of HRD: Issues for Policy: SME's, Other Constituencies, and the Contested Definitions of Human Resource Development*, <http://ro.uow.edu.au/artspapers/26> Viewed 8th February 2012
- Katou, A. A. (2009). *The impact of human resource development on organisational performance: Test of a causal model*. Journal of Behavioural & Applied Management, 10, 335-356.
- Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). *The human resource architecture: Toward a theory of human resource capital allocation and development*. Academy of Management Review, 24, 31-49.
- Lopez, S. P., Peon, J. M. M. and Ordas, C. J. V. (2005). *Human resource practices, organizational learning and business performance*. Human Resource Development International, 8, 147-164.
- Mardjana, I Ketut. (2002). *Corporate Governance dan Privatisasi. The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*.

- Mirag, Abdul Qadir, and Abdul Hafeez, Ahmed. (2007). *Corporate Governance in the banking sector and the financial and their role in establishing the rules of transparency. Scientific Symposium of the accounting department, the Saudi capital market look independent*, King Khalid University, Saudi Arabia RR: 12.14.
- Ranjbar, A. (2009). "*Corporate governance and financial performance - A study of Malaysian listed companies*," Master thesis, Faculty of Business and Accountancy, University of Malaya,
- Susanto. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan*. Bandung : Lingga Jaya.
- Susanto. (2015). *What Factors Influence The Quality Of Accounting Information?. IJABER*. Pp. 3395-4014.
- Swanson, R. A. (1999) *HRD Theory; Real or Imagines Human Resources Development International* 2(1) 2 – 5
- Swanson, R. A. (1995). *Human resource development: Performance is the key. Human Resource Development Quarterly*, 6 (2), 207–313.
- Schwoerer, C. E., May, D. R., Hollensbe, E. C. and Mencl, J. (2005). *General and specific selfefficacy in the context of a training intervention to enhance performance expectancy. Human Resource Development Quarterly*, 16, 111-129
- Torraco, R. J. (1999). *Advancing our understanding of performance improvement*. In R.J. Torraco (Ed.), *Performance improvement theory and practice*. Baton Rouge, LA: Academy of Human Resource Development.
- Walton. J (1999) *Strategic Human Resources Development*. Harlow: Financial Times/Prentice-Hall

- Wang J, Hutchins, H.M and Garavan, T.N (2009) *Exploring the Strategic Role of Human Resource Development in Organizational Crisis Management* *Human Resource Development Review*, 8;22
<http://hrd.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/1/22>
- Young Sung, S and Choi, J. (2011). *The Effects of Human Resource Development on Operational and Financial Performance of Manufacturing Companies: A Large-Scale, Longitudinal Analysis*. Institute for Research on Labour and Employment: IRLE Working Papers.
- Zarkasyi, W. (2008), *Good Corporate Governance in Manufacturing, Banking and Other Financial Services Business Entities*. Bandung: Alfabeta.

BIODATA PENULIS



Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.

Penulis lahir di Solok tanggal 23 Juli 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY). Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok tahun 2005. Pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Master (S2) Program Studi Akuntansi pada Pascasarjana Universitas Andalas (Unand), dan mendapatkan gelar M.Si pada tahun 2010. Pendidikan Doktor penulis selesai pada tahun 2021 melalui beasiswa BPPDN pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Penulis mulai menekuni bidang menulis dengan mengikuti penulisan buku berkolaborasi dengan penulis lainnya dalam bentuk *book chapter* pada tahun 2021 sebagai bentuk edukasi pada diri dalam menulis buku yang lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

BIODATA PENULIS



Fithri Suciati, S.E., M.Ak.

Penulis lahir di Sukabumi 05 April 1987, penulis saat ini bertugas sebagai dosen tetap pada Program Pendidikan Akuntansi STIE PGRI Sukabumi, menyelesaikan pendidikan S1 tahun 2008 dan S2 Magister Akuntansi di STIE Indonesia Jakarta tahun 2017. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan S3 Program Doktorat Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi pada Universitas Pancasila Jakarta. Selain bertugas sebagai dosen tetap penulis juga menjabat di struktural sebagai Sekertaris Prodi Akuntansi. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan buku kolaborasi Pengantar Akuntansi pada tahun 2022, penulis juga telah mendapatkan hibah penelitian Kemenristek Dikti tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Rasty Yulia, S.E., M.M.

Dosen Program Studi D3 Perpajakan
Institut Maritim Prasetya Mandiri, Lampung

Penulis Lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 13 Juli 1983, Ia memperoleh gelar S.E (Sarjana Ekonomi) dari Fakultas Ekonomi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Lampung, Jurusan Akuntansi, pada tahun 2005. Selain itu ia memperoleh gelar M.M (Magister Manajemen) dari Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, dengan bidang konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di tahun 2008. Sejak tahun 2015 sampai saat ini, penulis menjadi dosen tetap Program Studi D3 Perpajakan pada Institut Maritim Prasetya Mandiri di Provinsi Lampung. Mata kuliah yang diampu adalah Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen.

BIODATA PENULIS



Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.

Lahir di Semarang tanggal 26 Oktober 1967. Penulis merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara (STIE PENA) Program Studi Akuntansi. Lulus Magister Akuntansi (S2) STIE Dharma Putra Semarang. Disamping sebagai staf pengajar, penulis juga sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Sophian Wongsargo Semarang. Pengalaman penulis lain adalah sebagai instruktur Bimtek APBD, TUKD, Penilaian Barang Milik Daerah, Penyusunan Sisdur Keuda, di berbagai Pemda mulai tahun 2006-2012.

BIODATA PENULIS



Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF., CAPM., CLAC.

Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri. Dan menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi pada tahun 1995 Ketertarikan penulis dalam ilmu Akuntansi adalah semenjak saya SMEA, kemudian melanjutkan D3 Akuntansi tahun 1994, lalu tahun 1998 melanjutkan S1 Akuntansi, pada tahun 2005 selanjutnya melanjutkan S2 Ilmu Ekonomi pada Universitas Sriwijaya, kemudian 2012- 2014 menempuh PPAk (Program Profesi Akuntan pada Universitas Sriwijaya 2014- 2019 selanjutnya melanjutkan Strata Tiga Doktor Ilmu Akuntansi pada Universitas Padjadjaran Bandung memperoleh gelar (Doktor) Bidang keahlian penulis pada Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (SIAM), saya mengajar pada mata kuliah Metlit, AKMEN, SIM, SIA, Akuntansi Keprilakuan, Etika Bisnis dan Profesi. Certified keahlian yang saya peroleh didapat dari ujian baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada tahun 2019 saya mendapat izin Akuntan Berpraktik (AB) lalu mendirikan Kantor Jasa Akuntan atas Izin PPPK dari Kementerian Keuangan. Penulis Aktif menulis book Chapter dan Journal sinta dan Jurnal Scopus serta jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat semenjak tahun 2015. Email: hertatilesi@yahoo.co.id, lesihermati@uigm.ac.id.

BIODATA PENULIS



Dr. Asri Kunda, S.E., M.M.

Penulis adalah Lektor dalam Ilmu Manajemen di Universitas Dipa Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 2000, dan gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik tahun 2018 pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Ikut Sandwich Dikti tahun 2013 di Illinois University USA. Penulis Mulai mengajar sebagai Dosen Luar Biasa tahun 2000-2006 di LP3i Makassar dan STMIK Akba, yang sekarang berubah menjadi Universitas Teknologi Akba Makassar. Penulis mulai mengajar sebagai Dosen Tetap sejak tahun 2007 sampai sekarang, pada STMIK Dipanegara Makassar yang sekarang berubah menjadi Universitas Dipa Makassar

BIODATA PENULIS



Dini Haryati, S.E., M.Ak., CPMP., CSEM., CPHA., APHA

Lahir di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 01 Januari 1992. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi (S.E) di prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi Magister Akuntansi (M. Ak) di prodi Akuntansi Universitas Jambi tahun 2017. Penulis memiliki gelar non akademik dengan aktif mengikuti *training Performance Management Professional* (CPMP), *Strategic Entrepreneurial Mindset* (CSEM), *Professional Handwriting Analyst* (CPHA), *Advanced Professional Handwriting Analyst* (APHA). Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi, pengauditan dan perbankan. Sebagai Dosen tetap di IAI Nusantara Batanghari dengan jabatan Asisten Ahli. Dengan Pengalaman mengajar 3 (Tiga) tahun yang bersangkutan telah menghasilkan beberapa karya ilmiah baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi dan juga aktif dalam menulis beberapa buku dibidang akuntansi, statistik, transformasi digital, kepemimpinan, dan perilaku. Selain seorang Dosen, yang bersangkutan juga aktif di di bidang Keuangan dan Perbankan.

Email Penulis:

Diniharyati@iainbatanghari.ac.id, diniharyati14@gmail.com

BIODATA PENULIS



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS)
Tangerang

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email Penulis: ristiyana@unis.ac.id

BIODATA PENULIS



Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CCT.

Penulis lahir di Tuban, 4 April 1975. Sekarang penulis aktif mengajar di STIE Pelita Nusantara Semarang sebagai Dosen Akuntansi dengan fokus penelitian terhadap Akuntansi Sektor Publik dan aktif menulis di jurnal penelitian maupun pengabdian. Penulis lulus program Magister dari STIE Dharma Putra tahun 2011.

BIODATA PENULIS



Syamsuddin, S.Pd., M.Ak.

Penulis lahir di Gowa pada tanggal 09 oktober 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 Pend. Akuntansi di Universitas Negeri Makassar dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Latar belakang profesi penulis adalah pernah bekerja sebagai Audit Internal di PT Columbia dan Kalla Group.

BIODATA PENULIS



Dr. Otniel Safkaur, S.E., M.Si., CMA.

Penulis adalah Dosen PNS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Jayapura-Papua. Saat ini menjabat sebagai Dekan 11. Sebelumnya penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Penulis tertarik dalam bidang ilmu Akuntansi semenjak kuliah S1 Akuntansi dari tahun (1992-1997) yang saya selesaikan pada Universitas Putra Bangsa Surabaya Jawa Timur, kemudian melanjutkan S2 pada FEB Program studi Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2000-2002), lalu tahun 2014-2019 melanjutkan S3 Doktor Ilmu Akuntansi pada Universitas Padjadjaran Bandung dan memperoleh gelar (Doktor). Bidang keahlian saya pada Akuntansi Keuangan Daerah. Saya mengajar mata kuliah Keuangan. Bidang keahlian penulis pada Akuntansi Keuangan Daerah. Penulis mengajar pada mata kuliah Keuangan daerah, Metlit, Akuntansi manajemen, dan *Certified* keahlian yang diperoleh penulis didapat dari ujian *Certified* dari luar negeri yaitu dari Australia pada 2020 yaitu CMA. Penulis Aktif menulis *book Chapter* dan *Journal* serta Pengabdian Kepada Masyarakat semenjak tahun 2015. Email: otnielsafkaur@yahoo.co.id